

**PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
(Studi Kasus Desa Jegong, Kabupaten Blora)**



Tesis

**Hertiarto
L4K002011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

TESIS

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Desa Jegong, Kabupaten Blora)

Disusun oleh

Hertiarto
L4K002011

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 11 Juni 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

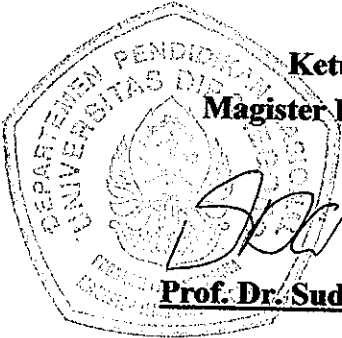

Pembimbing I


Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Pembimbing II


Dr. Tukiman Taruna

Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan,



Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	3220/T/MIL/01
Tgl.	30/12/04

LEMBAR PENGESAHAN

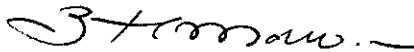
PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN (Studi Kasus Desa Jegong, Kabupaten Blora)

Disusun oleh

Hertiarto
L4K002011

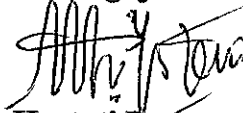
Menyetujui dan Mengesahkan

Penguji I



Dr. Boedi Hendrarto

Penguji II



Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

Mengetahui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

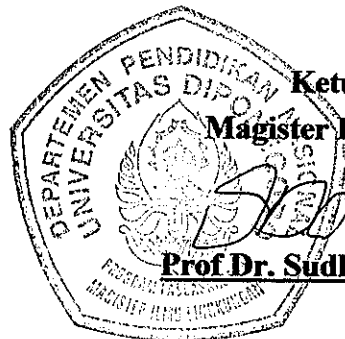


Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

Pembimbing II



Dr. Tukiman Taruna



Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan,

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

KATA PENGANTAR

Tesis ini disusun guna memenuhi tugas akhir pada Program Paswca Sarjana Program studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang. Penyusunan tesis ini merupakan rangkaian terakhir dari persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan Program Pasca Sarjana (S2) yang telah melalui seminar untuk mendapat tanggapan dan masukan untuk penyempurnaannya.

Tesis yang berjudul "Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam rangka Pegelolaan Hutan Berkelanjutan (Studi kasus di Desa Jegong, Kabupaten Blora)" merupakan hasil dari Penelitian Evaluasi terhadap kegiatan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang tengah berjalan di Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberi rekomendasi penyempurnaan model PHBM yang ada sekarang dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan bermuara pada kelestarian lingkungan.

Pada kesempatan ini pula, penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Sudharto P.Hadi, MES, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, yang sekaligus sebagai dosen pembimbing I;
2. Dr. Tukiman Taruna, sebagai dosen pembimbing II;
3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan ijin belajar kepada penulis;
4. Segenap Dosen, Pengelola dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, yang telah memberi ilmu dan membantu penulis menyelesaikantesis;
5. Isteri dan anak-anak tercinta, yang telah memberi dorongan dan semangat serta merelakan waktunya tersita dalam mendukung selesainya tesis ini;

6. Rekan-rekan sekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis;
7. Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan segenap jajarannya yang membantu penulis terutama dalam survai penelitian untuk penyusunan tesis ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga budi baik dan ketulusan hati Bapak/ Ibu/ Saudara sekalian yang membantu penyelesaian tesis ini mendapat ridho dari Allah SWT. Amien.

Penulis,



HERTIARTO

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK

Kata Kunci: Kesetaraan, jiwa berbagi, partisipasi masyarakat, pengelolaan hutan berkelanjutan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan kesalahan penentu kebijakan pengelolaan hutan yang tidak segera menyesuaikan sistem pengelolaan hutannya dengan perkembangan sosial-ekonomi di Jawa menyebabkan terjadinya penjarahan hutan yang berdampak pada degradasi hutan dan lingkungan. Untuk mengantisipasi hal ini Perum Perhutani mencoba mengubah sistem pengelolaan hutannya dengan sistem pengelolaan hutan yang dinilai lebih strategis, disebut Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM dirancang sebagai sistem pengelolaan hutan yang menempatkan dua pelaku (stake holders) yaitu masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani pada kedudukan setara dalam pengelolaan hutan dengan jiwa berbagi, dan pertama kali diujicobakan di Desa Jegong, Kabupaten Blora pada tahun 2002.

Penelitian ini adalah Penelitian Evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan PHBM sudah menuju pengelolaan hutan berkelanjutan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk penyempurnaan sistem tersebut.

Hasil penelitian pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi PHBM di Desa Jegong menunjukkan bahwa penerapan PHBM belum sebagaimana yang diharapkan. Perencanaan masih lemah, karena tidak dibuatnya perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka 5 tahun yang telah dibuatpun tidak didukung data yang berasal dari PRA. Pelaksanaan PHBM belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani yang ditandai dengan tidak terlaksanannya kegiatan lapangan, baik yang berbasis lahan maupun non lahan secara konsekwen sesuai dengan perjanjian kerja sama. Meskipun persepsi masyarakat terhadap hutan dan PHBM cukup baik, namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan PHBM tidak terlalu tinggi, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak berkembang. Pemantauan dan evaluasi terhadap PHBM, yang seharusnya dilakukan minimal setahun sekali belum pernah diselenggarakan.

Model PHBM berkelanjutan harus dimulai dengan diskusi dan dialog di tingkat desa. Penyusunan rencana harus berdasar perencanaan partisipatif yang dilandasi PRA, pelaksanaan kegiatan diawali dengan peningkatan sumberdaya manusia pada setiap kegiatan PHBM, serta pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemantauan dan evaluasi harus diselenggarakan setiap tahun yang dilakukan oleh Forum Komunikasi PHBM yang anggotanya mempunyai kewenangan dan kemampuan serta kesempatan yang cukup untuk menjalankan tugasnya untuk mengevaluasi dampak PHBM terhadap masyarakat dan lingkungannya.

COMMUNITY COOPERATIVE FOREST MANAGEMENT RELATED TO SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT

ABSTRACT

Key words: equal position, soul of sharing one another, public participation, sustainable forest management

Population increase and the unmatched forest management with the development of socio economic in Java causes the rise of forest crime, led to the degradation of forest and environment. To anticipate such a condition, the Forestry Corporation tried to change its forest management system to the one which is considered more strategic, called Community Cooperative Forest Management (PHBM/Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat). This PHBM is designed as a system of forest management which placed two parties (stakeholders) namely the forest society and the Forestry Corporation on an equal position in managing the forests over the soul of sharing one another.

PHBM was firstly tried out at Desa Jegong, Kabupaten Blora on 2002. This research is intended to evaluate realization of PHBM as a sustainable forest management.

The results of the research show that PHBM planning, implementation, and evaluation at Desa Jegong has not been satisfying. PHBM planning is still weak, since there are no long-term and yearly planning. The 5-year is not supported by PRA data. PHBM implementation is not carried out as instructed in the decree of Supervisory Board chairman of the Forestry Corporation. On area and non-area activities are not consequently implemented as stated on the cooperative agreement. Although the society perception to the forest and PHBM is quite well, but their participation in the activities of Forest Village Societal Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) and PHBM is not high so that the society's economic empowerment is not developed. Supervision and evaluation to PHBM, which should be held at least once a year, is never conducted.

Sustainable PHBM model should be started with discussions and dialogues in the villages level. Planning should be based on participatory planning (through PRA), implementation activity should be based started with human resources development in every PHBM activity, and the society economic should be developed to increase the public participation. The PHBM Communication Forum, whose members have enough authority, ability and opportunity to handle their-jobs, should yearly control and evaluate PHBM impact to community and their environment.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan.	16
BAB II. KAJIAN TEORI.	18
2.1 Pengertian Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.	18
2.2 Prinsip-prinsip dan Tujuan PHBM	19
2.3 Pengelolaan hutan berkelanjutan	19
BAB III. METODE PENELITIAN.	32
3.1 Strategi riset	32
3.2 Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian	34
3.3 Variabel penelitian.	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .	35

3.5 Pengolahan dan Analisis data.	38
3.6 Penyusunan laporan hasil penelitian.	39
BAB IV. KONDISI DESA JEGONG DAN HUTAN PANGKUANNYA	40
4.1 Deskripsi Desa Jegong.	40
4.2 Deskripsi Hutan Pangkuan Desa Jegong.	55
 BAB V. ANALISIS HASIL PENELITIAN	61
5.1 Pelaksanaan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama masyarakat (PHBM) di Desa Jegong.	61
5.1.1 Perencanaan	62
5.1.2 Pelaksanaan	68
5.1.3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	140
5.2 Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat	149
5.2.1 Faktor pendorong.	149
5.2.2 Faktor penghambat	151
5.3 Model Penyempurnaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan.	155
5.3.1 Landasan Pemikiran	155
5.3.2 Model penyempurnaan PHBM	156
5.5.2.1 Penyempurnaan Sistem Perencanaan	156
5.5.2.2 Penyempurnaan sistem pelaksanaan	169
5.5.2.3 Penyempurnaan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan	182
 BAB VI. KESIMPULAN, SARAN DAN EREKOMENDASI	190
6.1 KESIMPULAN	190

6.1.1	Pelaksanaan PHBM di Desa Jegong	190
6.1.2	Faktor-faktor pendorong dan penghambat	192
6.1.3	Model penyempurnaan Penyelenggaraan PHBM dalam rangka pelestarian hutan berkelanjutan	192
6.2	SARAN	193
6.2.1	Pelaksanaan PHBM di Desa Jegong	193
6.2.2	Faktor-faktor pendorong dan penghambat	195
6.2.3	Model penyempurnaan pelaksanaan PHBM dalam rangka pelestarian hutan berkelanjutan	195
6.3	REKOMENDASI	196
	DAFTAR PUSTAKA	197
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kehilangan pohon sebelum dan sesudah penjarahan hutan di Jawa dan Jawa Tengah (1995 – 2003)	9
Tabel 2.	Struktur penduduk Desa Jegong berdasar kelompok umur pada tahun 2003.	45
Tabel 3.	Luas kepemilikan lahan responden.	46
Tabel 4.	Kepemilikan rumah responden.	47
Tabel 5.	Lama waktu responden tinggal di Desa Jegong.	48
Tabel 6.	Jarak tempat tinggal responden dengan kawasan hutan.	49
Tabel 7.	Jumlah penduduk Desa Jegong usia 15 tahun ke atas berdasar Mata Pencaharian tahun 2003.	50
Tabel 8.	Jenis pekerjaan responden .	51
Tabel 9.	Tingkat penghasilan responden.	52
Tabel 10.	Tingkat pendidikan penduduk Desa Jegong tahun 2003.	53
Tabel 11.	Tingkat pendidikan responden penduduk Desa Jegong.	54
Tabel 12.	Kelas umur, anak petak dan luas hutan pangkuan Desa Jegong.	56
Tabel 13.	Jumlah pohon yang dijarah dan kerugiannya pada Hutan Pangkuan Desa Jegong tahun 1995 sampai 2003.	59
Tabel 14.	Pemahaman responden terhadap keberadaan hutan Perhutani di sekitar Desa Jegong	72
Tabel 15.	Persepsi responden terhadap manfaat hutan.	73
Tabel 16.	Persepsi responden terhadap bentuk manfaat hutan.	74
Tabel 17.	Persepsi responden terhadap tingkat pencurian kayu di Desa Jegong	76

Tabel 18.	Persepsi responden terhadap tingkat pencurian kayu di Desa Jegong setelah diselenggarakannya PHBM di Desa Jegong	..77
Tabel 19.	Persepsi responden mengenai siapa yang harus mengamankan hutan	78
Tabel 20.	Persepsi responden dalam usaha ikut mencegah penjarahan hutan	79
Tabel 21.	Persepsi responden tentang tanggung jawab kelestarian hutan	.80
Tabel 22.	Alasan responden tentang tanggung jawab kelestarian hutan	80
Tabel 23.	Pengetahuan responden tentang adanya PHBM di Desa Jegong.	84
Tabel 24.	Tabulasi silang antara dukuh responden dengan pengetahuan tentang adanya PHBM di Desa Jegong.	85
Tabel 25.	Sumber informasi tentang adanya PHBM di Desa Jegong.	87
Tabel 26.	Sikap responden terhadap diterapkannya PHBM di Desa Jegong.	88
Tabel 27.	Persepsi responden tentang pengelola hutan.	90
Tabel 28.	Persepsi responden mengenai keterlibatan LMDH dalam kegiatan PHBM.	93
Tabel 29.	Alasan responden menyetujui penerapan PHBM di Desa Jegong.	95
Tabel 30.	Keanggotaan responden dalam LMDH.	101
Tabel 31.	Alasan responden menjadi anggota LMDH.	103
Tabel 32.	Alasan responden tidak menjadi anggota LMDH.	103
Tabel 33.	Tabulasi silang antara domisili responden dengan	

	keikutsertaan menjadi anggota LMDH.	103
Tabel 34.	Tingkat kehadiran responden dalam pertemuan-pertemuan LMDH.	104
Tabel 35.	Tabulasi silang antara kedudukan responden dengan kehadiran dalam pertemuan.	105
Tabel 36.	Tabulasi silang antara domisili responden dengan kehadiran dalam pertemuan.	106
Tabel 37.	Aktivitas responden dalam mengajukan usul pada pertemuan LMDH.	107
Tabel 38.	Tingkat pengetahuan dan keaktifan responden berkaitan dengan rencana kerja dan cara pelaksanaan LMDH	108
Tabel 39.	Persepsi responden mengenai ketepatan sistem PHBM	109
Tabel 40.	Hubungan antara tingkat pendidikan responden dengan pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM	110
Tabel 41.	Hubungan antara domisili responden dengan pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM	111
Tabel 42.	Tingkat partisipasi responden berupa sumbangan untuk kegiatan LMDH.	112
Tabel 43.	Bentuk sumbangan yang diberikan responden kepada LMDH.	112
Tabel 44.	Tingkat partisipasi responden berupa pemanfaatan pada kegiatan LMDH dan PHBM.	113
Tabel 45.	Bentuk pemanfaatan responden pada kegiatan LMDH dan PHBM.	114
Tabel 46.	Partisipasi responden dalam kegiatan patroli pengamanan hutan.	120

Tabel 47.	Tabulasi silang antara domisili responden dengan keikutsertaan dalam patroli pengamanan hutan.	121
Tabel 48.	Persepsi responden tentang peningkatan kesejahteraan dengan diselenggarakannya PHBM selama 2 tahun	122
Tabel 49.	Tabulasi silang antara domisili responden dengan peningkatan kesejahteraan.	122
Tabel 50.	Persepsi bahwa dengan PHBM kesejahteraan akan meningkat.	124
Tabel 51.	Tabulasi silang antara domisili responden dengan tingkat persepsi tentang peningkatan kesejahteraan.	125
Tabel 52.	Persepsi responden terhadap sikap petugas Perhutani di Desa Jegong sebelum PHBM.	136
Tabel 53.	Persepsi responden terhadap sikap petugas Perhutani di Desa Jegong setelah PHBM.	137
Tabel 54.	Tingkat hubungan kesetaraan antara Perhutani dengan masyarakat.	138
Tabel 55.	Rekapitulasi hasil penilaian LMDH Wana Lestari, Desa Jegong Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.	142
Tabel 56.	Matriks evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Jegong	144
Tabel 57.	Model Penyempurnaan Perencanaan dan Pelaksanaan PHBM	184

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Hubungan antara pertambahan penduduk, degradasi Hutan dan kerusakan lingkungan	5
Gambar 2	: Rencana proses perubahan sistem pengelolaan hutan di Jawa	12
Gambar 3	: Peta letak dan bentuk Desa Jegong	42
Gambar 4	: Peta letak dan bentuk hutan pangkuan Desa Jegong	58
Gambar 5	: Alur pikir penyempurnaan model PHBM	185
Gambar 6	: Alur pikir penyempurnaan sistem perencanaan PHBM	186
Gambar 7	: Alur pikir penyempurnaan sistem pelaksanaan PHBM	187
Gambar 8	: Alur pikir penyempurnaan sistem evaluasi PHBM	188
Gambar 9	: Alur pikir hubungan PHBM dengan kelestarian lingkungan hidup	189

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I.** Foto-foto kegiatan survai di Desa Jegong.
- Lampiran II.** Keputusan Kewtua Dewan Pengawas Perum Perhutani
(selaku Pengurus Pereusahaan) No. 136/KPTS/DIR/2001
Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat.
- Lampiran III.** Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.: 24 Tahun 2001
Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.

BAB I

PENDAHULUAN.

Pada bab ini disajikan latar belakang diselenggarakannya Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Uraian diawali dengan sejarah pengelolaan hutan di Jawa, dampak perubahan sosial-ekonomi, perubahan-perubahan institusi pengelola hutan, konflik yang terjadi antara pengelola hutan dan masyarakat sekitar hutan yang bermuara pada terjadinya penjarahan hutan. Konsep Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama masyarakat yang diperkenalkan nampaknya dapat menjadi solusi terhadap ancaman degradasi hutan yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Selain itu pada bab ini juga disajikan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan originalitas penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang digunakan.

1.1 Latar belakang

1.1.1 Hutan di Jawa dan pengelolaannya.

Hutan merupakan bagian lingkungan hidup manusia yang sangat vital. Hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain fungsi hidro-orologis, penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan tanah dan iklim serta penyerap karbon (*carbon sink*). Di samping itu hutan juga memiliki fungsi ekonomi yaitu sebagai pemasok hasil hutan berupa kayu dan nonkayu dan fungsi sosial antara lain yaitu penyerapan lapangan kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Sejak jaman purba manusia mempunyai hubungan yang erat dengan hutan. Pada mulanya hutan berfungsi sebagai sumber bahan makanan dan sekaligus tempat untuk berlindung maupun berteduh. Akan tetapi sejak manusia mulai membudi-dayakan binatang dan tumbuh-tumbuhan untuk

memperoleh jaminan sumber makanan, hubungan langsung manusia dengan hutan sebagai sumber makanan dan tempat tinggal secara berangsur-angsur menjadi semakin berkurang.

Sementara itu perkembangan teknologi dan industri terus berlangsung, yang menimbulkan di samping aspek-aspek positif, juga ada dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sewaktu lingkungan telah menjadi masalah yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi terganggu dan tidak nyaman lagi, kembali manusia memerlukan keberadaan hutan karena peranannya yang luar biasa untuk dapat menetralkan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup, sehingga menginginkan pengelolaan hutan yang dapat menjamin keberlanjutan fungsi hutan, khususnya untuk menjaga lingkungan hidup.

Hutan di Jawa menurut Simon (1993) merupakan hutan di Indonesia yang pertama kali dikelola berdasarkan azas kelestarian, yaitu tebangan tahunan atau periodik tidak mengurangi kapasitas hasil dan bila setelah penebangan dilakukan di seluruh kawasan hutan, potensinya tidak berkurang dibanding dengan sebelum dilakukan penebangan. Selanjutnya dikatakan, sistem pengelolaan hutan tersebut mulai dirumuskan pada pertengahan abad 18, setelah pemungutan kayu jati berjalan lebih dari 200 tahun. Perumusan sistem pengelolaan hutan yang meliputi berbagai aspek di bidang kehutanan di antaranya perencanaan hutan, teknis penanaman hutan, teknis pemeliharaan hutan dan penebangan kayu, memerlukan waktu yang panjang karena harus dicoba dan diulang berkali-kali. Kegiatan itu baru dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 1938.

Pada waktu sistem pengelolaan hutan di Jawa mulai dirumuskan pada tahun 1850, kepadatan penduduk di Pulau Jawa masih rendah yaitu baru 115 orang/km² atau berjumlah sekitar \pm 15,00 juta orang . Kemudian pada tahun 1895 penduduk di Jawa meningkat menjadi sekitar \pm 25,37 juta orang dengan kepadatan \pm 190 orang/km² (Simon, 1993). Dengan kepadatan penduduk

sebesar itu masyarakat masih memiliki lahan garapan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Demikian pula kebutuhan masyarakat akan kayu masih rendah. Jadi faktor sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan belum merupakan variabel yang perlu diperhitungkan dalam merumuskan Sistem Pengelolaan Hutan.

1.1.2 Dampak pertambahan penduduk dan perubahan sosial-ekonomi.

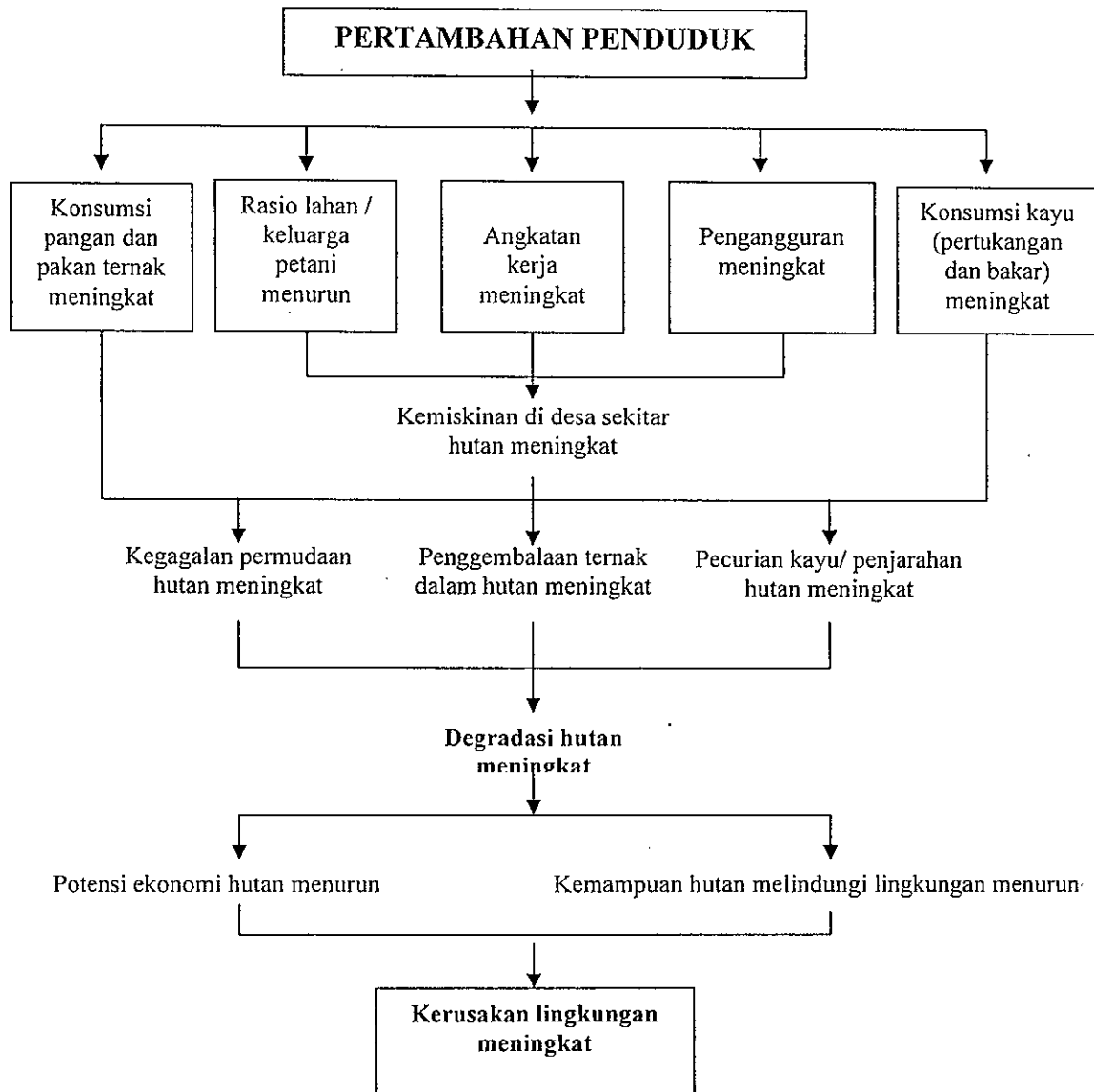
Pada abad 20, jumlah penduduk di Jawa meningkat tajam. Tahun 1785 jumlah penduduk masih sebesar $\pm 3,5$ juta orang dengan kepadatan ± 26 jiwa/Km²; kemudian pada tahun 1895 sebesar $\pm 25,37$ juta orang dengan kepadatan 192 jiwa/Km²; pada tahun 1930 sebanyak $\pm 40,89$ juta orang dengan kepadatan ± 309 jiwa/Km² dan pada tahun 1995 menjadi $\pm 114,734$ juta orang dengan kepadatan ± 900 jiwa/Km² (Simon, 1999). Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kondisi sosial-ekonomi masyarakat telah mulai mengalami perubahan. Hal itu disebabkan kepadatan penduduk telah mendekati bahkan melampaui tingkat keseimbangan rasio yang normal antara luas lahan garapan yang tersedia dengan jumlah keluarga tani. Menurut Simon (1993) rata-rata kebutuhan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah seluas 0,38 ha sawah dan 0,5 ha tegal atau dengan rasio 0,88 ha/keluarga petani. Selanjutnya dikatakan bahwa rasio lahan pertanian per keluarga petani pada tahun 1930 dan 1946 berturut-turut 0,91 ha/keluarga petani dan 0,79 ha/keluarga petani. Untungnya masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kebutuhan pangan dan lapangan kerja pada pertengahan abad 20 masih dapat dipecahkan dengan intensifikasi di bidang pertanian. Itulah sebabnya dalam periode tersebut dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap kelestarian hutan belum nampak.

Setelah era kemerdekaan, banyak hal mengalami perubahan, lebih-lebih dalam pembangunan di era orde baru. Pertambahan penduduk yang

tinggi menuntut lebih banyak fasilitas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti energi, sarana dan prasarana mobilitas, kebutuhan akan perumahan, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Akibatnya timbul banyak masalah sosial-ekonomi, sehingga intensifikasi pertanian bukan lagi merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan pangan, papan, energi dan kesempatan kerja. Dampak peningkatan jumlah penduduk dalam kaitannya pemilikan lahan garapan perkeluarga tani mulai terasa.

Di bidang kehutanan, dampak peningkatan penduduk terhadap kelestarian hutan mulai dirasakan kuat sejak akhir dasa warsa 1950-an. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan kayu bakar, kayu pertukangan, padang penggembalaan, maupun kebutuhan akan lapangan kerja baru (Simon, 1993). Tuntutan ini juga mendorong intensifikasi kegiatan kehutanan, yang dapat dilihat pada kegiatan pemungutan kayu dan kegiatan penanaman kembali hutan bekas tebangan dengan permudaan hutan (buatan). Gambar hubungan negatif antara pertambahan penduduk, degradasi hutan dan kerusakan lingkungan dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Gambar: 1. Hubungan antara pertumbuhan penduduk, degradasi hutan dan kerusakan lingkungan.



Sumber: Simon (1993), dimodifikasi.

Walaupun telah terjadi perubahan-perubahan di bidang sosial-ekonomi masyarakat, namun dasar-dasar sistem pengelolaan hutan di Jawa yang diletakkan pada abad 19 masih dipertahankan, yaitu sistem pengelolaan

hutan yang pada dasarnya lebih banyak bertumpu pada aspek teknis kehutanan, dan hanya sedikit sekali memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Pengelolaan hutan di Jawa yang seharusnya telah memerlukan penyempurnaan, tetap masih tampak berjalan normal, meskipun gejala-gejala timbulnya masalah sosial-ekonomi yang berakar dari kepadatan penduduk yang tinggi sudah mulai nampak, misalnya kurangnya kesempatan kerja di perdesaan, kemiskinan, kecilnya pendapatan petani dan rendahnya pendidikan. Namun karena kualitas sumberdaya manusia yang mengelola hutan pada waktu itu belum memadai, maka gejala-gejala timbulnya masalah sosial itu tidak segera ditangani. Akibatnya, pada dekade tahun 1960-an masalah sosial yang berkaitan dengan pengelolaan hutan makin menumpuk.

1.1.3 Perubahan institusi pengelola hutan.

Pada tahun 1963, untuk memperoleh dana yang diperlukan bagi pembangunan nasional, pengelolaan hutan di Pulau Jawa yang semula diselenggarakan oleh Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura beralih ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernama PN Perhutani. Status pengelola hutan ini pada tahun 1972 berubah menjadi Perum Perhutani dan pada tahun 2000 berubah lagi menjadi PT Perhutani. Terakhir, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2003, status PT. Perhutani (persero) berubah kembali menjadi Perum Perhutani. Jawatan Kehutanan adalah suatu perangkat pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada publik pada bidang tertentu, yang dalam hal ini di bidang kehutanan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (yang merupakan penataan kembali semua Undang-undang yang berkaitan dengan BUMN yang telah ada), menjelaskan bahwa BUMN baik berbentuk Perum maupun Persero mempunyai sifat usaha untuk memupuk keuntungan. Perbedaan antara Perum dan Persero bahwa

keberadaan Perum adalah untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun harus diupayakan mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Perubahan status yang terjadi pada tahun 1963 yaitu dari bentuk Jawatan ke Perusahaan menyebabkan permasalahan sosial yang telah menumpuk sejak tahun 1960-an tetap tidak disadari oleh pengelola hutan, karena sifat usaha “perusahaan” yang disandang oleh pengelola hutan menyebabkan lebih mengedepankan prinsip ekonomi. Hal ini mengakibatkan hubungan antara pengelola hutan dengan masyarakat di sekitarnya menjadi semakin tidak harmonis karena Perhutani sedikit sekali memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar hutan bagi peningkatan kesejahteraannya. Konflik antara kedua belah pihak yang semestinya sama-sama menjadi *stakeholders* dalam pengelolaan hutan itu semakin meningkat sepanjang dekade 1980 – 1990, karena pemerintah pada waktu itu menerapkan kebijakan yang bersifat represif (banyak larangan dan tindakan hukum) dalam menangani masalah sosial.

1.1.4 Konflik antara pengelola hutan dengan masyarakat sekitar hutan.

Faktor utama yang menyebabkan timbulnya kemunduran potensi hutan jati di Jawa adalah adanya kemiskinan di daerah perdesaan karena menurunnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian dan meningkatnya angkatan kerja, sedang kesempatan kerja di sektor non-pertanian belum tersedia cukup. Perum Perhutani tetap tidak peka terhadap perubahan sosial-ekonomi tersebut sehingga konflik yang terjadi antara pengelola hutan dengan masyarakat sekitar hutan mulai mengganggu kegiatan teknis pengelolaan hutan. Gangguan ini berupa kegagalan tanaman hutan, penggembalaan ternak yang berlebihan di lahan hutan, pencurian kayu dan lain sebagainya yang mendorong hutan terus terdegradasi. Bila hutan terus menerus mengalami degradasi, maka fungsi hutan menjadi terganggu. Pada gilirannya hutan akan benar-benar kehilangan fungsinya sebagai pelestari lingkungan

hidup. Oleh karena itu tidak salah bila degradasi hutan dipandang sebagai masalah utama di Jawa.

Penerapan program dengan *prosperity approach* berupa Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) yang dilakukan Perum Perhutani, misalnya Program Perhutanan Sosial, Insus Tumpang Sari, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi, yang sedianya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan ternyata pada prakteknya lebih banyak ditujukan untuk mengatasi masalah teknis kehutanan. Kekurangan atau kelemahan program-program yang diciptakan untuk mengatasi degradasi hutan di Jawa selama ini terletak pada penetapan sasaran yang langsung untuk mengatasi akibat yang timbul dari masalah yang ada, bukan memecahkan akar masalahnya. Sebagai contoh, dalam program *prosperity approach* misalnya, masalah yang akan diatasi adalah masalah kegagalan pembuatan tanaman, penggembalaan temak, dan pencurian kayu. Seharusnya sasaran yang dituju adalah mengatasi masalah pangan, kesempatan kerja, kayu bakar dan kayu pertukangan. Di tempat-tempat tertentu masalah pakan temak mungkin dapat dimasukkan dalam daftar masalah yang harus diperhatikan.

1.1.5 Penjarahan hutan.

Konflik antara pengelola hutan dengan masyarakat sekitar hutan akhirnya meledak ketika pemerintah, termasuk pengelola hutan di Pulau Jawa kehilangan *power* pada perubahan politik tahun 1998. Rakyat yang *memenangkan* konflik tersebut melakukan penjarahan hutan, yang kemudian dimanfaatkan pula oleh para avonturir ekonomi yang hanya mementingkan diri sendiri untuk keperluan sesaat. Kondisi ini diperparah oleh semakin sulitnya beban hidup rakyat akibat krisis ekonomi. Hutan yang selama ini merupakan asset yang tidak dapat mereka miliki, tiba-tiba menjadi tumpuan harapan untuk mengatasi kesulitan hidup. Jalan pintas yang ditempuh ialah

penjarahan hutan. Data mengenai besarnya kehilangan pohon sebelum dan sesudah penjarahan hutan di Jawa dan Jawa Tengah dapat dilihat pada **Tabel 1**

Tabel: 1. Kehilangan pohon sebelum dan sesudah penjarahan hutan di Jawa dan Jawa Tengah (1995 – 2003)

No.	Tahun	Jawa (pohon)	Jawa Tengah (pohon)
1	1995	200.273	112.803
2	1996	202.192	107.400
3	1997	202.946	124.755
4	1998	1.099.915	888.595
5	1999	3.179.973	2.475.181
6	2000	2.574.948	1.685.676
7	2001	2.675.161	1.832.980
8	2002	1.539.334	1.158.970
9	2003	502.386	261.649

Keterangan: Penjarahan mulai pada tahun 1998

Sumber: Perum Perhutani, 2004

Dari tabel 1 di atas, tampak jelas bahwa kehilangan pohon meningkat dengan signifikan pada tahun 1998 yaitu pada saat reformasi berlangsung. Rata-rata kehilangan pohon **dari tahun 1995 sampai dengan 1997** kehilangan pohon rata-rata sekitar 201.800 pohon pertahun, maka pada tahun 1998 naik lebih dari 400 %, bahkan pada tahun 1999 naik hampir tujuh kali lipat. Kehilangan pohon sebanyak ini belum pernah terjadi dalam sejarah Perhutani.

Penjarahan hutan merupakan modus baru yang muncul seiring dengan terjadinya eskalasi radikalisme rakyat. Istilah-istilah klasik, seperti pencurian, pembabatan, dan perusakan hutan, rupanya tidak lagi cukup mewakili realitas dan progresivitas massa. Menurut masyarakat sekitar hutan, selama ini hutan yang ada di sekelilingnya dianggap tidak memberikan kontribusi yang berarti dan setimpal bagi hidupnya. Fenomena penjarahan hutan dapat juga dijelaskan dari adanya situasi kontradiktif secara sosio-ekonomi dan sosio-kultural antara apa yang telah dihasilkan dan disumbangkan hutan untuk negara dengan apa yang telah *dinikmati* rakyat terutama yang tinggal di sekitar hutan. Kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh Perum Perhutani selama ini, ternyata hanya akses marginal dan bukan merupakan faktor yang dapat mengangkat kehidupan mereka.

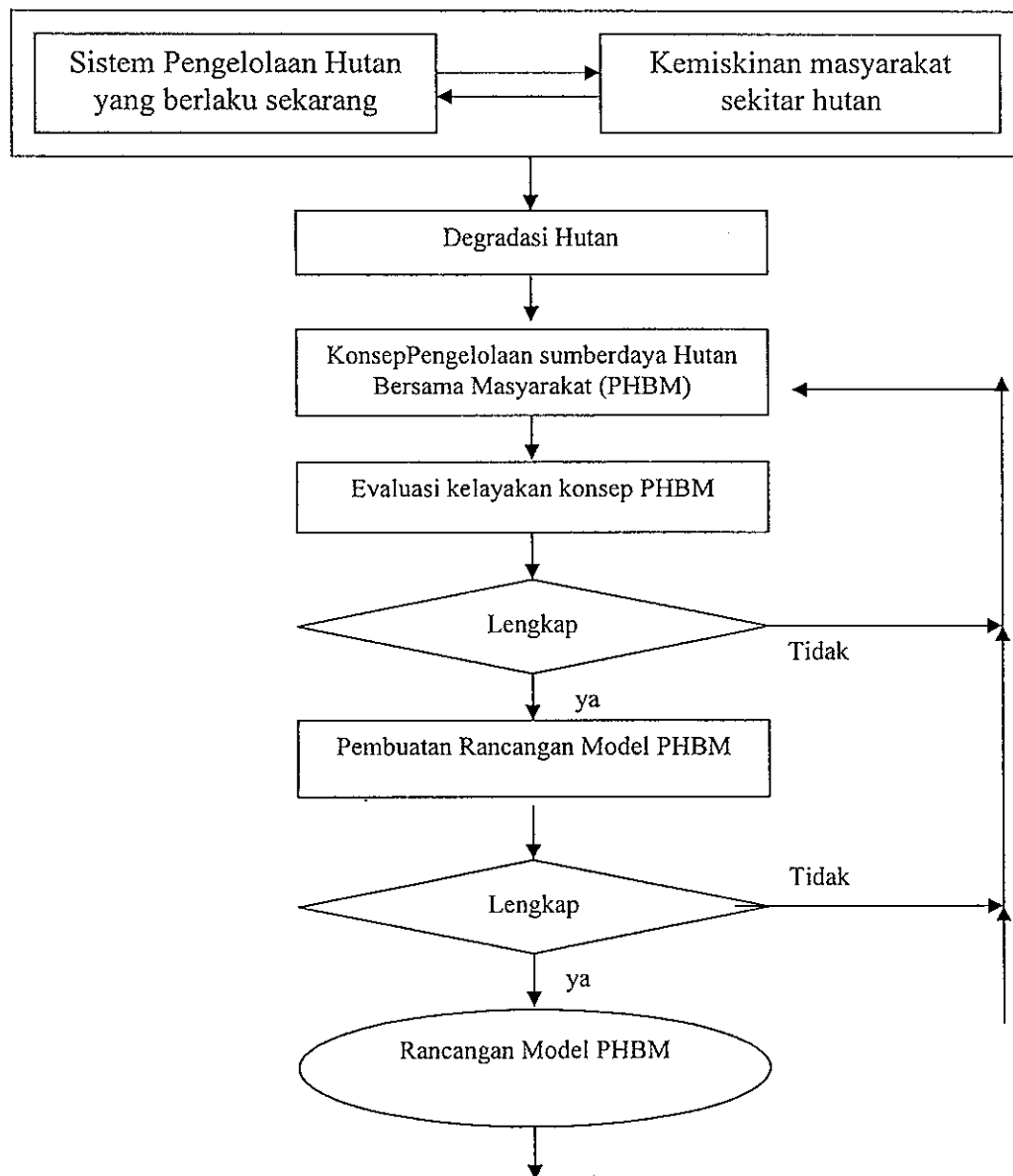
1.1.6 Pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai alternatif penyelamatan hutan dan Lingkungan hidup.

Oleh karena masalah sosial merupakan sumber degradasi hutan yang cukup parah di Jawa, maka Perum Perhutani mencoba mengubah sistem pengelolaan hutannya dengan sistem pengelolaan hutan yang dinilai lebih strategis, dan dipandang dapat meminimalkan kasus penjarahan hutan. Sistem pengelolaan yang baru ini disebut Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pengelolaan hutan dengan sistem ini didasarkan pada pandangan tentang perlunya mempertimbangkan faktor-faktor sosial-ekonomi dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan hutan. Dua hal inilah yang menentukan pengelolaan hutan dapat dilakukan secara adil, demokratis, efisien, dan profesional, guna menjamin berkelanjutannya fungsi dan manfaat hutan.

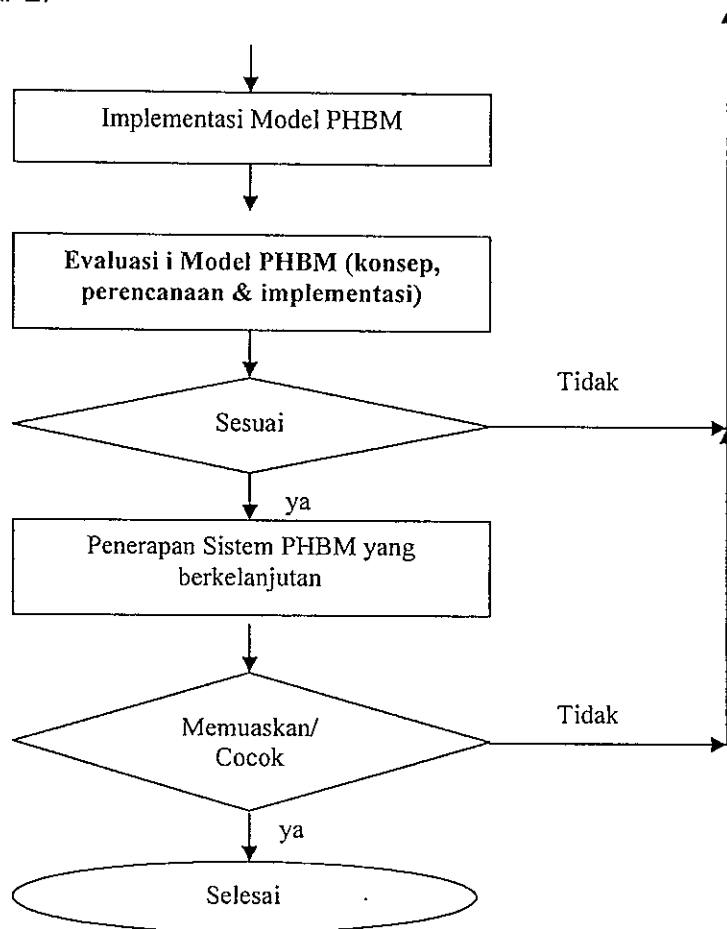
Selama ini pola-pola relasi yang terjalin dan terkonstruksi antara masyarakat sekitar hutan dengan Perum Perhutani, baik secara institusional maupun personal, lebih bermakna pada pola relasi kerja yang *berhenti* pada

urusan-urusan ekonomi marginal semata. Mereka bekerja sebagai pekerja harian lepas musiman, dan Perum Perhutani membayar sesuai dengan prestasi kerjanya. Masyarakat sekitar hutan dianggap sebagai penyedia tenaga murah bagi kegiatan Perum Perhutani. Selama ini belum ada relasi-relasi sosial dan kultural yang strategis, yaitu relasi yang memungkinkan mereka menjadi bagian integral dari pengelolaan hutan. Jika sistem pengelolaan hutan masih terus seperti yang terjadi sekarang ini, sulit diharapkan terbangunnya kesadaran rakyat akan pentingnya hutan. Kesadaran ini akan terstimulasi secara *inheren* jika mereka mendapatkan pilihan baru selain dari kebijakan yang ditempuh Perum Perhutani selama ini dalam memberdayakan rakyat sekitar hutan pada berbagai situasi sosial. Proses perubahan sistem pengelolaan dari yang berlaku sekarang menuju sistem pengelolaan yang baru dan lebih sesuai, dapat dilihat pada **Gambar 2**.

Gambar: 2. Rencana proses perubahan sistem pengelolaan hutan di Jawa.



Lanjutan gambar 2.



Sumber: Simon (1993), dimodifikasi.



: Pada tahap ini PHBM Perlu diadakan penelitian evaluasi untuk mendapatkan umpan balik bagi penyempurnaan konsep, perencanaan dan implementasi PHBM.

1.2 Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan rencana proses perubahan pengelolaan hutan di Jawa, maka pelaksanaan PHBM perlu dievaluasi agar dapat menjawab permasalahan berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan PHBM di desa penelitian ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat keberhasilan PHBM dalam rangka pelestarian hutan dan lingkungan hidup ?
- c. Bagaimanakah model pelaksanaan PHBM yang berkelanjutan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan gambaran, data dan fakta mengenai pelaksanaan PHBM di Desa Jegong.
- b. Untuk mendapatkan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan PHBM dalam rangka pelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- c. Untuk menemukan model pelaksanaan PHBM yang tepat bagi dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah, pengelola hutan dan masyarakat) memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Jawa.

1.4.1 Manfaat bagi pengambil kebijakan.

- a. Untuk mendapatkan informasi serta data implementasi pelaksanaan PHBM.

- b. Memberikan suatu model pola hubungan antara masyarakat dengan pengelola hutan dalam rangka menciptakan pengelolaan hutan berkelanjutan.
- c. Sebagai masukan bagi penyempurnakan sistem pengelolaan hutan di Jawa Tengah maupun di Pulau Jawa dalam rangka mendapatkan bentuk sistem pengelolaan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi.
- d. Dapat membantu berbagai pihak terkait, terutama para pengambil kebijakan Kehutanan, dalam perencanaan pengelolaan lingkungan.

1.4.2 Manfaat bagi masyarakat desa hutan dan pengelola hutan.

- a. Masyarakat desa hutan mendapatkan kesempatan yang luas untuk dapat memberikan masukan dalam rangka memperbaiki kebijakan PHBM.
- b. Pengelola hutan mendapat masukan untuk menyempurnakan pola hubungan dengan masyarakat desa hutan dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
- c. Mempertegas kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat desa hutan dan pengelola hutan dalam PHBM untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.

1.4.3 Manfaat bagi peneliti.

- a. Mendapatkan pembelajaran mengenai salah satu cara untuk mengatasi masalah lingkungan hidup, sehubungan dengan degradasi fungsi hutan akibat masalah sosial yang timbul karena sistem pengelolaan hutan.

- b. Meningkatkan pengetahuan peneliti dalam membangun model pengelolaan hutan yang baik dalam rangka perencanaan lingkungan.

1.4.4 Originalitas penelitian.

Penelitian terhadap sistem Pengelolaan Hutan dalam kaitannya dengan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan sudah banyak dilakukan, antara lain "Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di wilayah Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah" oleh Universitas Diponegoro tahun 1996; "Studi Pengaruh Model Agro Forestry Terhadap Pertumbuhan Jati" oleh Institut Pertanian Bogor tahun 1989; "Hutan Jati dan Kemakmuran" oleh Hasanu Simon pada tahun 1993. Namun kajian terhadap pelaksanaan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat sebagaimana Surat Keputusan Direktur Utama Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat belum pernah dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan.

Sistematika dalam penulisan thesis ini dibagi dalam beberapa bab, yang akan menguraikan dari latar belakang sampai dengan kesimpulan dan rekomendasi yang akan diuraikan dalam masing-masing bab sebagai berikut: Bab I berupa pendahuluan yang berisi: latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan original penelitian.

Bab II merupakan kajian teori yang membahas tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, prinsip-prinsip dan tujuan PHBM, pengelolaan hutan berkelanjutan, ancaman terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan, serta Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Bab III berisi pemilihan lokasi penelitian, strategi riset, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV berupa kondisi desa Jegong dan hutan pangkuan desa Jegong yang menjelaskan tentang: letak dan luasnya, keadaan fisik lokasi dan penggunaan tanah. Sedangkan karakteristik masyarakat Desa Jegong berisi tentang kependudukan dan masalah sosial-ekonominya. Keadaan hutan pangkuan Desa Jegong berisi tentang luas, petak-petak yang masuk dalam hutan pangkuan dan keadaan petak-petak tersebut.

Bab V berisi analisis mengenai pelaksanaan PHBM, persepsi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam penerapan PHBM, faktor-faktor yang menghambat dan mendorong masyarakat agar PHBM dapat meningkatkan kelestarian hutan dan lingkungan hidup serta model penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan PHBM dalam rangka mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan

Bab VI atau bab terakhir adalah kesimpulan dan saran yang disertai rekomendasi terhadap perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN TEORI.

Dalam bab ini, disajikan teori-teori tentang pengertian pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam hubungannya dengan pengelolaan hutan berkelanjutan. Disamping itu dijelaskan pula akibat degradasi hutan dengan kerusakan lingkungan yang dapat terjadi. Prinsip-prinsip dan tujuan diselenggarakannya PHBM pada hakekatnya untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan, karena dalam teori PHBM akan diwujudkan peningkatan kesejahteraan dan mutu sumberdaya hutan yang memungkinkan terciptanya kelestarian hutan dan lingkungan.

2.1 Pengertian Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 adalah suatu sistem Pengelolaan Hutan yang dilakukan bersama dengan jiwa berbagi. Yang dimaksud “bersama” disini adalah kebersamaan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa yang tinggal sekitar hutan, yang kemudian disebut masyarakat desa hutan. Adapun arti jiwa berbagi yang terkandung di dalamnya adalah kesediaan Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak lain yang berkepentingan untuk berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung sesuai kaidah-kaidah keseimbangan, keselarasan, keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

2.2 Prinsip-prinsip dan Tujuan PHBM

Menurut Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001, prinsip-prinsip dan tujuan PHBM adalah sebagai berikut:

2.2.1 Prinsip-prinsip.

- a. Perencanaan: bersifat partisipatif, yaitu dalam kegiatan PHBM perencanaan kegiatannya disusun oleh Perum Perhutani bersama masyarakat desa hutan dalam kedudukan yang setara.
- b. Pelaksanaan : PHBM dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, kebersamaan, keadilan, demokratis, pembelajaran bersama dan saling memahami, diselenggarakan dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan , prosedur yang sederhana dan pemerintah sebagai fasilitator.
- c. Hubungan Kerjasama: dilakukan antar lembaga yang berbadan hukum, yaitu antara masyarakat desa hutan yang berakte notaris yang kemudian disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan Perum Perhutani.

2.2.2 Tujuan.

Tujuan PHBM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, mutu sumberdaya hutan dan produktifitasnya serta menciptakan lapangan kerja, kemampuan berusaha dan pendapatan masyarakat yang nantinya diharapkan bermuara pada kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup.

2.3 Pengelolaan hutan berkelanjutan

Konsep kelestarian hutan pada waktu ilmu kehutanan berkembang pada abad ke 18 bermula dari konsep kelestarian hasil hutan (*sustained yield forestry*) yang diperkenalkan oleh Carlowitz pada tahun 1713 (Simon, 1993) .

Pada mulanya suatu hutan dianggap dikelola secara berkelanjutan (lestari) bila tebangan tahunan atau periodik tidak mengurangi kapasitas hasil dan bila penebangan telah dilakukan di seluruh kawasan hutan, potensi tegakan di lapangan tidak berkurang dibanding dengan dengan sebelum dilakukan penebangan.

Konsep ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Iskandar (1999) yang menyatakan bahwa semula manajemen hutan terpusat pada kelestarian hasil (*sustained yield*), dimana seluruh aktivitas kehutanan difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya. Menurut Hartig dalam Simon (1993) pada tahun 1795 menerangkan bahwa kelestarian hutan tercipta bila kayu yang boleh ditebang dari hutan tidak boleh melebihi ketentuan pengelolaan yang baik dengan hasil yang permanen.

Konsep klasik mengenai kelestarian hutan tentang perolehan hasil hutan yang setara setiap tahunnya secara berangsur-angsur ditinggalkan. Wiebecke dan Peters pada tahun 1984 dalam Simon (1993) definisi kelestarian hutan adalah *"The endeavour to facilitate the continuous and optimal provision of all tangible and intangible effects of the forest for the benefit of human being of present and future generations"*

Dengan demikian konsep kelestarian hutan sekarang pada umumnya mempunyai lingkup yang lebih luas daripada sekedar kelestarian hasil, yaitu berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Sejalan dengan definisi tersebut, Iskandar (1999) mengatakan bahwa *sustainable forest management* atau pengelolaan hutan berkelanjutan yang semula difokuskan untuk menghasilkan kayu dan produk hasil hutan lainnya, kini secara nyata juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, meningkatkan mutu lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan dan merehabilitasi lingkungan yang rusak baik karena internal kehutanan maupun factor eksternal. Konsep pengelolaan hutan berkelanjutan ini paralel dengan definisi pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Brundtland (1998) yaitu

pembangunan yang dapat mencukupi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri.

Pengelolaan hutan berkelanjutan untuk hutan tanaman, sebagaimana pada hutan pangkuan Desa Jegong, berdasar standar Lembaga Ekolabeling Indonesia (LEI) dalam Standar LEI 5000-2 mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Kelestarian fungsi produksi:
 - a. Kelestarian sumberdaya.
 - b. Kelestarian hutan.
 - c. Kelestarian usaha.
2. Kelestarian fungsi ekologi/ Lingkungan:
 - a. Kelestarian kualitas.
 - b. Kelestarian keanekaragaman hayati.
3. Kelestarian fungsi sosial dan budaya:
 - a. Kelestarian akses dan kontrol komuniti.
 - b. Kelestarian integrasi sosial dan budaya.
 - c. Kelestarian hubungan tenaga kerja.

Kriteria-kriteria tersebut diatas dibagi lagi atas 65 indikator. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada usaha untuk memenuhi beberapa indikator saja yaitu hal-hal yang berhubungan dengan: gangguan hutan, terbentuknya kemitraan usaha dengan masyarakat setempat, keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sistem pemanfaatan lahan, keberadaan sumberdaya hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, kepastian akses pemanfaatan hutan oleh warga komuniti, peluang kerja terbuka bagi seluruh warga komuniti, serta peningkatan pendidikan dan keterampilan.

Meskipun hanya terbatas pada beberapa indikator saja, namun menurut penulis indikator tersebut merupakan indikator kunci dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

2.3.1 Degradasi hutan dan pengaruhnya terhadap lingkungan

Telah diketahui secara umum, bahwa hutan mempunyai peranan penting dalam menjaga lingkungan hidup. Penjarahan hutan di Jawa Tengah telah meninggalkan tanah kosong terbuka puluhan ribu hektar sehingga dapat mengubah ekosistem mikro. Secara perlahan-lahan hutan berkurang kemampuannya untuk berfungsi sebagai penjaga lingkungan.

Salah satu akibat dari perubahan yang penting akibat merosotnya kualitas sumberdaya hutan adalah yang berkaitan dengan tata air, yaitu timbulnya banjir di musim hujan dan terjadinya kekeringan di musim kemarau. Banjir dan kekeringan hanyalah salah satu indikator yang mencerminkan kerusakan ekosistem. Indikator lainnya antara lain perubahan suhu udara, ketidak teraturan hujan dan lain sebagainya.

Apabila kerusakan hutan dibiarkan terus, maka kerusakan ekosistem di Pulau Jawa terus akan berlanjut. Aspek yang penting di sini adalah membangun kembali ekosistem hutan dengan sistem yang tepat, karena hutan merupakan salah satu penjaga ekosistem.

Perkembangan penduduk di Jawa yang sangat cepat, menyebabkan tingkat kepadatan yang tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi di Jawa telah dikenal luas sebagai masalah sentral dalam studi sosial-ekonomi masyarakat (Simon,1993). Penduduk yang sangat padat di Jawa dan kualitas sumberdaya manusia yang rendah terutama pada masyarakat desa hutan erat kaitannya dengan terjadinya kemiskinan . Kemiskinan ini bersifat absolut, yang menurut Soerjani, et al (1987) terlihat apabila tingkat hidup seseorang tidak memungkinkannya untuk memenuhi keperluan kebutuhannya yang sangat mendasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Dari semua keperluan pokok tersebut, yang paling pokok adalah pangan.

Menurut Bachtiar (2001), berbagai masalah yang timbul secara beruntun dalam pengelolaan hutan di Jawa yang mengakibatkan degradasi

hutan disebabkan oleh perkembangan kondisi sosial-ekonomi, sistem pengelolaan, dan personal Perum Perhutani.

Masalah sosial menurut Bachtar (2001) timbul karena selama ini masyarakat sekitar hutan hanya dapat melihat betapa hutan di sekitar desanya yang kaya raya selalu ditambang orang lain, tanpa pernah mereka menikmatinya. Masyarakat juga melihat banyak aparat Perum Perhutani yang hidup lebih dari sekadar berkecukupan, sementara mereka yang berada dekat dengan sumber kekayaan alam selalu terbelit kemiskinan. Masyarakat yang tidak terlibat penjarahan, karena merasa hutan bukanlah miliknya, tidak bersedia melakukan tindakan apapun untuk mencegah kegiatan ilegal tersebut.

Masalah ekonomi adalah bentuk kemiskinan yang hampir selalu menghinggapi masyarakat desa hutan. Menurut Hadi (2002) pembangunan berkelanjutan nampak masih jauh dari pencapaian yang salah satunya ditandai dengan makin banyaknya penduduk miskin yaitu yang berpendapatan kurang dari US \$ 1 perhari. Di Indonesia bisa dicatat deplesi sumberdaya alam berupa kerusakan hutan yang mencapai 1,6 juta ha per tahun. Sebesar 70 % sungai-sungai di Indonesia dalam keadaan tercemar. Bencana lingkungan berupa banjir karena penyalahgunaan tata ruang dan kebakaran hutan karena pengelolaan hutan yang tidak terpadu menjadi daftar indikasi akan belum berhasilnya pembangunan lingkungan sebagai pilar dari pembangunan berkelanjutan.

Masalah pengelolaan hutan menurut Simon (1993) terjadi karena sistem pengelolaan yang dipakai adalah sistem yang dirumuskan sejak akhir abad 19 ketika kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum mempunyai pengaruh negatif yang nyata terhadap hutan. Perubahan keadaan sosial-ekonomi menyebabkan penerapan sistem pengelolaan hutan tersebut pada saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan fungsi hutan.

Masalah personal Perum Perhutani menurut Bachtiar (2001) adalah perilaku feodal yang diwarisi oleh mereka dari kolonial Belanda. Aparat Perum Perhutani sering kali bertindak sangat represif terhadap masyarakat. Perlakuan ini banyak menimbulkan konflik yang terus menajam.

Maraknya penjarahan hutan membuat kondisi hutan di Jawa menjadi sangat memprihatinkan. Kerusakan hutan yang parah tersebut menjadi salah satu sebab dari berbagai musibah yang menimpa masyarakat luas. Bencana kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan telah acapkali terdengar dan tertulis di berbagai mass media. Lapisan tanah telah banyak hilang tererosi arus air, yang pada gilirannya akan menambah kesengsaraan para petani pada generasi mendatang. Kondisi air sungaipun sudah tidak bersih dan jernih lagi.

Dari sisi keanekaragaman hayati juga terjadi kemerosotan. Berbagai binatang yang pernah menjadi ciri khas Jawa seperti Harimau, burung Elang Jawa, yang konon menjadi lambang negara kita sudah semakin langka. Jika keadaan ini dibiarkan, sangat mungkin dalam beberapa tahun lagi fauna tersebut tinggal kenangan (Bachtiar, 2001).

2.3.2 Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

Kelestarian hutan di Jawa erat kaitannya dengan cara manusia mengelola hutan. Mengelola hutan di Jawa bukan hanya mempraktekkan teknis-teknis kehutanan saja, namun harus juga memperhatikan sosial-ekonomi serta peran serta masyarakat sekitar hutan agar tercapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Upaya Perum Perhutani untuk melibatkan masyarakat kawasan sekitar hutan dalam sistem Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berdasar Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 adalah suatu

usaha untuk menyelamatkan sumberdaya hutan dan lingkungan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Sistem Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, secara teoritis tampaknya dapat mengatasi masalah pengelolaan hutan yang digunakan selama ini.

Pelaksanaan PHBM sebagaimana keputusan tersebut di atas dilakukan dengan prinsip: keterbukaan, kebersamaan, keadilan, demokratis; pembelajaran bersama dan saling memahami; diselenggarakan dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan prosedur yang sederhana; kerjasama dilakukan antar lembaga yaitu antara Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani. Pelaksanaan PHBM berdasarkan Keputusan tersebut sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Hadi (2002), konsep pembangunan yang berkelanjutan yang dirumuskan di Stockholm awal tahun 1980-an sampai dengan KTT Rio tahun 1992 mengetengahkan perlunya pemenuhan dasar (*the fulfilment of human need*), keadilan intra dan antar generasi (*equity*), perlindungan lingkungan (*ecological integrity*), dan demokratisasi (*self determination*). Ketidakberhasilan mewujudkan pembangunan berkelanjutan, menurut Hadi (2002) karena tidak didukung oleh pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang mampu mengelola sumberdaya dan masalah-masalah publik dengan efisien dan efektif yang merupakan respon atas kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang demikian ini mendasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan tegaknya hukum.

Apabila prinsip-prinsip yang terkandung pada PHBM dapat diterapkan sepenuhnya maka akan menimbulkan persepsi positif masyarakat terhadap hutan dan lingkungannya yang pada gilirannya dapat membangkitkan partisipasi masyarakat desa hutan dalam kegiatan PHBM.

Suatu pengembangan sistem pengelolaan hutan yang baru dapat diterima dengan baik oleh masyarakat apabila pengelolaan hutan tersebut bisa menunjukkan hasil yang lebih baik dari cara pengelolaan hutan yang sedang dilakukan sekarang. Masyarakat mempunyai persepsi tertentu terhadap setiap usaha-usaha pengembangan dalam lingkungannya termasuk perubahan sistem pengelolaan hutan di desa pangkuannya. Hal ini dikarenakan perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap kehidupan mereka. Menurut Sarwono (1992) penjelasan tentang "persepsi" atau mengenai "bagaimana manusia mengerti dan menilai lingkungannya" dapat didasarkan pada dua cara pendekatan, yaitu pendekatan konvensional dan pendekatan ekologi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sarwono (1992) pendekatan konvensional menganggap persepsi sebagai kumpulan penginderaan (*sensation*), karena pada dasarnya pendekatan ini lebih menitik beratkan kepada proses syaraf dan faal. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan ekologi yang menyatakan bahwa persepsi terjadi secara spontan dan langsung. Jadi bersifat *holistik*. Spontanitas itu terjadi karena organisme selalu menjajaki (eksplorasi) lingkungannya. Dalam penjajakan itu ia melibatkan setiap obyek yang ada di lingkungannya, dan setiap obyek akan menonjolkan sifat-sifat yang khas untuk organisme yang bersangkutan. Sebagai contoh sebuah pohon yang berdaun rindang dan berbatang besar, maka sifat-sifat ini memberi makna buat manusia sebagai tempat berteduh. Sifat-sifat yang menampilkan makna ini disebut *affordances*. Persepsi dengan pendekatan ekologi yang timbul pada masyarakat desa hutan, menjadi dasar pertimbangan bagi masyarakat desa hutan tersebut menentukan untuk sejauh mana mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan PHBM di hutan pangkuan desanya.

Partisipasi dalam banyak hal dapat diartikan sesuai dengan keperluannya. Partisipasi mempunyai arti seperti pendapat Khotim (2003) yaitu keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap fase kegiatan mulai dari

perencanaan dan pengambilan keputusan, implementasi, evaluasi dan pemanfaatan, atas inisiatif sendiri, berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada pada mereka untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap sebagai hambatan dan merupakan bentuk inovatif dalam melihat peluang atas kebutuhan-kebutuhannya. Menurut Soehardjo (1983) dalam partisipasi masyarakat yang dikehendaki tidak hanya pada tahap pelaksanaan saja, akan tetapi justru pada penetapan atau perencanaan kegiatan dan pelaksanaan hasil. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, khususnya dalam penetapan atau perencanaan kegiatan, kemungkinan besar akan terjadi berbagai hambatan pada tahap berikutnya. Dengan ikut aktifnya dalam perencanaan suatu kegiatan, warga akan merasa turut bertanggung jawab terhadap konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan tersebut.

Dengan demikian secara umum partisipasi dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh warga negara dalam rangka mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. FIKB (2002) menyebutkan bahwa perwujudan dari partisipasi dapat dilakukan, baik secara individu atau berkelompok, bersifat spontan atau terorganisir, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara damai atau kekerasan. Dilihat dari sifatnya, partisipasi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu: Pertama partisipasi otonom atau mandiri, yaitu suatu bentuk partisipasi yang lahir dari kesadaran masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik. Kedua, partisipasi mobilisasi, yaitu bentuk partisipasi yang digerakan oleh orang atau kelompok tertentu, umumnya kelompok elit tertentu, bukannya berangkat dari kesadaran masyarakat.

Mengutip pendapat Sherry Arnstein pada tahun 1970, FIKB (2002) menyatakan bahwa dalam melakukan pengembangan terhadap partisipasi masyarakat perlu diadakan perbedaan antara bentuk partisipasi semu atau ritual dengan partisipasi yang memiliki kekuasaan nyata. Dalam penjelasannya, Sherry Arnstein (1970) menyatakan bahwa partisipasi

masyarakat harus masuk pada wilayah perumusan kebijakan pemerintah, tidak hanya sebatas pada tataran implementasi kebijakan. Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuasaan yang nyata untuk ikut menentukan kebijakan pemerintah, yang disebut sebagai tingkat kontrol masyarakat yaitu kekuasaan untuk mengarahkan (*the power of directing*). Oleh karena itu pemerintah harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan (*get behind the scene*).

Berkaitan dengan partisipasi semu dan partisipasi yang mempunyai kekuatan nyata, Pretty (1996) memaparkan tujuh tangga tipologi dari partisipasi sebagai berikut:

- b. Partisipasi pura-pura (*Manipulative participation*), yaitu keikutsertaan semu, dimana terdapat wakil masyarakat (yang tidak dipilih oleh masyarakatnya) dalam suatu kegiatan namun tidak mempunyai kekuasaan apa-apa terhadap kegiatan tersebut.
- c. Partisipasi pasif (*Passive participation*), yaitu melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan hanya dengan melalui pemberitahuan secara sepihak tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat.
- d. Partisipasi karena diminta (*Participation by consultation*), yaitu keikutsertaan melalui konsultasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pemrakarsa kegiatan hanya memberi gambaran dari proses dan permasalahan tanpa harus memperhatikan pandangan masyarakat, dan masyarakat tidak diberi wewenang untuk ikut dalam pengambilan keputusan.
- e. Partisipasi dengan pemberian insentif materi (*Participation by material incentive*), yaitu keikutsertaan dengan memberi kontribusi berupa barang atau jasa, namun tidak dilibatkan dalam proses kegiatan maupun proses pembelajaran, peranserta disini tidak mempunyai fondasi yang kuat dalam kegiatan.

- f. Partisipasi fungsional (*Functional participation*), yaitu masyarakat dapat berperanserta dengan membentuk kelompok untuk mengetahui keputusan awal dari sasaran kegiatan. Peranserta secara interaktif dapat dilakukan, namun keputusan akhir sudah dibuat oleh pemrakarsa kegiatan.
- g. Partisipasi interaktif (*Interactive participation*), yaitu masyarakat berperanserta dalam menganalisa permasalahan dan mengembangkan rencana tindakan, serta penguatan institusi lokal. Keikutsertaan masyarakat tidak hanya untuk mencapai tujuan kegiatan saja, tetapi juga melalui proses pembelajaran yang sistematis, seperti bagaimana menentukan penggunaan sumberdaya. Dengan demikian masing-masing pihak mempunyai kepuasan dalam memelihara hubungan baik.
- h. Mandiri (*Self mobilization*) yaitu peranserta masyarakat dengan mengambil prakarsa sendiri untuk mengubah sistem yang ada. Mereka mengembangkan hubungan dengan institusi eksternal terhadap sumberdaya yang ada dan minta nasihat teknis yang mereka inginkan, namun kontrol bagaimana menggunakan sumberdaya tetap ada pada mereka. Mobilisasi diri dapat makin berkembang bila pemerintah dan LSM memberikan dukungan bagi partisipasi tersebut.

Suatu inovasi dapat diterima oleh masyarakat apabila inovasi itu dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dari cara pengelolaan yang sedang dilakukan. Masyarakat desa mempunyai persepsi terhadap setiap usaha-usaha pengembangan dalam lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan mereka. Persepsi tersebut menjadi dasar pertimbangan masyarakat desa untuk menentukan seberapa jauh mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dengan demikian persepsi masyarakat desa hutan terhadap PHBM harus dikembangkan menjadi makin positif serta tingkat partisipasi mereka

terhadap kegiatan tersebut selama ini perlu ditingkatkan ke tangga yang lebih tinggi melalui perencanaan, yang dalam hal ini perencanaan yang tepat adalah perencanaan yang bersifat partisipatif.

Menurut Hudson pada tahun 1979 sebagaimana dikutip Hadi (2001), teori perencanaan dibagi kedalam lima katagori yang meliputi sinoptik, inkremental, transaktif dan pembelajaran sosial, advokasi dan radikal. Selanjutnya dikatakan Perencanaan Transaktif dan pembelajaran sosial adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya dikatakan oleh Burchell (1978) dalam Hadi (2001) pendekatan transaktif merupakan suatu media untuk mengeliminasi kontradiksi antara apa yang kita ketahui dengan bagaimana kita harus melakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pengetahuan (teori) dalam praktek dan teori selalu diperkaya dari pelajaran lapangan. Tujuan dari dialog ini adalah untuk mengakomodasikan aspirasi masyarakat, nilai dan perilaku, kapasitas untuk tumbuh melalui semangat kerjasama dan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman (Hadi, 2001). Perencanaan yang bersifat partisipatif ini secara historis dikembangkan di Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1960-an. Perspektif partisipatif ditujukan untuk mencapai proses yang adil dari pembangunan dengan memberdayakan masyarakat untuk turut menentukan. Perencanaan dengan metode ini akan meningkatkan rasa memiliki terhadap masalah yang di dialogkan.

Dengan teori perencanaan partisipatif ini, secara teoritis sistem Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Prinsip tersebut mengisyaratkan bahwa sifat arogansi dan tertutup yang dilakukan Perum Perhutani dalam mengelola hutannya harus telah mulai dihilangkan. Konflik yang terjadi akibat kedua hal tersebut

dalam PHBM diharapkan dapat terhapus. Masyarakat sekitar hutan dapat merasakan manfaat hutan bagi kehidupannya, bebas dari rasa ketakutan dan kecemburuan sosial. Apabila hal tersebut dapat benar-benar dicapai, maka persepsi masyarakat sekitar hutan pada hutannya dan kepada Perum Perhutani menjadi lebih positif, sehingga tumbuh rasa tanggungjawab dan rasa *melu handarbeni* terhadap kelestarian sumberdaya hutan di desa pangkuannya.

Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah model pengelolaan hutan yang secara teoritis dapat dianggap sebagai pengelolaan hutan yang menjanjikan dalam menyelesaikan masalah masalah dalam pengelolaan hutan, karena mampu menjawab permasalahan ekonomi dan sosial yang dialami oleh masyarakat desa hutan yang mempunyai dampak terhadap kelestarian lingkungan. Namun demikian pelaksanaan sistem PHBM perlu diteliti lapangan apakah dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu pengelolaan hutan berkelanjutan yang pada gilirannya dapat menjamin lestarnya sumberdaya hutan dan lingkungan hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN.

Bab ini menguraikan mengenai strategi riset yang digunakan dalam penelitian PHBM ini dan pemilihan lokasi penelitian dengan alasan-alasannya. Selain itu bab ini juga menjelaskan tentang variabel-variabel yang akan diteliti, teknik pengumpulan data dan analisisnya. Hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dapat memberi solusi terhadap masalah PHBM dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan.

3.1 Strategi riset

3.1.1 Metode penelitian

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Desa Jegong telah berjalan hampir 2 tahun, sehingga diperlukan penelitian untuk mengevaluasi mengenai pelaksanaan PHBM. Selain itu data dan fakta ini sangat diperlukan untuk penyempurnaan model perencanaan dan pelaksanaan PHBM di masa mendatang.

Masalah yang akan diteliti dalam pelaksanaan PHBM merupakan permasalahan sosial, maka digunakan Metode Penelitian Survei. Menurut Singarimbun, (1995) *penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok*. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk maksud :

1. penjajagan (eksploratif).
2. deskriptif.
3. evaluasi
4. penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory*)
5. prediksi
6. penelitian operasional

7. pengembangan indikator-indikator sosial.

Penelitian ini merupakan Penelitian evaluasi dalam pelaksanaan PHBM di Desa Jegong. Singarimbun (1995) menyatakan secara umum terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi summatif. Evaluasi formatif biasanya melihat dan meneliti pelaksanaan suatu program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut. Evaluasi summatif biasanya dilaksanakan pada akhir program untuk mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai. Sesuai dengan hal itu, maka evaluasi pelaksanaan PHBM ini adalah evaluasi formatif. Dalam evaluasi ini akan dilihat dan diteliti pelaksanaan program PHBM di Desa Jegong kemudian mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program PHBM tersebut guna mendapatkan suatu model pengelolaan hutan berkelanjutan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Data yang didapat akan digunakan pula untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel sehingga penelitian ini mempunyai kedalaman Penelitian *explanatory* (*penelitian penjelasan*). Dalam penelitian ini diungkapkan suatu pemikiran mengenai pelaksanaan PHBM dalam bentuk uraian kritis dan logis. Kritis dan logis disini dalam pengertian sesuai dengan fakta yang ada, rasional, didukung oleh pembuktian-pembuktian atau evidensi.

Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Singarimbun (1995) bahwa dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, informasi kualitatif ditambahkan pada data kuantitatif. Data yang dihimpun melalui kuesioner diperbaiki di lapangan, ditambah dengan wawancara bebas dan observasi.

3.2 Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dipilih pada satu desa di Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena kerusakan dan penjarahan hutan paling parah terjadi di Kabupaten Blora (Perum Perhutani, 2003). Jumlah pohon yang dijarah pada tiga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang ada di Kabupaten Blora (Cepu, Randublatung dan Blora) selama 5 tahun yaitu sejak tahun 1998 sampai dengan 2002 telah kehilangan pohon sebanyak 1.590.115 batang atau hampir 20 % dari jumlah kehilangan pohon di seluruh Jawa Tengah pada kurun waktu yang sama.

Penelitian mengambil lokasi di Desa Jegong, Kecamatan Jati karena desa ini merupakan desa model uji coba pelaksanaan PHBM pertama kali di Jawa Tengah. Luas desa sebesar 2.583,194 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2.417 orang. Penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.183 orang dan wanita sebanyak 1.234 orang. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani (90,43 %).

Luas hutan pangkuan desa pada Desa Jegong menurut Perjanjian kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Jegong dengan Perhutani KPH Randublatung sebesar 1.212,10 ha yang keseluruhannya merupakan Hutan Produksi dengan kelas perusahaan jati. Perjanjian kerja sama pengelolaan hutan di desa tersebut telah ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2002 antara Perum Perhutani dengan Lembaga Masyarakat Desa "Wana Lestari" yang seluruh anggotanya berasal dari penduduk Desa Jegong. Meskipun pelaksanaannya tergolong relatif baru (dua tahun) namun telah dimungkinkan banyak data dan fakta yang diperoleh dalam kajian ini. Data dan fakta ini sangat diperlukan untuk masukan dalam penyempurnaan sistem PHBM dalam rangka mengatasi degradasi hutan, yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan memerlukan kecepatan dalam penanganannya.

3.3 Variabel penelitian.

Variabel menurut Sigit (1991), ialah suatu karakteristik, ciri, sifat, watak, milik atau keberadaan yang melekat pada beberapa subyek, orang atau barang, yang dapat berbeda beda intensitasnya, banyaknya atau katagorinya. Variabel-variabel yang relevan dengan obyek penelitian ini adalah:

- a. Perencanaan PHBM di Desa Jegong.
- b. Pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Jegong.
- c. Evaluasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan PHBM di Desa Jegong.

Variabel-variabel diatas akan dapat menggambarkan pelaksanaan PHBM di Desa Jegong, persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap PHBM, yang kemudian digunakan untuk mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendorong PHBM dalam pelestarian hutan serta untuk menemukan model perencanaan dan pelaksanaan yang tepat bagi pelaksanaan PHBM dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

3.4 Teknik Pengumpulan Data .

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner atau wawancara untuk mendapat tanggapan dari responden yang disampel. Instrumen kuesioner atau angket menurut Kartono (1996) ialah penyelidikan mengenai suatu masalah yang banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak), dengan jalan mengedarkan formulir daftar pertanyaan, diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan jawaban (tanggapan, respons) tertulis seperlunya. Kegunaan kuesioner sebagai alat untuk memperoleh data yang cukup luas dari kelompok orang atau anggota masyarakat yang berpopulasi besar, beraneka ragam, dan betebaran tempat kediamannya. Kecuali sebagai alat untuk memperoleh data kuantitatif yang obyektif, kuesioner juga

juga dipakai untuk memperoleh informasi-informasi yang kualitatif. Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih, duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Kegunaan wawancara untuk mengetahui isi kejiwaan, antara lain berupa tanggapan pribadi, pendapat atau opini, keyakinan, macam-macam perasaan, motivasi-motivasi dan beraneka ragam bentuk mekanisme pertahanan diri serta pengecekan dan verifikasi data yang diperoleh dari kusioner maupun data sekunder.

Selanjutnya dikemukakan oleh Kountur (2003) bahwa cara pengumpulan data melalui teknik ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. informasi diperoleh dari sekumpulan orang
- b. informasi yang diperoleh dari sekumpulan orang tersebut merupakan sampel
- c. informasi diperoleh melalui bertanya dengan beberapa pertanyaan.

Sedangkan ciri-ciri teknik kuesioner dan wawancara menurut Singgih (2001) adalah:

- a. Ada sampel dan populasi.
- b. Mencari tanggapan langsung dari responden.
- c. Relatif banyak respondennya.
- d. Dalam situasi yang alami.

Dengan demikian untuk memperoleh data kegiatan PHBM di Desa Jegong sangat tepat dengan menggunakan teknik ini.

Responden sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jegong laki-laki maupun wanita. Adapun besaran sampel yang diambil, menurut Sigit (2001) ukuran (*size*) sampel yang dapat diterima tergantung pada jenis penelitian. Ukuran minimum untuk penelitian deskriptif adalah 10 % dari populasi. Berdasar pendapat itu, maka dengan jumlah populasi penduduk Desa Jegong sebanyak 2.417 orang, sampel yang diambil adalah sebanyak 250 orang. Teknik pengambilan sampel

menggunakan cara Pengambilan sampel wilayah (*Area Sampling*) secara *proporsional*. Cara ini biasa diterapkan pada daerah geografi yang terdiri atas beberapa *sub-area* (Sigit, 2001). Sebagai populasi sasaran adalah masyarakat pada *area* Desa Jegong dengan *sub-area* adalah dusun-dusun yang ada di Desa Jegong. Besarnya sampel tiap dusun diambil secara proporsional sesuai besarnya proporsi populasi penduduk di dusun yang bersangkutan.

Berdasarkan angka statistik Desa Jegong penyebaran penduduk pada empat dusun di Desa Jegong adalah: Dusun Besi (34%), Dusun Jegong (24%), Dusun Kemadoh (25%) dan Dusun Bumirejo (17%). Dengan demikian besarnya sampel pada Desa Besi sebanyak 85 responden, Desa Jegong sebanyak 60 responden, Desa Kemadoh sebanyak 63 responden dan Desa Bumirejo sebanyak 42 responden. Pemilihan responden pada tiap-tiap dusun dilakukan secara acak.

Penyebaran kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti dengan dibantu petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah yang telah dilatih untuk keperluan tersebut. Dengan demikian peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan PHBM yang dilakukan oleh masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan apa yang terjadi dengan sesungguhnya di lapangan. Pertanyaan dalam kuesioner sebanyak 58 pertanyaan dalam bentuk pertanyaan tertutup, pertanyaan tertutup dengan disertai jawaban singkat serta pertanyaan terbuka. Pertanyaan ditujukan untuk mengetahui besarnya variabel-variabel penelitian yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan PHBM. Variabel tersebut di atas dikembangkan dalam bentuk kuesioner dan wawancara. Variabel-variabel yang tidak dapat muncul atau tidak terjawab dengan memuaskan, diverifikasi dengan wawancara.

Selain wawancara dengan penduduk dan tokoh masyarakat Desa Jegong, juga dilakukan wawancara terbuka dengan tokoh-tokoh kunci yang berkaitan dengan pelaksanaan PHBM di Desa Jegong, yaitu:

- a. Petugas Perum Perhutani baik di Kesatuan Pemangkuan Hutan Randublatung maupun di Unit I Semarang..
- b. Camat Jati dan Kepala Desa Jegong.
- c. Petugas Kehutanan baik di Propinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Blora.

Selain kuesioner dan wawancara, peneliti juga melakukan observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengamati fenomena tertentu, misalnya keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses, benda ataupun penampilan tingkah laku seseorang dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Selain itu juga dikumpulkan data sekunder yaitu deskripsi mengenai Desa Jegong yang telah dibuat dan ditata oleh instansi, dalam hal ini data tersebut berada di Kabupaten Blora, di Kecamatan Jati, dan di Desa Jegong. Sedangkan data pengelolaan hutan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PHBM didapat di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randu Blatung, dan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pucung, Banyu Urip dan Kemadoh. Bila data tersedia, akan diambil pula data sekunder dari Dusun dan Resot Polisi Hutan (RPH) sebagai satuan manajemen terkecil.

3.5 Pengolahan dan Analisis data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis. Data yang bersifat angka, yaitu yang diperoleh dari Pemerintah Daerah dan Perum Perhutani dianalisis, dalam bentuk tabulasi. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner diadakan kodefikasi berdasar pedoman tertentu. Apabila ternyata ada data yang tidak sempurna pengisiannya, maka data tersebut

disempurnakan kembali pada nara sumbernya atau disisihkan karena dinilai tidak sempurna dan tidak dapat dimasukan dalam proses pengolahan data lebih lanjut. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian dengan format Penelitian deskriptif, menggunakan pengolahan statistik yang bersifat deskriptif (statistik deskriptif) sebagaimana dianjurkan oleh Faisal (1989). Selanjutnya pengolahan data menggunakan program pengolahan data statistik SPSS

Untuk data yang bersifat kualitatif, digunakan analisis kualitatif. Menurut Faisal (1989) analisis kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, diskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya. Data ini seringkali dilukiskan dalam bentuk kata kata dari pada angka angka.

3.6 Penyusunan laporan hasil penelitian

Laporan hasil penelitian ini berupa Tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu bagian dari proses ilmu, maka laporan hasil penelitian juga merupakan hal yang sangat penting, karena baik tidaknya suatu kegiatan penelitian tercermin dalam laporan penelitian. Laporan hasil penelitian ini juga harus dapat menjadi salah satu solusi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan sekaligus dapat melestarikan lingkungan.

BAB IV.

KONDISI DESA JEGONG DAN HUTAN PANGKUANNYA

Pada bab ini diuraikan mengenai deskripsi desa penelitian yaitu Desa Jegong yang berada di Kabupaten Blora. Deskripsi mencakup letak geografis, penggunaan lahan, iklim, jenis tanah dan topografi desa. Untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi Desa Jegong, bab ini juga menguraikan mengenai kependudukan, mata pencaharian, tingkat penghasilan dan tingkat pendidikan. Oleh karena PHBM menyangkut keberadaan hutan pangkuan desa, pada bab ini juga disajikan keadaan hutan pangkuan yang dimiliki Desa Jegong.

4.1 Deskripsi Desa Jegong.

4.1.1 Letak Geografis.

Desa Jegong seluas 2.583,194 Ha secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Batas-batas administratif Desa Jegong adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Doplang dan Desa Jati
- Sebelah Timur: Desa Pelem dan Desa Kepoh
- Sebelah Barat: Desa Singget dan Desa Bangleyan.
- Sebelah Selatan: Desa Bangleyan dan Desa Gempol.

Secara astronomis terletak antara 7°19' – 7°25' Lintang Selatan dan 111°26' - 111°31' Bujur Timur. Desa Jegong berada kurang lebih 4 km dari kantor Kecamatan Jati, yang jarak dari ibu kota Kabupaten Blora sekitar 46 Km.

Desa Jegong terbagi dalam 4 dukuh, yaitu Dukuh Kemadoh, Dukuh Jegong, Dukuh Besi dan Dukuh Bumirejo. Keempat pedukuhan ini berada pada satu lokasi yang bersambungan satu sama lain, namun dari Dukuh Jegong atau

Kemadoh kalau mau Dukuh Besi dan Bumirejo harus melalui Desa lain yaitu Desa Jati sepanjang \pm 2 Km. Hal ini memberi kesan seakan-akan Dukuh Kemadoh dan Jegong terpisah dari Dukuh Besi dan Bumirejo (**Gambar 3**). Kondisi sebagian jalan yang menghubungkannya juga kurang baik terlebih di musim penghujan.

4.1.2 Penggunaan lahan.

Penggunaan lahan yang paling dominan adalah untuk kawasan hutan, dengan rinciannya:

- a). Lahan sawah : 115,276 Ha
- b). Tegalan tanah kering : 148,020 Ha
- d). Bangunan dan Pekarangan : 92,883 Ha
- e). Lain-lain (kuburan, jalan dll) : 5,071 Ha
- f). Hutan Negara : 2.221,944 Ha

(Statistik Kecamatan Jati, 2003)

Berdasar data di atas, sebagian besar lahan di Desa Jegong (86,02 %) berupa kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Sisanya seluas 13,98 % berupa sawah, tegalan tanah kering, bangunan dan pekarangan serta penggunaan lain misalnya kuburan. Sawah di Desa Jegong merupakan sawah tadah hujan yang panen 1-2 kali setahun. Tegalan tanah kering dan pekarangan pada umumnya ditanami palawija, pohon perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan. Sebagai penghasilan tambahan, penduduk Desa Jegong juga mengusahakan ternak. Statistik Kecamatan Jati tahun 2003 mencatat di Desa Jegong terdapat ternak besar (Sapi potong dan kerbau) sebanyak 702 ekor, ternak kecil (kambing dan domba) sebanyak 540 ekor dan unggas (ayam kampung dan itik) sebanyak 3.472 ekor. (Statistik Kecamatan Jati, 2003)

4.1.3 Iklim, tanah dan topografi.

4.1.3.1 Iklim

Desa Jegong mempunyai iklim tropis dengan musim penghujan silih berganti. Desa Jegong mempunyai Curah hujan tahunan rata-rata: 1.367 mm/th dengan banyak hari hujan rata-rata: 113 hari/tahun. Jumlah bulan-bulan basah rata-rata pertahun sebanyak 8 bulan dan bulan kering sebanyak 4 bulan (Statistik Kecamatan Jati, 2003). Dengan demikian iklim di Desa Jegong menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk dalam tipe iklim C. Suhu udara di Desa Jegong rata-rata sebesar 29° C.

(Statistik Kecamatan Jati, 2003)

4.1.3.2 Kondisi tanah

Jenis tanah di Desa Jegong adalah tanah Grumusol, Litosol dan Regosol. Jenis-jenis tanah tersebut mempunyai sifat yang kurang baik, yaitu peka terhadap erosi, solum tanah tipis, mempunyai permeabilitas rendah dan pada musim kemarau tanah meretakan. Tekstur tanah kasar dengan struktur tanah Lempung berdebu yang mempunyai PH tanah rata-rata: 6,8. Produktivitas tanah rendah karena kesuburannya berkisar antara rendah sampai sedang.

(Statistik Kecamatan Jati, 2003)

4.1.3.3 Topografi:

Ketinggian lokasi rata-rata 76 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan tanah sebagai berikut:

- a). Kemiringan 0° – 8° seluas \pm 60 % dari luas desa
- b). Kemiringan > 8° – 15° seluas \pm 20 % dari luas desa
- c). Kemiringan > 15° – 25° seluas \pm 15 % dari luas desa
- d). Kemiringan > 25° – 45° seluas \pm 5 % dari luas desa

(Statistik Kecamatan Jati, 2003)

Di Desa Jegong tidak ada tanah yang kemiringannya lebih dari 45°. Berdasar data tersebut di atas, maka topograffi di Desa Jegong dapat dikatakan relatif datar. Tanah yang bertopografi lebih dari 15 % pada umumnya berupa tanah hutan.

4.1.4 Kependudukan dan sosial-ekonomi.

4.1.4.1 Jumlah Penduduk.

Jumlah Penduduk Desa Jegong pada tahun 2003 berdasar data dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (2003) sebanyak 2.417 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 1.183 jiwa dan perempuan sebanyak 1.234 jiwa dengan sex ratio sebesar 95,87. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 633 KK, yang berarti rata-rata tiap Kepala Keluarga mempunyai 3,82 anggota keluarga. Struktur kependudukan berdasar kelompok umur pada tahun 2003 dapat dilihat pada **Tabel 2** di bawah ini:

Tabel: 2. Struktur penduduk Desa Jegong berdasar kelompok umur pada tahun 2003.

No.	Kelompok umur (orang)	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	0 – 4	86	84	170
2	5 – 9	92	131	223
3	10 – 14	110	110	220
4	15 – 19	121	103	224
5	20 – 24	131	137	268
6	25 – 29	96	107	203
7	30 – 34	87	108	195
8	35 – 39	97	108	205
9	40 – 44	74	76	150
10	45 – 49	66	72	138
11	50 – 54	65	60	125
12	55 – 59	50	44	94
13	60 – 64	37	39	76
14	65 – 69	38	31	69
15	> 70	33	24	57
Jumlah		1.183	1.234	2.417

Sumber: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2003.

Apabila dibanding dengan luas lahan Desa Jegong, kepadatan penduduk rata-rata sebesar 93,6 jiwa/km². Namun apabila dilihat kepadatan agrarisnya yaitu jumlah penduduk dibanding dengan luas lahan sawah, tegalan dan pekarangan didapat angka sebesar 678,6 jiwa/Km². Jumlah ini menunjukkan bahwa Desa Jegong termasuk desa yang padat. Rata-rata

kepemilikan tanah garapan penduduk (sawah, tegalan tanah kering, bangunan dan pekarangan serta penggunaan lain) sebesar 0,57 Ha per KK.

Data statistik diatas bersesuaian dengan hasil penelitian terhadap kepemilikan tanah di Desa Jegong sebagaimana **Tabel 3** dibawah ini.

Tabel: 3. Luas kepemilikan lahan responden.

No	Luas kepemilikan	Tanah sawah	%	Tanah tegalan	%	Tanah pekarangan	%
1	Tidak memiliki	77	30,8	141	56,4	81	32,4
2	Kurang dari 0,25 Ha	131	52,4	91	36,4	159	63,6
3	Antara 0,25 – 0,50 Ha	39	15,6	18	7,2	10	4,0
4	Lebih dari 0,50 – 0,8 Ha	3	1,2	0	0	0	0
5	Lebih dari 0,80 Ha	0	0	0	0	0	0
Jumlah		250	100,0	250	100,0	250	100,0

Sumber: Data primer.

Tampak bahwa hampir seluruh penduduk Desa Jegong tidak memiliki lahan untuk bertani yang lebih luas dari 0,80 Ha. Dengan kepemilikan tanah sesempit itu maka petani di Desa Jegong dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan subsistennya.

Penduduk desa Jegong pada umumnya memiliki rumah sendiri yang didiami secara turun temurun. Hal ini ditunjukkan oleh data kepemilikan rumah sebagaimana **Tabel 4** berikut ini.

Tabel 4. Kepemilikan rumah responden.

No	Kepemilikan rumah	Jumlah responden	%
1	Milik sendiri	224	89,6
2	Sewa/ kontrak	3	1,2
3	Menumpang	23	19,2
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Sebanyak 89,6% responden menyatakan memiliki rumah sendiri dan sebanyak 19,2% menumpang di rumah orang lain. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap penduduk Desa Jegong kebanyakan warga yang menumpang merupakan anak atau menantu yang belum memiliki rumah sendiri.

Untuk mengetahui sejak kapan mereka tinggal di Desa Jegong, dapat dilihat pada **Tabel 5** di bawah ini.

Tabel 5. Lama waktu responden tinggal di Desa Jegong.

No	Lama tinggal	Jumlah responden	%
1	> 6 tahun	214	85,6
2	> 3 tahun – 6 tahun	19	7,6
3	> 1 tahun – 3 tahun	15	16,0
4	< 1 tahun	2	0,8
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Sebagian besar responden (85,6%) menyatakan mereka tinggal di Desa Jegong lebih dari 6 tahun dan hanya 0,8% saja yang baru saja tinggal di Desa Jegong, atau kurang dari 1 tahun. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Jegong adalah warga asli desa tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan mereka sangat mengenal keadaan desa dan hutan sekitarnya.

Untuk mengetahui kedekatan tempat tinggal responden dengan kawasan hutan, **Tabel 6** di bawah ini dapat memberi gambaran jarak lokasi tempat tinggal responden dari hutan yang terdekat.

Tabel 6. Jarak tempat tinggal responden dengan kawasan hutan.

No	Jarak tempat tinggal ke hutan	Jumlah responden	%
1	< 0,5 km	91	36,4
2	> 0,5 km – 1 km	114	45,6
3	> 1 km – 1,5 km	26	10,4
4	> 1,5 km – 2 km	10	4,0
5	> 2km	9	3,6
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer.

Jarak tempat tinggal sebagian besar (82,0%=penjumlahan no. 1 dan 2) responden sampai ke hutan sejauh kurang dari 0,5 km sampai 1 km, menunjukkan mereka benar-benar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

4.1.4.2 Sosial - ekonomi

4.1.4.2.1 Mata Pencaharian.

Apabila struktur penduduk di atas usia 15 tahun dianggap sebagai angkatan kerja, maka distribusi penduduk menurut mata pencaharian di Desa Jegong dapat dilihat sebagaimana **Tabel 7** berikut:

Tabel: 7. Jumlah penduduk Desa Jegong usia 15 tahun ke atas berdasar Mata Pencaharian tahun 2003.

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah penduduk (jiwa)	%
1	Tidak/ belum bekerja	69	3,63
2	Petani	1.721	90,43
3	Pedagang	7	0,37
4	Pegawai Negeri Sipil	44	2,31
5	TNI/ Polisi	2	0,10
7	Pensiunan PNS	5	0,26
8	Buruh	55	2,90
Jumlah		1.903	100,00

Sumber: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Blora tahun 2003

Berdasarkan hasil penelitian, nampaknya keadaan mata pencaharian Penduduk Desa Jegong yang digambarkan oleh data statistik tersebut di atas sesuai dengan mata pencaharian responden hasil penelitian yang dapat dilihat pada **Tabel 8** berikut.

Tabel: 8. Jenis pekerjaan responden .

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah responden	%
1	Tidak/belum mempunyai pekerjaan	12	4,8
2	Petani pemilik lahan	142	56,8
3	Buruh tani	54	21,6
4	Pesanggem (petani yang mengerjakan lahan hutan)	18	7,2
5	Pedagang/Wiraswasta	10	4,0
6	PNS/BUMN/Perangkat desa	6	2,4
6	Tukang (kayu/batu)	3	1,2
7	Lainnya	5	2,0
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Data di atas mengungkapkan bahwa sebanyak 85,6 % penduduk Desa Jegong menggantungkan kehidupannya dari pertanian.

Tingkat penghasilan yang dapat dibawa pulang penduduk di Desa Jegong relatif kecil ditunjukkan oleh rendahnya jumlah penghasilan perbulannya. Apabila dibandingkan dengan Upah Minimal Regional (UMR) Kabupaten Blora tahun 2003 yang sebesar Rp. 346.900,- per bulan, ternyata sekitar 80 % penduduk Desa Jegong mempunyai penghasilan di bawah UMR. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 250 responden, didapat hasil sebagaimana tertuang dalam **Tabel 9** berikut.

Tabel: 9. Tingkat penghasilan responden.

No.	Besarnya penghasilan per bulan	%
1	Dibawah Rp. 250.000,-	79,6
2	Antara Rp. 250.000,- - Rp. 500.000,-	13,2
3	Di atas Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-	5,2
4	Antara Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000,-	2,0
5	Di atas Rp. 2.000.000,-	0

Sumber: Data primer, 2004

4.1.4.2.2 Hasil pertanian.

Kegiatan pertanian dan produksi pertanian sangat bergantung pada kondisi fisik dan musim. Gambaran hasil pertanian rata-rata di desa Jegong, berdasarkan statistik Kecamatan Jati tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Padi : 4,0 ton/ha.

Jagung : 1,5 ton/ha.

Kedelai : 1,1 ton/ha.

Kacang tanah : 1,1 ton/ha.

Ubi kayu : 16 ton/ha.

Hasil pertanian tersebut di atas bila dibanding dengan rata-rata produktifitas hasil pertanian di Kabupaten Blora, kecuali kacang tanah termasuk rendah, karena menurut Laporan Kabupaten Blora dalam angka tahun 2002, produksi rata-rata Padi sebesar 5,5 ton/Ha; Jagung sebesar 3, 5 ton/Ha; Kedelai sebesar 1,5 ton/Ha; Kacang tanah sebesar 1,0 ton/Ha dan ubi kayu sebesar 20 ton/Ha.

4.1.4.2.3 Tingkat pendidikan dan agama.

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Jegong dapat dikatakan rendah, karena sebagian besar (80,48 %) hanya berpendidikan Sekolah Dasar tamat maupun tidak tamat, serta tidak mengenyam berpendidikan. Keadaan pendidikan penduduk Desa Jegong dapat dilihat dalam **Tabel 10** di bawah ini:

Tabel 10. Tingkat pendidikan penduduk Desa Jegong tahun 2003.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah penduduk (orang)	%
1	Belum/ Tidak sekolah	1.140	47,17
2	Sekolah Dasar	805	33,31
3	SLTP	338	13,98
4	SLTA	109	4,51
5	Akademi/ PT	25	1,03
Jumlah		2.417	100,0

Sumber: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2003

Dari penduduk yang bersekolah tersebut, pada tahun 2003 penduduk yang menamatkan pendidikan pada sekolah tiap tingkatannya sebanyak 1.093 Orang (45,22 %). Penduduk yang tidak menamatkan sekolahnya sebanyak 783 orang (32,39 %), yang masih bersekolah sebanyak 295 orang (12,21 %), dan sisanya sebanyak 246 (10,18 %) orang belum/ tidak bersekolah. Data statistik tersebut selaras dengan hasil penelitian, sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 11** sebagai berikut:

Tabel 11: Tingkat pendidikan responden penduduk Desa Jegong.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah responden	%
1	Tidak sekolah	35	14,0
2	SD (tamat/belum/tidak)	138	55,2
3	SLTP (tamat/belum/tidak)	48	19,2
4	SLTA (tamat/belum/tidak)	22	8,8
5	Perguruan Tinggi (tamat/belum/tidak)	7	2,8
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden penduduk di Desa Jegong sebagian besar (69,2 %) Sekolah Dasar kebawah.

Berdasarkan catatan yang ada pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (2003), seluruh penduduk Desa Jegong memeluk Agama Islam. Namun dari hasil penelitian, ternyata terdapat dua responden beragama Kristen.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, maka ciri-ciri kemiskinan tampak jelas pada Desa Jegong. Menurut Prayitno (1986) ciri-ciri kemiskinan ialah:

- a. Pendapatan rumah tangga petani rendah. Petani tersebut disebut miskin apabila tingkat pendapatan per kapita per tahun kurang dari 320 kilogram setara beras untuk daerah perdesaan.
- b. Luas tanah garapan sempit. Untuk Jawa, luas garapan tersebut kurang atau sama dengan 0,25 hektar tanah sawah, sedangkan tanah kering seluas 0,50 hektar.
- c. Produktivitas tenaga kerja rendah.

- d. Modal (kapital) relatif kecil atau tidak ada. Karena pendapatan rendah, simpanan/tabungan yang dimiliki sangat kecil atau relatif tidak ada, akibatnya kesempatan untuk memperluas usahanya menjadi sangat terbatas.
- e. Tingkat keterampilan (skill) rendah, akibatnya jiwa kewirausahaan dan kemampuan manajerialnya juga rendah.
- f. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah.

Kemiskinan pada Desa Jegong dapat menimbulkan kerawanan terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. Kemungkinan akan mengeksploitasi sumberdaya alam melampaui daya dukungnya sangat besar, demikian pula kemungkinan untuk dapat terbujuk untuk merusak (menjarah) hutan di sekitar desanya. Dengan demikian perlu dipikirkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Secara pasti dapat dikatakan bahwa kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di Desa Jegong sebagian besar menekankan pada pentingnya peningkatan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan bagi pengembangan diri penduduk Desa Jegong. Dengan kesejahteraan yang memadai maka berbagai kebutuhan dapat tercukupi, baik kebutuhan pangan, sandang maupun perumahannya.

4.2 Deskripsi Hutan Pangkuan Desa Jegong.

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Perhutani (Persero) KPH Randublatung dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora tanggal 28 Mei 2002 NO. 255, kawasan Hutan Negara yang menjadi pangkuan Desa Jegong dan dikelola bersama dengan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah seluas 1.212,1 ha. Secara administratif kawasan hutan tersebut berada di bawah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung yang terbagi dalam 3 Bagian

Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), yaitu BKPH Kemadoh, BKPH Pucung, dan BKPH Banyuurip.

Letak dan bentuk Hutan Pangkuan Desa Jegong dapat dilihat pada **Gambar: 4.**

Kawasan hutan pangkuan Desa Jegong secara keseluruhan berada pada 67 petak/anak petak. Adapun keadaan hutan sewaktu awal pengelolaan bersama dimulai (awal 2002) berdasar keberadaannya dalam kelas umur, petak/ anak petak, dan luasannya dapat dilihat pada **Tabel 12** sebagai berikut:

Tabel 12. Kelas umur, anak petak dan luas hutan pangkuan Desa Jegong.

No.	Kelas Umur (tahun)	Petak/ anak petak.	Luas (Ha)	%
1	Tanah Kosong	1a; 3a; 4a; 5a; 5c; 6a; 6e.	55,3	4,6
2	1 – 10	15b; 18e; 52a; 82a; 42a; 42d; 43c; 86a; 87a.	147,8	12,2
3	11 – 20	1c; 1d; 2b; 2c; 15a; 17a; 18b; 46b; 47b.	187,4	15,5
4	21 – 30	89b	4,9	0,4
5	31 – 40	18d; 43a; 45a; 46a; 48b; 88b; 89a; 89c; 90a.	146,9	12,1
6	41 – 50	16; 17b; 19a; 19c; 45b; 48a; 49; 50b; 52a.	196,6	16,2
7	51 – 60	82b; 82d; 83; 85; 90b.	79,9	6,6
8	61 – 70	81a; 84a; 86b.	118,2	9,8
9	71 – 80	3b; 19b; 47a; 52c; 48d; 50a; 51a; 80a; 80b; 88a.	189,6	15,6

10	81 – 90	76	57,8	4,8
11	Miskin Riap*)	4b	5,3	0,4
12	Tebangan tahun lalu	18c	11,3	0,9
13	Tanaman Jati bertumbuhan kurang baik	42b; 42c	11,1	0,9
Jumlah		67 petak/ anak petak	1.212,1	100,0

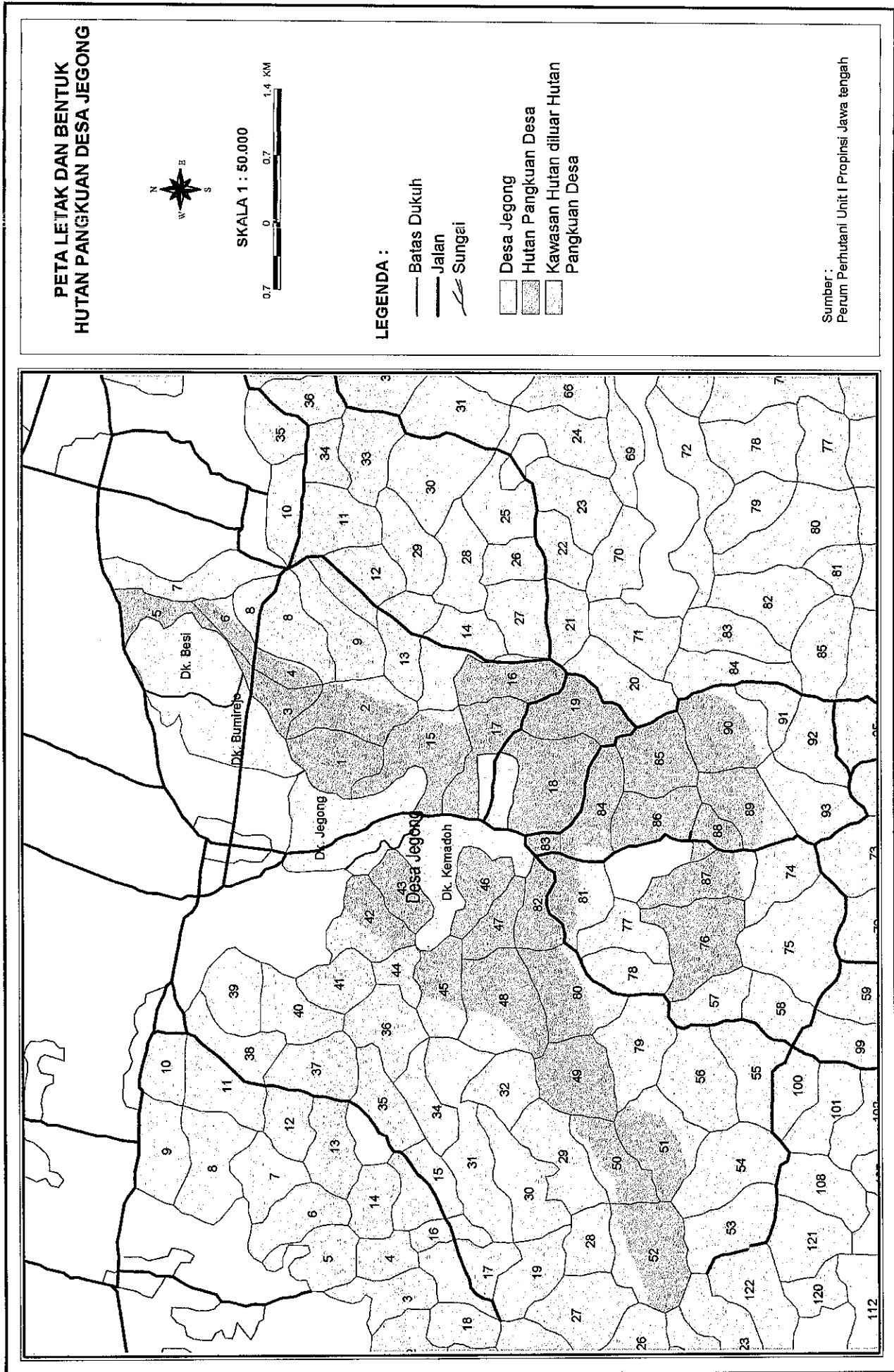
Sumber : Perjanjian Kerjasama antara PT. Perhutani (Persero) KPH Randublatung dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora tanggal 28 Mei 2002 NO. 255.

Keterangan:

1. Huruf yang berada dibelakang nomer petak adalah kode anak petak (Contoh 1a adalah petak 1 anak petak a).
- *) Miskin Riap adalah hutan yang telah sangat tua sehingga tidak ada pertumbuhan volume kayunya lagi.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai dengan akhir tahun 2002 Hutan Pangkuan Desa Jegong memiliki luas hutan produktif sebesar 93,6 % sedangkan tanah kosongnya hanya 4,6 % dan sisanya merupakan hutan tidak produktif. Dengan demikian hutan di wilayah pangkuan Desa Jegong masih sangat potensial dan kelestariannya cukup baik. Dari keadaan hutan di atas dapat dikatakan bahwa masih banyak terdapat kegiatan yang dapat dilakukan di hutan, sehingga peluang masyarakat untuk ikut mengelola dan memperoleh manfaat dari hutan sangat besar. Oleh karena itu, kepedulian masyarakat untuk menjaga asset tersebut sangat diharapkan agar bisa menikmati hasil ekonomi, di samping menikmati manfaat lainnya dari pengaruh terhadap lingkungan dengan keberadaan hutan tersebut.

Gambar 4.



Pada saat penjarahan hutan merajalela di Kabupaten Blora yaitu sejak tahun 1998 yang hingga kini masih berlangsung, Hutan Pangkuan Desa Jegong juga tidak luput sasaran para penjarah. Meskipun tidak separah desa-desa yang lain. **Tabel 13** menunjukkan jumlah pohon yang dijarah dan kerugian yang dialami Hutan Pangkuan Desa Jegong.

Tabel 13. Jumlah pohon yang dijarah dan kerugiannya pada Hutan Pangkuan Desa Jegong tahun 1995 sampai 2003.

No.	Tahun	Jumlah Pohon (batang)	%	Kerugian (Rp X 1.000)
1	1995	65	0,9	28.462.000
2	1996	18	0,2	9.450.000
3	1997	41	0,6	21.629.000
4	1998	190	2,6	20.305.000
5	1999	359	4,9	182.809.000
6	2000	388	5,2	234.378.000
7	2001	5.361	72,5	2.012.395.000
8	2002	957	12,9	752.889.000
9	2003	17	0,2	11.960.000
Jumlah		7.396	100,0	3.274.277.000

Sumber: Perum Perhutani KPH Randublatung tahun 2004.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pencurian pohon sebelum penjarahan (sampai tahun 1997) hanya rata-rata 41 pohon pertahun. Pada masa banyak penjarahan pohon hutan (mulai tahun 1998) grafik kehilangan pohon meningkat drastis yang berpuncak pada tahun 2001 yaitu sebanyak 5.361 pohon atau sekitar 131 kali dari rata-rata kehilangan

pohon rata-rata sebelum penjarahan. Pada tahun 2002 dan 2003 jumlah kehilangan pohon terus menurun bahkan pada tahun 2003 hanya kehilangan 17 pohon yang lebih rendah daripada rata-rata kehilangan pohon sebelum penjarahan. Menurut Purwadi (2004) penurunan tingkat pencurian pohon hutan tersebut antara lain merupakan dampak diimplementasikannya PHBM.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang diperoleh baik dari lapangan maupun penelitian dokumen yang berkaitan dengan PHBM. Hasil penelitian meliputi pelaksanaan PHBM serta faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan PHBM. Dari hasil itu semua diajukan model penyempurnaan PHBM mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaannya.

5.1 Pelaksanaan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Jegong.

Sesuai dengan bunyi dalam ketentuan umum Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 dan Keputusan Gubernur Jateng tanggal 22 September 2001 No : 24 Tahun 2001, tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi , yang dimaksud dengan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat adalah *suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.*

Tahap-tahap pelaksanaan PHBM berdasar pasal 9 Keputusan Gubernur Jateng tanggal 22 September 2001 No : 24 Tahun 2000, diatur sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pengenalan program (sosialisasi);
- c. Persiapan prakondisi sosial (Pengkajian Desa Partisipatif, pembentukan kelembagaan baik kelompok maupun forum);
- d. Pelaksanaan program baik teknis maupun non teknis (pemberdayaan masyarakat);
- e. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk mempermudah evaluasi pelaksanaan PHBM di Desa Jegong kelima tahapan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Perencanaan.
- b. Pelaksanaan
- c. Pemantauan dan evaluasi.

Uraian pada Sub bab berikut didahului dengan penyajian data dan kemudian dievaluasi, yang hasilnya digunakan untuk membuat model PHBM yang lebih tepat.

5.1.1 Perencanaan.

5.1.1.1 Rencana PHBM Jangka Panjang.

Berdasarkan wawancara dengan petugas Dinas Kehutanan Propinsi dan Administratur Perhutani KPH Randublatung, Rencana PHBM Jangka Panjang di Desa Jegong tidak pernah dibuat. Lebih lanjut dijelaskan oleh petugas Dinas Kehutanan Propinsi bahwa oleh karena PHBM di Desa Jegong harus segera dilaksanakan pada tahun 2002 (terkait dengan keproyekan) maka yang dibuat hanya terbatas rencana lima tahun ke depan saja (2002 – 2006).

5.1.1.2. Rencana PHBM jangka menengah

Rencana PHBM Jangka Menengah Desa Jegong yang ada hanya berupa Konsepsi (Rancangan) Uji Coba Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) atau disebut juga Rencana Strategis (Renstra). Rencana ini memuat kegiatan yang akan dikerjakan lima tahun mendatang. Penyusunannya dimaksudkan sebagai acuan bagi pengelola PHBM dan memberikan gambaran kegiatan mengenai pengelolaan hutan pada masing-masing petak pangkuan selama lima tahun kedepan.

Konsep Rencana Strategis disusun oleh Dinas Kehutanan Propinsi dan Perhutani Unit I Jawa Tengah, yang kemudian dibahas bersama dengan Pengurus LMDH Wana Lestari, Perhutani KPH Randublatung dan Kantor Kehutanan Kabupaten Blora. Isi dari rencana kerja lima tahun ini bersifat sangat teknis, meliputi rencana kerjasama pengelolaan, rencana kerja penguatan kelembagaan MDH, rencana penanaman, sketsa pola tanam, kontribusi para pihak, ketentuan berbagi dan jadwal pelaksanaan. Pembahasan dilakukan melalui beberapa kali pertemuan di balai desa Jegong dan di kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemadoh.

Dalam pembahasan terdapat beberapa hal yang cukup alot yaitu:

1. Jangka waktu perencanaan: Perhutani menghendaki dibuat setiap tahun namun pihak LMDH menghendaki jangka yang lebih panjang yaitu minimal sepuluh tahun. Akhirnya disepakati jangka waktu perencanaan adalah lima tahun.
2. Petak-petak yang akan dikerjasamakan: Perhutani menghendaki agar petak-petak yang dikerjasamakan hanya petak-petak yang ada kegiatan penanaman saja, sedangkan petak-petak yang ada kegiatan penjarangan dan tebangan tidak dikerjasamakan meskipun berada dalam hutan pangkuan desa. LMDH menginginkan kerjasama dilakukan pada semua kegiatan di semua petak yang berada dalam hutan pangkuan desa.

Akhirnya disepakati kerjasama meliputi seluruh kegiatan yang berada dalam hutan pangkuan Desa Jegong.

3. Pola tanaman: Perhutani menghendaki pola tanaman pokok dilakukan secara konvensional yaitu 3 m X 1 m dan tanaman buah-buahan (mangga) hanya boleh ditanam di tepi hutan. LMDH menghendaki jarak tanam dari tanaman pokok kehutanan (jati) yang lebih lebar untuk memberi kesempatan bagi pesanggem anggota LMDH lebih banyak mendapat ruang bagi tanaman semusimnya. Akhirnya disepakati jarak tanam tanaman pokok selebar 3 m X 3 m, dan tanaman buah-buahan boleh ditanam di dalam hutan dengan jarak tanam minimal 6 m X 8 m.

Pembahasan berjalan dengan dinamika yang cukup tinggi, saling memberi dan tukar menukar informasi serta pendapat dengan argumentasi masing-masing. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya Konsepsi (Rancangan) Uji Coba Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) atau Rencana Strategis (Renstra) dapat disepakati oleh semua pihak. Pengesahan Rencana Strategis tersebut ditandatangani oleh Ketua LMDH Wana Lestari dan Kepala KPH Randublatung diketahui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Blora pada tanggal 28 Mei 2002.

5.1.1.3 Rencana PHBM Tahunan

Berdasar wawancara dengan petugas Dinas Kehutanan maupun Perhutani, rencana PHBM Tahunan Desa Jegong tidak dibuat. Petugas-petugas tersebut menjelaskan bahwa dalam Rencana Strategis yang memuat kegiatan lima tahun mendatang menurut mereka sudah terlihat kegiatan tahunan mulai tahun 2002 sampai 2006, dengan demikian tidak perlu lagi dibuat rencana tahunannya.

Evaluasi terhadap perencanaan yang dilakukan menunjukkan bahwa meskipun Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 mengamanatkan bahwa perlu disusunnya rencana PHBM, namun tidak jelas mengenai tingkat-tingkat perencanaannya. Fakta yang diketemukan dalam pelaksanaan Perencanaan PHBM di Desa Jegong, perencanaan jangka panjang dan tahunan tidak dibuat.

Perencanaan jangka panjang untuk pelaksanaan PHBM merupakan kegiatan yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan:

1. PHBM berkaitan dengan lahan hutan pangkuan yang luas.
2. Masalah sosial-ekonomi masyarakat desa Jegong dan lingkungan yang kompleks.
3. Tanaman pokok pada hutan pangkuan desa Jegong adalah Jati (*Tectona grandis*) yang panjang daurnya ditetapkan 70 tahun.
4. Akta Perjanjian kerjasama antara PT. Perhutani (Persero) KPH Randublatung dengan masyarakat Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora menyebutkan bahwa "*Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) daur tanaman pokok terhitung sejak ditandatangani*".

Di bidang kehutanan, peranan perencanaan jangka panjang sangat menonjol sehubungan dengan liputan lahan yang luas, pengaruh hutan terhadap sosial-ekonomi, lingkungan sangat kompleks serta rencana ini bekerja untuk jangka waktu yang panjang. Perencanaan jangka panjang akan menjadi arahan bagi penyusunan rencana lain dengan jangka yang lebih pendek. Tanpa perencanaan jangka panjang, akan sulit untuk membuat rencana jangka menengah atau pendek yang berkelanjutan, sehingga dapat diduga pelaksanaan PHBM di Desa Jegong sulit pula dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Dokumen perencanaan yang ada hanyalah rencana kerja untuk pegangan dalam kegiatan yang akan dikerjakan lima tahun mendatang. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam kegiatan PHBM, dan juga memberikan gambaran kegiatan pengelolaan hutan di masing-masing petak pangkuan selama lima tahun kedepan.

Meskipun konsep rencana kerja ini disusun oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Perhutani Jawa Tengah, namun dalam pengesahannya terlebih dahulu dibahas bersama dengan Pengurus LMDH Wana Lestari, Perhutani KPH Randublatung, dan Kantor Kehutanan Kabupaten Blora. Dinamika yang terjadi dalam pembahasan rencana kerja ini menunjukkan tingginya partisipasi pengurus LMDH dalam ikut menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa lima tahun ke depan. Proses perencanaan ini menunjukkan ciri dari teori perencanaan partisipatif atau disebut juga teori perencanaan transaktif. Dijelaskan oleh Hadi (2001) bahwa kunci dari gagasan perencanaan Transaktif ini adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya dinyatakan bahwa seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia, perencanaan transaktif menjadi media yang dicita-citakan untuk didayagunakan, karena salah satu tuntutan reformasi adalah demokratisasi. Hal ini menuntut adanya keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka.

Menurut pasal 8 Keputusan Gubernur Jateng tanggal 22 September 2001 No : 24 Tahun 2000, bahan penyusunan rencana PHBM ini didapat melalui studi diagnostik dengan menggunakan metode Pengkajian Desa Partisipatif (PDP) yang dipadukan dengan analisis kemampuan daya dukung potensi wilayah. Pengkajian Desa Partisipatif (PDP) dalam keputusan tersebut adalah *metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama guna memberdayakan masyarakat desa yang*

bersangkutan agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif. Berdasarkan konfirmasi kepada pihak Perhutani Unit I Jawa Tengah, metode ini sama dengan metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA).

Meskipun rencana kerja lima tahun dibuat dengan proses partisipatif, namun penyusunan tidak dilandasi dengan data yang didapat dari pendekatan PDP atau PRA. Pentingnya penggunaan PRA dikatakan oleh Baiquni (1999) bahwa PRA merupakan pendekatan dan metode partisipatif yang menekankan pada proses, pada belajar, pada pengkayaan pengalaman dan pada pencerahan. PRA mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan, permasalahan dan potensi sendiri dalam rangka penyusunan program yang relevan, perencanaan yang realistis dan kegiatan aksi yang dapat dikerjakan serta memberi manfaat.

Pengkajian Desa Partisipatif memungkinkan masyarakat desa secara bersama-sama menganalisis masalah dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata menuju pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Chambers (1992) dalam Slamet (1993) paradigma pembangunan berkelanjutan manusia diletakan sebagai inti dalam proses pembangunan. Manusia dalam proses pembangunan tidak hanya sebagai obyek tetapi mereka harus aktif ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati pembangunan.

Selain rencana jangka panjang dan menengah, rencana tahunan bagi PHBM juga sangat dibutuhkan. Rencana PHBM Tahunan memuat kegiatan-kegiatan detail yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Dalam rencana tahunan ini pengurus dan anggota LMDH serta petugas lapangan Perhutani akan mengetahui kegiatan teknis kehutanan (tanaman, pemeliharaan dan tebangan) secara detail. Semua kegiatan yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya dan cara pemantauannya tercantum pula secara rinci,

termasuk kegiatan organisasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang akan dilakukan oleh LMDH Wana Lestari setahun kedepan. Selain dari pada itu, rencana tahunan merupakan bahan untuk evaluasi kinerja LMDH dan Perhutani dalam melaksanakan PHBM.

Tidak adanya rencana jangka panjang dan tahunan, meskipun ada rencana jangka pendek, namun tanpa dilandasi PRA ini merupakan sistem perencanaan yang lemah. Karena perencanaannya kurang kuat maka PHBM juga akan mengalami kemunduran yang berakibat program ini tidak berhasil dalam mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan. Dapat diduga apabila perencanaan PHBM jangka panjang yang dilandasi PDP benar-benar dilakukan pada saat mengawali pelaksanaannya, yang kemudian disusun dengan disusunnya rencana jangka pendek dan tahunan yang jelas dapat mengakibatkan partisipasi masyarakat Desa Jegong terhadap PHBM akan menjadi tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat akan mengakibatkan keberhasilan dalam pelaksanaan PHBM yang bermuara pada kelestarian hutan dan lingkungan.

5.1.2 Pelaksanaan

5.1.2.1 Penentuan Desa Hutan untuk penerapan PHBM.

Sebagai awal dari pelaksanaan PHBM adalah menentukan desa model PHBM, yaitu desa hutan dan hutan pangkuannya. Desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan. Sedangkan hutan pangkuan adalah petak-petak kawasan hutan yang berada di sekitar desa yang dikelola bersama oleh masyarakat desa hutan dengan Perhutani.

Setelah terbitnya Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 dan Keputusan Gubernur Jateng tanggal 22 September 2001

No : 24 Tahun 2001, Perhutani Unit I Jawa Tengah bersama Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah merencanakan membuat desa model untuk mengimplementasikan PHBM. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Kepala Perhutani Unit I Jawa Tengah meminta kepada seluruh Kepala KPH Perhutani di Jawa Tengah untuk menyiapkan usulan lokasi yang cocok bagi pelaksanaan PHBM.

Setelah usulan lokasi masuk, Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah mengadakan penelaahan, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke desa-desa yang diusulkan. Hasil peninjauan lapangan dibahas melalui beberapa kali pertemuan, dan akhirnya Desa Jegong, Kabupaten Blora yang secara administratif pengelolaan hutannya, terletak dalam wilayah kerja Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung terpilih menjadi desa model PHBM pertama di Jawa Tengah.

Berdasarkan penjelasan Kepala KPH Randublatung dan staf-stafnya yang terlibat dalam pengusulan desa model ini, alasan pengajuannya karena:

- a. Desa Jegong memenuhi definisi sebagai desa hutan, karena secara geografis berbatasan dengan kawasan hutan dan terletak di sekitar kawasan hutan
- b. Keadaan umum Desa Jegong dinilai relatif aman dari penjarahan hutan.
- c. Keadaan sumberdaya hutan sekitar Desa Jegong tergolong masih baik.
- d. Tokoh masyarakat dan warga desa Jegong mempunyai komitmen yang cukup baik dalam pelestarian hutan dan diperkirakan dapat melaksanakan PHBM
- e. Terdapat kegiatan teknis kehutanan lengkap (tanaman, penjarangan dan tebangan) sampai 5 tahun mendatang.

Penetapan Desa Jegong sebagai desa model dilakukan secara sepihak oleh Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Dinas Kehutanan tanpa sepengetahuan masyarakat desa Jegong terlebih dahulu ini merupakan

perencanaan yang datanganya dari atas ke bawah (*top down planning*). Perencanaan penetapan lokasi seperti ini memang memberikan kecepatan bertindak, efisien dari segi waktu dan energi, namun seringkali mengalami kegagalan. Slamet (1993) menjelaskan bahwa program pembangunan yang dikonstruksikan dari atas, akibatnya akan inersia sosial dan menyuburkan masyarakat yang bersifat, menunggu perintah, mengharapkan belas kasihan, dan tidak dinamik.

Terhadap dilakukannya penetapan lokasi yang bersifat top down di Desa Jegong ini, perlu diperhatikan beberapa proposisi yang dikemukakan Brant dan Cheong pada tahun 1987 sebagaimana ditulis oleh Slamet (1993) sebagai berikut:

- a. Model pembangunan perdesaan yang dirancang dari luar mempunyai kemungkinan dapat berhasil, namun tujuan dan strateginya harus sesuai dengan sistem nilai tradisional, hubungan-hubungan antara manusia dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat perdesaan.
- b. Tidak realistis bila mengharapkan lokasi uji coba dapat menghasilkan perubahan bentuk yang mendasar terhadap struktur sosial ekonomi yang ada, nilai-nilai tradisional, dan pola-pola hubungan sosial di wilayah itu. Seandainya kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat (*felt needs*) dapat disesuaikan
- c. Dengan kebijakan dan program-program pemerintah yang ada intervensi secara sepihak memang dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan, namun perubahan bentuk yang mendasar dari struktur desa dan pola-pola tingkah laku yang ada, hanya akan dapat dihasilkan oleh perubahan-perubahan ekonomi nasional, politik dan sosial yang lebih luas dan lebih mendalam.
- d. Laju dan luasnya tingkat perbaikan-perbaikan di perdesaan dapat dihasilkan dengan cara intervensi perdesaan yang inovatif, namun hasilnya juga amat tergantung pada pengembangan potensi khusus yang

ada diperdesaan, yaitu kombinasi dan pembagian sosial, daya jangkau fisik terhadap pasar, sifat dan kekuatan lembaga-lembaga lokal, tradisi-tradisi kerjasama, dan kemampuan mendapatkan kepemimpinan lokal yang dinamis.

- e. Untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan bagi keluarga-keluarga miskin di wilayah perdesaan, lebih sulit dibandingkan dengan saran-saran retorik populer yang sering diketengahkan.
- f. Tekanan dari banyak pejabat terhadap para pengelola proyek-proyek pembangunan perdesaan yang menghasilkan akibat-akibat yang cepat, kasat mata dan dapat diukur secara kuantitatif, cenderung menciptakan penyimpangan program dan dapat menjadi hambatan yang besar dalam mencapai perubahan-perubahan kualitatif dan perbaikan-perbaikan penting yang merata.

Dapat diduga dengan penentuan desa Desa Jegong sebagai desa model PHBM secara sepihak, apalagi tanpa dilandasi PRA, akan penerapan PHBM akan menjumpai sebagaimana proposisi yang disampaikan Brant dan Cheong.

Hasil penelitian terhadap Desa Jegong yang ditetapkan sebagai desa model mengenai pengetahuan mereka tentang hutan dan kehutanan adalah sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura yang pertama tahun 1865, serta diumumkannya peraturan agraria (*Domeinverklaaring*) pada tahun 1870, maka keberadaan kawasan hutan di pulau Jawa dan Madura menjadi jelas (Simon,1999). Pengelolaan hutan negara di Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak tahun 1963 dilakukan oleh Perhutani. Dalam perjalanan sejarah bentuk pengelola hutan berubah-ubah dari PN Perhutani menjadi Perum Perhutani kemudian berubah menjadi PT. Perhutani (persero) dan terakhir berubah menjadi Perum Perhutani kembali.

Pengelolaan hutan negara oleh Perhutani sampai saat ini telah berlangsung lebih dari 40 tahun dan telah memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa hutan negara itu adalah milik perhutani. Di Desa Jegong keberadaan kepemilikan hutan yang ada di sekitarnya adalah milik Perhutani juga sangat besar, yaitu yaitu 92,4 % dari responden menyatakan mereka mengetahui dan mengakui bahwa hutan di sekitar desa mereka adalah milik Perhutani di sekitar desa mereka, sebagaimana **Tabel 14** dibawah ini:

Tabel 14. Pemahaman responden terhadap keberadaan hutan Perhutani di sekitar Desa Jegong

No.	Pengetahuan akan keberadaan kawasan hutan	Jumlah responden	%
1	Tahu	231	92,4
2	Tidak tahu	19	7,6
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Tabel diatas menunjukan besarnya pengakuan adanya batas yang tegas antara kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani dengan lahan milik masyarakat maupun lahan milik publik atau lahan negara lainnya. Di satu sisi besarnya pemahaman masyarakat Desa Jegong terhadap keberadaan kawasan hutan negara tersebut sangat menggembirakan, karena salah satu kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan berdasar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) adalah adanya kepastian penggunaan lahan sebagai kawasan hutan. Di sisi lain persepsi ini melahirkan sikap egois yang berlebihan pada Perhutani yaitu menganggap dirinya satu-satunya pengelola hutan tanpa ada yang boleh mencampurinya. Hal ini dipertegas dengan adanya ayat dalam setiap Peraturan Pemerintah tentang Perum

Perhutani yang menyebutkan "Selain organ perusahaan, pihak lain manapun dilarang mencampuri pengurusan perusahaan".

Pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan hutan dan adanya ayat yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tersebut, makin menjauhkan Perhutani dengan masyarakat sekitar hutan. Perhutani beranggapan masyarakat sekitar hutan dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan.

Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai multi manfaat, yaitu manfaat ekonomi (berupa hasil hutan), ekologi (pencegah bahaya banjir dan kekeringan serta tempat hidup satwa liar) dan sosial (memberi pekerjaan). Hasil penelitian di Desa Jegong menunjukkan bahwa persepsi responden tentang manfaat hutan ternyata sangat baik. Hampir seluruh responden (98,4 %) mempunyai persepsi bahwa hutan ada manfaat bagi mereka, sebagaimana terlihat pada **Tabel 15** berikut ini:

Tabel 15. Persepsi responden terhadap manfaat hutan.

No.	Persepsi akan manfaat hutan	Jumlah responden	%
1	Bermanfaat	246	98,4
2	Tidak tidak bermanfaat	3	1,2
3	Tidak tahu	1	0,4
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Tingginya persepsi bahwa hutan bermanfaat bagi masyarakat merupakan modal awal yang baik bagi masyarakat Desa Jegong untuk menjaga kelestariannya.

Persepsi mengenai manfaat hutan sangat beragam Persepsi mengenai manfaat hutan yang sangat beragam ini akan mewarnai sikap responden yang beragam pula tentang hutan dan akan membentuk perilaku

tertentu terhadap hutan. Apabila persepsi dan perilaku yang terbentuk cenderung eksploitatif, maka akan menimbulkan terjadinya kerusakan hutan dalam bentuk penebangan hutan secara berlebihan. Sebaliknya apabila persepsi dan perilaku yang terbentuk cenderung konservasi maka akan mewujudkan kelestarian hutan karena masyarakat akan menjaganya.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Jegong mengenai bentuk dari mafaat hutan bagi mereka dapat dilihat pada **Tabel 16** dibawah ini:

Tabel 16. Persepsi responden terhadap bentuk manfaat hutan.

No.	Persepsi akan bentuk manfaat hutan	Jumlah responden	%
1	Ekonomi	31	12,6
2	Ekologi	46	18,7
3	Sosial	15	6,1
4	Ekonomi dan ekologi	66	26,8
5	Ekonomi dan Sosial	5	2,0
6	Ekologi dan sosial	14	5,7
7	Ekonomi, ekologi dan sosial	69	28,1
Jumlah		246	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Suatu hal yang sangat menggembirakan adalah persepsi sebagian besar responden mengenai manfaat hutan di Desa Jegong adalah manfaat ekologi (pencegahan banjir dan kekeringan serta tempat hidupnya satwa liar). Persepsi para responden terhadap manfaat hutan ini sangat tinggi yaitu 79,3 % (penjumlahan bentuk persepsi no. 2, 4, 6 dan 7). Besarnya persepsi bahwa manfaat hutan berupa manfaat ekologi ini melebihi persepsi manfaat hutan untuk ekonomi (penghasil kayu) sebesar 69,5 % (penjumlahan bentuk persepsi no. 1, 4, 5 dan 7) dan manfaat hutan untuk sosial (menciptakan

lapangan kerja) sebesar 41,9 % (penjumlahan bentuk persepsi no. 3, 5,6 dan 7).

Hasil klarifikasi terhadap beberapa menunjukan mereka menghendaki agar fungsi ekologi hutan di desanya lebih lebih menonjol daripada fungsi ekonomi dan sosial. Wawancara penulis dengan beberapa masyarakat Desa Jegong juga menunjukan bahwa ada kekhawatiran apabila hutan rusak mereka akan kesulitan mendapatkan air dan takut adanya tiupan angin kencang yang melanda desanya pada musim-musim pancaroba. Hal ini logis, karena rusaknya hutan akan juga merusak fungsinya. Sebagai contoh komentar dari sdr. Pardi dari Desa Jegong menjawab pertanyaan mengenai kerusakan hutan sebagai berikut"*...karena kalau hutannya gundul, masyarakat takut kalau terjadi banjir dan erosi*". Pendapat sdr. Budi Haryanto dari Desa Jegong mengenai dampak penjarahan hutan lebih bersifat ekonomi sebagai berikut "*...karena saya mencari penghasilan tambahan dari hutan, kalau hutan di Desa Jegong dijarah, saya akan susah mendapat penghasilan tambahan. Seperti halnya masyarakat desa hutan yang hutan sekitarnya dijarah, mereka kesulitan mendapatkan kayu bakar, dan kemudian mencari kayu bakar di Desa Jegong*".

Responden yang menyatakan bahwa hutan tidak bermanfaat mempunyai alasan bahwa ada atau tidak ada hutan, banjir dan kekeringan tetap saja terjadi dan ada juga yang merasa satwa yang berasal dari hutan mengganggu tanaman pertanian mereka. Namun demikian jumlah mereka sangat kecil, yaitu sebanyak 1,2 % saja (Tabel 15).

Telah disebutkan di atas, bahwa salah satu dasar penentuan Desa Jegong sebagai desa model selain keadaan umum Desa Jegong dinilai relatif aman dari penjarahan hutan adalah adanya komitmen tokoh masyarakat serta warga desa Jegong yang cukup baik dalam pelestarian hutan sehingga diperkirakan dapat melaksanakan PHBM.

Untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Jegong mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kelestarian hutan, pada **Tabel 17** dibawah ini disajikan persepsi masyarakat Desa Jegong terhadap adanya pencurian kayu di desanya sebelum diterapkannya PHBM.

Tabel 17. Persepsi responden terhadap tingkat pencurian kayu di Desa Jegong

No.	Tingkat pencurian kayu	Jumlah responden	%
1	Tidak ada	41	16,4
2	Ada tapi tidak terlalu banyak	148	59,2
3	Sering	61	24,4
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Data pada Tabel 17 menunjukan bahwa sebagian besar (59,2%) responden berpersepsi bahwa sebelum penerapan PHBM, pencurian kayu di Desa Jegong ada tapi tidak terlalu banyak. Jawaban para responden ini beralasan bahwa dibanding dengan desa-desa lain di sekitar desa mereka pencurian kayu di Desa Jegong relatif sedikit. Sedangkan responden yang menjawab bahwa pencurian kayu sering terjadi (24,4%) beralasan bahwa penjarahan hutan yang terjadi sejak tahun 1998 mereka anggap sangat tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Jegong terhadap pencurian kayu di Desa Jegong setelah diselenggarakannya PHBM, dapat dilihat pada data **Tabel 18** di bawah ini.

Tabel 18. Persepsi responden terhadap tingkat pencurian kayu di Desa Jegong setelah diselenggarakannya PHBM di Desa Jegong

No.	Tingkat pencurian kayu	Jumlah responden	%
1	Sudah tidak ada lagi	58	23,2
2	Banyak berkurang	137	54,8
3	Sedikit berkurang	43	17,2
4	Sama banyaknya dengan sebelum PHBM	12	4,8
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Informasi yang didapat dari Tabel 18 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (95,2%) menyatakan bahwa penjarahan hutan di Desa Jegong telah berkurang (penjumlahan no. 1,2 dan 3). Data ini menunjukkan bahwa paling tidak pelaksanaan PHBM di Desa Jegong telah menimbulkan persepsi dapat menurunkan tingkat pencurian kayu hutan.

Penjarahan hutan yang terjadi pada kawasan hutan di Jawa dan pada gilirannya dapat merusak lingkungan perlu dicegah dan hutan harus diamankan. Persepsi masyarakat Desa Jegong mengenai siapa yang harus mengamankan hutan dapat dilihat pada **Tabel 19** sebagai berikut.

Tabel 19. Persepsi responden mengenai siapa yang harus mengamankan hutan

No.	Pengamanan hutan	Jumlah responden	%
1	Perhutani, masyarakat dan penegak hukum	144	57,6
2	Perhutani dan masyarakat	64	25,6
3	Perhutani dan penegak hukum	8	3,2
4	Penegak hukum dan masyarakat	7	2,8
5	Perhutani saja	23	9,2
6	Penegak hukum saja	1	0,4
7	Masyarakat saja	3	1,2
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Berdasar Tabel 19 tersebut, ternyata sebagian besar (57,6%) dari responden mempunyai persepsi bahwa pengamanan hutan merupakan tanggungjawab bersama antara Perhutani, masyarakat dan penegak hukum. Suatu hal yang menarik dari hasil penelitian ini, bahwa persepsi penanggungjawab keamanan hutan yang paling besar adalah Perhutani yaitu sebesar 95,6% (penjumlahan no. 1,2,3 dan 5). Hal ini berarti masyarakat masih menganggap pentingnya peran Perhutani dalam pengamanan hutan. Tanggungjawab masyarakat dalam pengamanan hutan juga menunjukan angka yang tinggi, dinyatakan oleh 87,2% responden (penjumlahan no. 1,2,4 dan 7). ini berarti ada persepsi positif dari masyarakat dalam ikut bertanggungjawab dalam pengamanan hutan. Rasa tanggungjawab ini dikemukakan oleh sdr. Nardi dari dukuh Jegong sebagai berikut "*...Karena kalau tidak dicegah yang rugi desa ini sendiri*". Persepsi responden tentang tanggungjawab penegak hukum dalam pengamanan

hutan ternyata lebih kecil dibanding Perhutani dan masyarakat, yaitu sebesar hanya 64% saja (penjumlahan no. 1,3,4 dan 6).

Analisis berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam usaha pencegahan penjarahan hutan di Desanya, dapat dilihat pada **Tabel 20** sebagai berikut.

Tabel 20. Persepsi responden dalam usaha ikut mencegah penjarahan hutan

No.	Ikut / berusaha berusaha ikut mencegah penjarahan hutan	Jumlah responden	%
1	Ya	199	79,6
2	Tidak	51	20,4
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Data diatas menunjukan bahwa sebagian besar (79,6%) responden berpersepsi masyarakat ikut mencegah dan berusaha mencegah apabila ada seseorang atau sekelompok orang akan melakukan penjarahan hutan di Desa Jegong.

Keamanan hutan hutan erat kaitannya dengan kelstarian hutan dan lingkungan. Pada **Tabel 21** di bawah ini dapat diperoleh informasi mengenai persepsi tanggungjawab responden dalam menjaga kelestarian hutan.

Tabel 21. Persepsi responden tentang tanggung jawab kelestarian hutan

No	Ikut bertanggung jawab akan kelestarian hutan	Jumlah responden	%
1	Ya	194	77,6
2	Tidak	56	22,4
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Persepsi responden bahwa mereka ikut bertanggungjawab terhadap kelestarian hutan di sekitarnya tinggi yaitu sebesar 77,6%. Adapun alasan responden mengapa ia bertanggung-jawab terhadap kelestarian hutan dapat dilihat pada **Tabel 22** di bawah ini.

Tabel 22. Alasan responden tentang tanggung jawab kelestarian hutan

No	Alasan ikut bertanggung jawab	Jumlah responden	%
1	Kehidupan dan kesejahteraan tergantung hutan	32	16,5
2	Hutan yang rusak akan berpengaruh buruk terhadap pertaniannya	28	14,4
3	Hutan merupakan pelindung lingkungan hidup di desa	134	69,1
Jumlah		194	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Dari pernyataan sebagaimana data pada Tabel 22 di atas, ternyata sebagian besar responden (69,1%) mempunyai persepsi bahwa hutan merupakan pelindung lingkungan hidup mereka. Sedangkan hutan sebagai gantungan kesejahteraan dan keberhasilan usaha pertanian mereka hanya

sebesar 16,5% dan 14,4%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jegong menganggap bahwa hutan di sekitar mereka merupakan sumberdaya alam yang dikehendaki untuk melindungi kehidupannya. Pendapat sdr. Maridin mengenai penjarahan hutan adalah "...kami akan mencegah semampu kami, takut hutan ini habis" Persepsi positif ini merupakan modal sosial yang harus dijaga agar sikap masyarakat dapat diwujudkan menjadi perilaku yang menjaga kelestarian sumberdaya hutan.

Dengan demikian rasa ikut memiliki (*melu handarbeni*) masyarakat terhadap hutan yang ada disekitarnya akan meningkat. Meningkatnya rasa ikut memiliki akan hutan yang ada disekitarnya akan mendorong masyarakat dengan kesadarannya sendiri menjaga kelestarian hutan. Karena terganggunya hutan disekitar tempat tinggalnya juga merupakan ancaman bagi lingkungan hidupnya.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Desa Jegong terhadap hutan di sekitar desanya dan kehutanan sudah tinggi, sehingga pemilihan Desa Jegong sebagai desa model tidak keliru. Kelemahan yang terjadi akibat perencanaan *top-down* tersebut secara teoritis dapat diatasi dengan membuat perencanaan yang bersifat *bottom-up* yang dikelola oleh masyarakat desa Jegong itu sendiri. Pendekatan perencanaan secara *bottom-up planing*, menurut Slamet (1993) merupakan pendekatan yang mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Dalam hal ini peranan masyarakat itu sendirilah yang akhirnya membuat pilihan akhir sebab mereka sendiri yang akan menanggung kehidupannya.

Oleh sebab itu dalam menetapkan desa model PHBM pada umumnya, harus dengan cara *bottom-up* yang didahului dengan PRA untuk mengetahui respon masyarakat yang sebenarnya, karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan dan sering tidak terjangkau oleh Dinas

Kehutanan dan Perhutani Unit I Jawa Tengah. Dengan menggunakan pendekatan seperti ini, diharapkan dapat terwujud partisipasi masyarakat yang tinggi dalam melaksanakan PHBM.

5.1.2.2 Sosialisasi.

Setelah desa model ditentukan, Petugas Perhutani dan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pamong desa Jegong dan Camat Jati. Pendekatan ini untuk menjelaskan maksud dan tujuan adanya PHBM. Menurut Petugas Perhutani KPH Randublatung tahapan disebut tahap pra sosialisasi, karena pendekatan baru kepada masyarakat yang terbatas yaitu Camat Jati, Kepala Desa Jegong dan beberapa tokoh masyarakat Desa Jegong. Berdasar keterangan dari Perhutani Unit I Jawa Tengah, dalam pra sosialisasi ini, rencana penerapan PHBM di Desa Jegong mendapat sambutan yang baik dari tokoh-tokoh masyarakat desa. Hal ini karena setelah mendapat penjelasan mengenai PHBM, mereka melihat peluang bahwa dengan PHBM masyarakat Desa Jegong dapat meningkat kesejahteraannya. Selanjutnya meminta agar maksud tersebut disosialisasikan kepada masyarakat Desa Jegong secara lebih luas.

Kegiatan sosialisasi yang sesungguhnya mulai dilakukan pada bulan Nopember 2001 yang dilaksanakan oleh petugas Perhutani Unit I Jawa Tengah serta petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, ditujukan kepada segenap elemen masyarakat dengan harapan agar maksud dan tujuan PHBM dapat diketahui masyarakat Desa Jegong secara lebih luas. Sosialisasi diselenggarakan di Balai Desa Jegong dengan cara mengumpulkan berbagai unsur masyarakat Desa Jegong, yaitu Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, Kelompok Tani Hutan, Takmir masjid, tokoh masyarakat dan perwakilan warga dari dusun-dusun di Desa Jegong, yang

dihadiri oleh sekitar 100 orang. Undangan sosialisasi dibuat oleh Kepala Desa Jegong.

Topik yang banyak didiskusikan dalam sosialisasi tersebut berkaitan dengan bagi hasil (kayu) antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan, karena merupakan hal baru yang banyak menarik perhatian. Warga desa menanyakan mengenai besarnya bagi hasil masing-masing pihak. Perhutani ketika itu belum dapat menjawab dengan tegas karena belum ada pedoman jelas yang mengatur tata cara dan besarnya berbagi hasil hutan kayu.

Memang pada waktu sosialisasi dilakukan, belum ada pedoman lebih lanjut mengenai tata cara berbagi hasil hutan kayu seperti yang dimaksud dalam pasal 21 Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perhutani selaku Pengurus Perusahaan tanggal 29 Maret 2001 No : 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Pasal 21 hanya menyebutkan:

1. *Kegiatan berbagi dalam PHBM ditujukan untuk meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi serta manfaat sumberdaya hutan.*
2. *Nilai dan proporsi berbagi dalam PHBM ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak (perusahaan, masyarakat desa hutan, pihak yang berkepentingan).*
3. *Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat 2 di atas, ditetapkan oleh perusahaan dan masyarakat desa hutan atau perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan, pada saat penyusunan rencana.*
4. *Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat 3 di atas, dituangkan dalam perjanjian PHBM antara perusahaan dan masyarakat desa hutan atau perusahaan dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.*

Dalam sosialisasi yang dilaksanakan untuk pertama kalinya itu, masyarakat menyarankan agar kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan sosialisasi berikutnya dan dilakukan kepada perwakilan yang mereka tunjuk. Wakil-wakil masyarakat yang nantinya mengikuti sosialisasi lanjutan terdiri dari anggota Badan Perwakilan Desa, Kelompok Tani Hutan, anggota Takmir masjid, dan beberapa tokoh masyarakat serta perwakilan warga dari Dusun Kemadoh, Jegong, Besi dan Bumirejo. Sosialisasi PHBM yang diselenggarakan setelah itu, sekaligus membentuk kelembagaan, kepengurusan dan naskah kerjasama.

Sosialisasi PHBM di Desa Jegong yang dilakukan dengan cara tersebut di atas, dapat efektif apabila peserta benar-benar merupakan perwakilan dari seluruh penduduk Desa Jegong dan kemudian mereka meneruskan informasi yang mereka dapat kepada warga masyarakat lainnya. Namun kenyataan yang terjadi ternyata tidak semua penduduk mengetahui mengenai PHBM.

Untuk mengetahui apakah dengan cara sosialisasi tersebut masyarakat Desa Jegong banyak yang mengetahui tentang PHBM, Tabel 23 di bawah ini menggambarkan tingkat pengetahuan responden akan keberadaan PHBM di desanya.

Tabel 23. Pengetahuan responden tentang adanya PHBM di Desa Jegong.

No.	Pengetahuan akan adanya PHBM	Jumlah responden	%
1	Tahu	194	77,6
2	Tidak tahu	56	22,4
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Dari Tabel 23 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar (77,6%) responden mengetahui adanya PHBM di desanya, namun demikian jumlah masyarakat yang tidak atau belum mengetahui adanya PHBM di desanya yang mencapai 22,4 % harus menjadi perhatian karena jumlah ini relatif cukup besar.

Untuk dapat mengkaji lebih lanjut tingkat pengetahuan PHBM pada tiap dusun, digunakan alat analisis tabulasi silang (*crosstab*). Tabulasi silang merupakan alat analisis deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk tabulasi baris dan kolom yang bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini alat analisis tersebut akan dipakai untuk mengetahui bagaimana hubungan antara domisili responden dengan pengetahuan mereka mengenai adanya PHBM di Desa Jegong sebagaimana disajikan dalam **Tabel 24** di bawah ini.

Tabel 24. Tabulasi silang antara domisili responden dengan pemahaman akan adanya PHBM.

No.	Dukuh	Pengetahuan	akan adanya	PHBM
		Tahu	Tidak tahu	Jumlah
1	Besi	50 (20,0%)	35 (14,0%)	85 (34,0%)
2	Jegong	60 (24,0%)	0 (0,0%)	60 (24%)
3	Kemadoh	58 (23,2%)	5 (2,0%)	63 (25,2%)
4	Bumirejo	26 (10,4%)	16 (6,4%)	42 (16,8%)
Jumlah		194 (77,6%)	56 (22,4%)	250 (100%)

Sumber: Data primer, 2004.

Dari Tabel 24 dapat diperoleh informasi bahwa ada kecenderungan responden yang berdomisili di Dukuh Besi dan Bumirejo banyak yang tidak mengetahui tentang adanya PHBM di desanya. Berdasarkan uji chi-square pada tingkat kepercayaan 95% (α 0,05) terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara dukuh-dukuh diatas mengenai keberadaan PHBM di Desa Jegong. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *asympt.sig* sebesar 0,00 yang lebih kecil dari α 0,05, yang berarti lokasi dukuh membuat perbedaan yang nyata terhadap pengetahuan responden mengenai adanya PHBM . Hal ini dibuktikan adanya beberapa komentar dari warga dukuh Besi dan Bumirejo sebagai berikut:

1. Sdr Kartoban dari dukuh Besi: *"...PHBM agar lebih disosialisasikan kepada warga.*
2. Sdr Salimin dari Dukuh Besi: *"...Diadakan pertemuan supaya masyarakat paham tentang PHBM*
3. Sdr Wijiatun dari Dukuh Bumirejo: *"...pengurus PHBM belum terjun ke dukuh dan masyarakat kami".*

Keadaan ini sangat mungkin terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Sosialisasi mengenai PHBM tidak pernah diadakan di luar Dukuh Jegong.
- b. Kedudukan Dukuh Jegong dan Kemadoh dengan Dukuh Besi dan Bumirejo terpisah oleh Desa Jati yang menyebabkan adanya hambatan komunikasi antara antara dukuh tersebut.
- c. Letak sekretariat LMDH Wana Lestari berada di Dukuh Jegong.
- d. Pengurus LMDH yang berjumlah 24 orang, sebagian besar yaitu 19 orang (79,2%%) berdomisili di Dukuh Jegong dan Kemadoh, sedangkan hanya sebanyak 5 orang (20,8%) yang berdomisili di Dukuh Besi dan Bumirejo.
- e. Selama ini pertemuan-pertemuan LMDH hanya diselenggarakan di sekretariat LMDH yang berada di Dukuh Jegong.

- f. Masyarakat Dukuh Kemadoh dan Besi jarang menghadiri pertemuan LMDH karena masalah bentuk undangan sering berbentuk lesan (bahasa Jawa: *jawilan*), jarak yang relatif jauh dan kondisi jalan yang buruk terutama di musim hujan.

Untuk mengetahui dari mana sumber informasi yang didapat oleh masyarakat desa tentang adanya PHBM, dapat dilihat pada **Tabel 25** dibawah ini.

Tabel 25. Sumber informasi tentang adanya PHBM di Desa Jegong.

No.	Sumber informasi	Jumlah responden	%
1	Petugas Perhutani	109	56,2
2	Pamong desa	57	29,4
3	Tetangga	8	4,1
4	Saudara	7	3,6
5	Selebaran	8	4,1
6	Lainnya	5	2,5
Jumlah		194	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sekitar 85,6 % informasi yang didapat masyarakat berasal dari instansi formal, yaitu Perhutani dan Pamong desa, sedang sisanya berasal dari luar instansi formal. Keadaan diatas menunjukkan bahwa:

- Perhutani dan Pamong desa aktif melakukan sosialisasi PHBM sehubungan dengan proses sosialisasi dan tugas yang melekat pada kedua instansi tersebut.
- Komunikasi antar warga desa mengenai PHBM masih sangat terbatas.

Persepsi terhadap suatu kegiatan menimbulkan sikap tertentu dari seseorang, yaitu sikap setuju, tidak setuju ataupun tidak peduli. Pada **Tabel 26** dibawah ini dapat diketahui mengenai sikap responden terhadap diselenggarakannya PHBM di Desa Jegong.

Tabel 26. Sikap responden terhadap diterapkannya PHBM di Desa Jegong.

No.	Sikap responden	Jumlah responden	%
1	Setuju	234	93,6
2	Tidak setuju	5	2,0
3	Tidak peduli	11	4,4
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Informasi tentang PHBM dengan cara sosialisasi dapat menimbulkan hambatan dalam implementasinya. Meskipun 93,6% dari responden setuju dengan PHBM, sebenarnya masyarakat Desa Jegong belum paham benar mengenai PHBM, namun Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Perhutani Unit I Jawa Tengah tetap menghendaki PHBM segera berjalan. Akibatnya adalah muncul semacam "paksaan" sehingga masyarakat Desa Jegong lebih merupakan obyek uji coba PHBM, bukannya sebagai subyek.

Namun demikian, seandainyaupun PHBM telah sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya serta kebutuhan masyarakat setempat dampaknya terhadap masyarakat desa belum tentu menguntungkan, karena masyarakat kurang dapat mengembangkan potensi yang terpendam, lebih banyak menunggu pemberian dari Pemerintah dan Perhutani yang berakibat terpupuknya jiwa ketergantungan pada bantuan dan tetap menjadi masyarakat yang tidak berdaya.

5.1.2.3 Pembentukan LMDH.

Dalam PHBM ditegaskan bahwa masyarakat desa hutan yang akan mengelola hutan bersama Perhutani harus berbentuk kelompok (ekonomi, sosial atau budaya) yang tumbuh dari keswadayaan. Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Perhutani Unit I Jawa Tengah menginginkan kelompok tersebut merupakan kelompok yang mempunyai komitmen tinggi terhadap kelestarian hutan dan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat sesuai dengan sumberdaya hutan yang ada di sekitar desa mereka.

Pembentukan kelembagaan masyarakat Desa Jegong ini juga untuk memenuhi pasal 20 Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perhutani selaku Pengurus Perusahaan tanggal 29 Maret 2001 No : 136/Kpts/Dir/2001, yang menyebutkan: *Masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama Perhutani berbentuk kelompok ekonomi, kelompok sosial ataupun kelompok budaya yang tumbuh dari keswadayaan.*

Pada penelitian ini dicoba untuk menggali persepsi masyarakat Desa Jegong tentang siapa yang sebaiknya mengelola hutan. Hasil penelitian terhadap persepsi ini dapat dilihat pada **Tabel 27** berikut ini.

Tabel 27. Persepsi responden terhadap institusi pengelola hutan.

No.	Persepsi terhadap institusi pengelola hutan	Jumlah responden	%
1	Dikelola oleh Perhutani saja	14	5,6
2	Dikelola oleh masyarakat desa saja	13	5,2
3	Dikelola Perhutani bersama masyarakat desa	222	88,8
4	Tidak tahu	1	0,4
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Tabel diatas menunjukan bahwa ternyata sebagian besar (88,8 %) masyarakat Desa Jegong lebih memilih pengelolaan hutan dilakukan bersama antara Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Jegong membenarkan hal tersebut. Sebagian besar dari mereka mengharapkan pengelolaan hutan sebaiknya diselenggarakan bersama oleh Perhutani dan masyarakat secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masyarakat desa hutan juga mengakui apabila pengelolaan hutan diserahkan secara penuh kepada masyarakat desa, mereka merasa tidak mampu karena pengetahuan mengenai cara pengelolaan hutan tidak mereka miliki serta tidak adanya sumberdaya manusia di Desa Jegong yang dapat melakukannya dengan baik.

Responden yang menyatakan agar hutan tetap dikelola oleh Perhutani saja beralasan bila kegiatan tersebut diserahkan kepada masyarakat akan menjadi beban masyarakat, sedangkan responden yang menyatakan agar hutan dikelola hanya oleh masyarakat desa, mempunyai kecenderungan hanya melihat pada keuntungan ekonomi saja. Jumlah responden dengan kedua jawaban tersebut di atas jumlahnya relatif sedikit, yaitu sebesar 10,8 % saja.

Untuk memenuhi persyaratan itu, masyarakat Desa Jegong harus membentuk kelompok yang nantinya mengadakan kerjasama dengan Perhutani. Proses pembentukan kelompok dimulai pada awal bulan Maret 2002, dengan mengadakan serangkaian musyawarah yang diselenggarakan perwakilan masyarakat desa Jegong, terdiri dari perwakilan Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Kelompok tani hutan, kepala dukuh, dan beberapa pegawai negeri yang tinggal di desa Jegong.

Pada pertengahan bulan Maret 2002 mereka berhasil membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diberi nama "Wana Lestari". Berdasarkan wawancara dengan pengurus LMDH Wana Lestari, secara aklamasi peserta musyawarah menunjuk M. Kasran sebagai ketua LMDH. Alasan warga masyarakat memilih Moh. Kasran karena yang bersangkutan dinilai masyarakat merupakan figur yang jujur dan bersih mengingat profesinya sebagai guru agama sekaligus takmir masjid. Pada awalnya Moh. Kasran agak keberatan, karena tugas pokoknya sebagai guru di sebuah Sekolah Dasar telah banyak menyita waktunya, dan ia merasa kurang pandai dalam berbicara Namun atas desakan warga ia akhirnya bersedia menerima tanggung jawab tersebut.

Untuk menangani kegiatan PHBM, ketua LMDH dibantu oleh Wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yaitu Seksi Humas, Seksi Keamanan, Seksi Usaha, Seksi Pemasaran Hasil Usaha, Seksi Olahraga, Seksi Agama, dan Seksi Produksi. Kepala Desa Jegong dalam kepengurusan LMDH bertindak sebagai Pelindung. Pengurus LMDH terdiri dari 34 orang yang terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, Badan Perwakilan Desa, takmir masjid, Karang taruna, Kepala Dukuh, perangkat desa, guru dan pegawai negeri yang tinggal di Desa Jegong. Pengurus LMDH ini sudah dianggap mewakili masyarakat Desa Jegong secara keseluruhan.

Berdasar wawancara penulis dengan pengurus LMDH, Kepala Desa Jegong pada waktu itu sempat menyampaikan usulan personil kepengurusan LMDH. Ia mencoba menempatkan orang dekatnya pada posisi bendaharawan. Namun karena orang yang diusulkan kepala desa reputasinya kurang baik, Ketua LMDH Wana Lestari dan beberapa anggota pengurus lainnya tidak sependapat dengan usul tersebut, dan menggantinya dengan orang yang menurutnya lebih tepat. Penolakan ini merupakan salah satu friksi yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan kepala desa dengan LMDH di kemudian hari.

Agar Lembaga Masyarakat Desa Hutan dapat melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan institusi lain maka harus berbentuk badan hukum yang dikukuhkan dengan akta notaris. Konsep akta pendirian disiapkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Perhutani Unit I Jawa Tengah kemudian dibahas bersama dengan pengurus LMDH. Setelah konsep disepakati, kemudian diserahkan kepada notaris untuk dikoreksi agar sesuai bahasa dengan hukum.

LMDH Wana Lestari dikukuhkan secara hukum di depan notaris dengan Akta Notaris Liembang Priyadi Daljono SH tanggal 10 April 2002 No. 61 tentang pendirian Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan "Wana Lestari" Pengukuhan dihadiri oleh ketua LMDH Wana Lestari didampingi tiga orang pengurus LMDH dengan disaksikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Wakil dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Dengan pengukuhan ini maka LMDH sudah dapat melakukan tindakan-tindakan dan hubungan hukum dengan berbagai institusi yang terkait dengan kegiatan LMDH.

Pada pengelolaan sumberdaya hutan dalam sistem PHBM, Perhutani dan masyarakat desa hutan diberi kesempatan yang cukup besar untuk berkolaborasi. Kunci utamanya adalah adanya jiwa berbagi dalam pelaksanaannya. Dalam jiwa berbagi terkandung tuntutan kepada semua

pihak untuk berbagi peran, kewajiban, dan tanggung jawab, serta berbagi kemanfaatan (mengedepankan asas manfaat). Bentuknya dapat berupa berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi pemanfaatan waktu, serta berbagi pemanfaatan hasil. Untuk mengetahui persepsi keinginan masyarakat tentang peran dan keterlibatan LMDH dalam PHBM dapat diperiksa **Tabel 28** dibawah ini

Tabel 28. Persepsi responden mengenai keterlibatan LMDH dalam kegiatan PHBM.

No	Keterlibatan LMDH dalam PHBM	Jumlah responden	%
1	Kegiatan penanaman/tumpangsari	79	31,6
2	Kegiatan Penanaman, pemeliharaan dan penebangan	41	16,4
3	Sejak perencanaan sampai pengawasan	130	52,0
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Tabel 28 diatas menunjukkan bahwa 52% dari responden menghendaki keterlibatan LMDH dalam PHBM meliputi seluruh kegiatan pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan sampai pengawasannya. Namun demikian sebagian responden tetap menginginkan keterlibatan yang terbatas, yaitu tanaman, pemeliharaan dan tebangan saja. Persepsi diatas menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami PHBM.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat berupaya agar potensi sumber dayanya dapat mencapai manfaat optimal. Agar supaya hasil optimal tersebut memberi keuntungan yang layak bagi kedua belah pihak. dengan adil, maka sistem pengelolaan ini harus tepat dalam memenuhi persyaratan kerjasama saling menguntungkan.

Hasil observasi dan evaluasi terhadap kelembagaan LMDH Wana Lestari, ternyata kegiatan lembaga ini belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan:

- a. Pada kenyataannya kegiatan penanaman hutan (reboisasi) yang dilakukan Perhutani di hutan pangkuan Desa Jegong, kecuali tahun tanam 2002 (karena LMDH mendapat bantuan bibit jagung dan pupuk dari Dinas Kehutanan) tidak melalui LMDH melainkan langsung kepada masyarakat sebagai pesanggem sebagaimana sebelum diterapkannya PHBM.
- b. Dalam kegiatan penjarangan tanaman dan penebangan sama sekali tidak melibatkan LMDH, baik pelaksanaannya maupun pengawasannya.

Tidak optimalnya LMDH tersebut menimbulkan kesan bawa lembaga ini hanya untuk mendapatkan legitimasi dalam memenuhi persyaratan kerjasama dengan Perhutani dalam PHBM. LMDH lebih tertarik kepada adanya bagi hasil yang akan mereka terima dari Perhutani daripada mengembangkan kegiatan dan usaha lain, padahal bentuk badan hukum yang dimiliki LMDH membuka kesempatan untuk itu. Semua ini sebagai akibat dari perencanaan PHBM di Desa Jegong lebih bersifat *top down* dan sinoptik.

5.1.2.4 Perjanjian kerjasama.

Kerjasama antara LMDH dengan Perum Perhutani merupakan inti dari pelaksanaan PHBM, karena hak dan kewajiban yang menyangkut pengelolaan sumberdaya hutan secara bersama, tertuang dalam naskah ini. Konsep naskah Perjanjian kerjasama dibuat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dengan Perhutani Unit I Jawa Tengah yang mencakup dasar perjanjian, definisi, obyek perjanjian, ketentuan teknis, status dan penguasaan lahan, kontribusi pemerintah propinsi, pihak-pihak yang berkepentingan, ketentuan berbagi hasil kayu, ketentuan berbagi hasil non kayu, penyelesaian perselisihan, perubahan dan ketentuan penutup. Konsep

ini kemudian diserahkan kepada LMDH Wana Lestari untuk mendapat persetujuan.

Pada prinsipnya LMDH Wana Lestari bersedia membuat perjanjian kerjasama dengan Perhutani karena mereka setuju dan siap untuk mengelola hutan bersama Perhutani. Alasan mereka menyetujui adanya PHBM di Desa Jegong dapat dilihat pada **Tabel 29** di bawah ini:

Tabel 29. Alasan responden menyetujui penerapan PHBM di Desa Jegong.

No	Alasan setuju	Jumlah responden	%
1	PHBM akan dapat meningkatkan kesejahteraan	199	85,0
2	PHBM merupakan program pemerintah	22	9,4
3	Ikut-ikutan saja	11	4,7
4	Lainnya	2	0,9
Jumlah		234	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Data pada tabel 29 diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan PHBM di Desa Jegong telah membentuk persepsi pada sebagian besar masyarakat (85,0%) bahwa PHBM akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Persepsi positif ini harus dipertahankan dengan cara membuktikan bahwa apa yang mereka harapkan dapat diwujudkan dikemudian hari.

Responden yang menyatakan ketidak setujuannya dengan penerapan PHBM di Desa Jegong mempunyai alasan bahwa masyarakat tidak akan mampu mengelola hutan, PHBM hanya akan membebani masyarakat desa serta PHBM tidak ada gunanya bagi masyarakat desa. Jumlah responden ini hanya 5 orang atau 2,0% dari seluruh responden.

Proses pembahasan dimulai dengan pemaparan konsep perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dihadapan pengurus LMDH Wana Lestari, Camat Jati, petugas Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, petugas Perhutani KPH Randublatung dan dan Petugas Perhutani Unit I Jawa Tengah. Hal-hal yang dibahas secara mendalam adalah mengenai besarnya bagi hasil kayu dan jangka waktu kerjasama. Masyarakat menghendaki agar tata cara dan besarnya bagi hasil dapat diselesaikan dengan musyawarah antara Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan pengurus LMDH. Pasal 21 Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perhutani selaku Pengurus Perusahaan tanggal 29 Maret 2001 No.: 136/Kpts/Dir/2001 menyatakan bahwa nilai dan proporsi bagi hasil ditetapkan oleh perusahaan dan masyarakat desa hutan pada saat menyusun naskah perjanjian kerja sama. Perhutani tidak berani menetapkan besarnya bagi hasil, karena pedoman bagi hasil pada waktu pembahasan itu belum ada dan mereka berpendapat ketentuan dalam pasal 21 Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perhutani selaku Pengurus Perusahaan tanggal 29 Maret 2001 No : 136/Kpts/Dir/2001 masih terlalu umum.

Pembahasan tentang bagi hasil ini menjadi berlarut larut, padahal tata cara dan besarnya bagi hasil kayu harus dimasukkan dalam perjanjian kerjasama. Agar penyelesaian draft perjanjian kerjasama tidak terhambat karena masalah bagi hasil, Perhutani Unit I Jawa Tengah secara intensif mengadakan konsultasi dengan Direksi Perum Perhutani Jakarta. Masalah ini akhirnya dapat diatasi dengan telah diterimanya Keputusan Direksi Perum Perhutani yang bertanggal 2 Januari 2002 No : 001/Kpts/Dir/2002, tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Adanya Peraturan ini menyebabkan masyarakat Desa Jegong akhirnya dapat menerima tata cara dan besarnya bagi hasil tersebut, karena sudah ditetapkan dari "atas".

Naskah perjanjian kerjasama akhirnya disepakati oleh pengurus LMDH Wana Lestari dan Perhutani dengan materi meliputi :

- a. Luas dan letak hutan pangkuan desa Jegong.
- b. Ketentuan teknis kehutanan yang harus ditaati.
- c. Status dan penguasaan lahan tetap pada Perhutani.
- d. Hak dan kewajiban LMDH dan Perhutani dalam melaksanakan PHBM di Desa Jegong.
- e. Penggunaan bantuan dari pemerintah daerah/ Dinas Kehutanan pada tahun pertama kegiatan PHBM.
- f. Para pihak yang berkepentingan.
- g. Ketentuan dan mekanisme berbagi hasil kayu hasil eksploitasi hutan pangkuan Desa Jegong.
- h. Sanksi-sanksi yang dikenakan apabila Perhutani atau LMDH melakukan penyimpangan dalam kerjasama ini.

Pada tanggal 28 Mei 2002 Perum Perhutani KPH Randublatung dan LMDH "Wana Lestari" menandatangani perjanjian kerja sama tersebut didepan notaris Notaris Liembang Priyadi Daljono, SH dan dikukuhkan dengan akta No. 255 tentang Perjanjian Kerjasama antara PT. Perhutani (Persero) KPH Randublatung dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Desa Jegong, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini disaksikan oleh Wakil Gubernur Bidang I Jawa Tengah dan Bupati Blora.

Perjanjian kerja sama antara Perhutani dengan LMDH Wana Lestari yang ditandatangani dihadapan notaris pada tanggal 28 Mei 2002 merupakan ikatan formal dari kedua lembaga tersebut. Hubungan hukum yang tercantum dalam naskah kerjasama merupakan komitmen yang harus dipegang oleh kedua belah pihak, dan membawa akibat sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Meskipun tercapainya kesepakatan naskah kerjasama ini melalui pembahasan bersama dengan semua pihak yang terkait, namun karena konsep awal dibuat oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Perhutani Unit I Jawa Tengah akibatnya isi perjanjian kerjasama tersebut

lebih condong kepada kepentingan kehutanan. Berdasarkan observasi sewaktu pembahasan naskah kerjasama, perhatian pengurus lebih tertuju pada cara dan besarnya bagi hasil yang akan diterima LMDH, sehingga agak mengabaikan substansi lain. Akibatnya pemahaman pengurus dan anggota LMDH terhadap isi naskah (selain yang berhubungan dengan bagi hasil) tidak mendalam.

Pelanggaran nyata yang dilakukan oleh Perhutani terhadap isi naskah perjanjian kerjasama namun dibiarkan oleh LMDH Wana Lestari adalah tidak mengikut sertakan LMDH pada kegiatan penjarangan dan penebangan tahun 2002 dan seluruh kegiatan teknis kehutanan pada tahun 2003. Berdasarkan wawancara penulis dengan pengurus LMDH, mereka membenarkan hal tersebut. Bahkan mereka mengatakan bahwa pada kegiatan penebangan, Perhutani Randublatung menggunakan tenaga borongan dari luar desa Jegong mulai dari penebangan pohon, penyaradan kayu sampai pada angkutan kayu dari petak tebangan menuju ke Tempat Penimbunan Kayu. Padahal dalam naskah kerjasama pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa *Pengelolaan hutan bersama antara para pihak meliputi kegiatan pelestarian fungsi dan manfaat hutan mulai dari perencanaan , penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan.*

Pelanggaran ini menurut observasi peneliti nampaknya tidak terlalu dipersoalkan oleh LMDH, dan tampaknya LMDH lebih terbuai oleh bagi hasil yang diterimanya. Akibatnya partisipasi LMDH dalam kegiatan PHBM hanya bersifat tokenism yang pada gilirannya berakibat pula pada ketidakberhasilan program PHBM.

5.1.2.5 Pembentukan Forum Komunikasi.

Sesuai dengan bunyi pasal 19 Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perhutani selaku Pengurus Perusahaan tanggal 29 Maret 2001 No : 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan . Bersama

Masyarakat dan pasal 16 Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 September 2001 No : 24 Tahun 2001, tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah, dibentuk Forum komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada berbagai tingkatan:

- a. Provinsi Jawa Tengah, dengan Keputusan Gubernur Jateng tanggal 18 Mei 2001 No : 522/21/2002, Tentang Forum Komunikasi PHBM Propinsi Jawa Tengah.
- b. Kabupaten Blora, dengan Keputusan Bupati Blora tanggal 31 Desember 2001 No : 522/1992/2001 tentang Pembentukan Forum Komunikasi PHBM Kabupaten Blora.
- c. Kecamatan Jati, dengan Keputusan Camat Jati tanggal 16 Oktober 2002 No. 522/459/2002 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kecamatan Jati.
- d. Desa Jegong, dengan Keputusan Kepala Desa Jegong tanggal 5 April 2002 No. 001/KPTS/ 04/2002 tentang Forum Komunikasi Tingkat Desa

Maksud dibentuknya Forum Komunikasi PHBM ini adalah:

- a. Untuk mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dengan menselaraskan kepentingan perusahaan, Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan.
- b. Untuk mendukung keberhasilan program PHBM.

Forum Komunikasi PHBM yang dibentuk Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blora, Camat Jati dan Kepala Desa Jegong beranggotakan pimpinan instansi pemerintah yang terkait dengan bidang kerja kehutanan namun sejak diterbitkannya keputusan pembentukannya sampai bulan April 2004 dapat dikatakan belum mengadakan kegiatan yang berarti.

Evaluasi dan observasi terhadap kegiatan Forum Komunikasi PHBM yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah, Bupati Blora, Camat Jati dan

Kepala Desa Jegong sejak diterbitkannya keputusan pembentukannya sampai bulan April 2004 dapat dikatakan tidak melakukan kegiatan yang berarti. Padahal kegiatan forum ini diperlukan untuk mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya PHBM, mendukung keberhasilan program PHBM serta mengadakan pemantauan dan evaluasi .

Faktor-faktor yang menyebabkan Forum Komunikasi PHBM tidak aktif adalah:

- a. Forum Komunikasi PHBM tidak pernah membuat rencana kerja, sehingga tidak jelas apa yang akan dikerjakan.
- b. Forum komunikasi PHBM tidak memiliki sumber dana yang jelas untuk melakukan kegiatannya.
- c. Keanggotaan Forum komunikasi PHBM terdiri dari pemimpin-pemimpin instansi pemerintahan yang telah disibukan dengan tugas pokoknya sehingga curah waktu untuk PHBM dapat dikatakan tidak ada.

Akibat dari ini semua PHBM Wana Lestari seolah berjalan sendiri. LSM "Obor" yang mendampingi LMDH Wana Lestari juga tidak terlalu efektif karena LSM ini bertugas mendampingi seluruh LMDH yang ada di KPH Randublatung. Petugas Perhutani yang ada di lapangan pun sangat kurang dalam membimbing LMDH karena kesibukan tugas pokoknya. Masalah ini sempat terlontar sewaktu wawancara dengan salah seorang pengurus LMDH yang mempertanyakan keaktifan birokrasi dalam memfasilitasi PHBM. Dikhawatirkan apabila ini berlangsung terus, maka program PHBM tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

5.1.2.6 Kegiatan LMDH.

a. Keanggotaan.

Setiap organisasi baik formal maupun informal selalu memandang penting partisipasi masyarakat dalam keanggotaan dan loyalitas anggotanya.

Semakin tinggi partisipasinya semakin tinggi kecenderungan mereka menunjukan loyalitas, Pada gilirannya loyalitas akan menghasilkan ikatan kelompok dan ikatan kelompok ini akan mengakibatkan para anggota tetap setia sebagai anggota organisasi.

Bentuk awal dari partisipasi warga desa dalam kegiatan PHBM adalah menjadi anggota LMDH. Purwadi (2004) dalam makalahnya berjudul Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Randublatung yang disampaikan di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor pada tanggal 26 Februari 2004 menyatakan bahwa pada tahun 2004 seluruh warga masyarakat Desa Jegong atau sekitar 2.500 orang menjadi anggota LMDH. Akan tetapi berdasar hasil penelitian yang dituangkan pada **Tabel 30** di bawah ini ternyata tidak semua responden mengaku sebagai anggota LMDH.

Tabel 30. Keanggotaan responden dalam LMDH.

No	Keanggotaan	Jumlah responden	%
1	Menjadi anggota LMDH	137	54,8
2	Tidak menjadi anggota LMDH	113	45,2
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data Primer, 2004.

Tabel 30 di atas menunjukan hanya sebanyak 54,8% dari responden yang menjadi anggota LMDH, sedangkan sisanya sebanyak 45,2% menyatakan mereka bukan anggota LMDH.

Alasan seseorang menjadi anggota LMDH dapat menentukan tingkat partisipasinya pada kegiatan dalam organisasi tersebut. Alasan responden menjadi anggota LMDH dapat dilihat pada **tabel 31** di bawah ini.

Tabel 31. Alasan responden menjadi anggota LMDH.

No	Alasan menjadi anggota LMDH	Jumlah responden	%
1	Atas kemauan sendiri	93	67,9
2	Keuntungan materi	16	11,7
3	Diminta pamong desa/pengurus LMDH/petugas Perhutani	20	14,6
4	Hanya ikut-ikutan	8	5,8
Jumlah		137	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Alasan responden untuk menjadi anggota LMDH atas kemauan sendiri cukup besar, yaitu 67,9%. Dalam tangga partisipasi alasan seperti ini menduduki tangga yang teratas, dan merupakan partisipasi yang sesungguhnya. Sisanya menyatakan bahwa alasan menjadi anggota karena diminta oleh petugas (Desa atau Perhutani) sebanyak 14,6%, alasan karena adanya insentif ekonomi sebesar 11,7% dan menjadi anggota hanya karena ikut-ikutan sebesar 5,8%. Menjadi anggota LMDH dengan alasan-alasan tersebut hanya akan melahirkan partisipasi yang bersifat tokenism bukan partisipasi sejati.

Untuk mendapatkan alasan responden yang tidak menjadi anggota LMDH, **Tabel 32** dibawah ini dapat memberikan informasi tentang alasan responden tersebut.

Tabel 32. Alasan responden tidak menjadi anggota LMDH.

No	Alasan tidak menjadi anggota LMDH	Jumlah responden	%
1	Tidak tahu	101	89,4
2	Tidak bermanfaat	8	7,1
3	Lainnya	4	3,5
Jumlah		113	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Informasi yang dapat diambil dari tabel 32 di atas menunjukkan sebagian besar responden (89,4%) tidak menjadi anggota LMDH karena tidak mengetahui akan adanya LMDH di desanya. Hanya sebanyak 10,6% diantaranya mengatakan bahwa LMDH tidak bermanfaat bagi mereka atau tidak diajak ikut LMDH.

Untuk mengetahui apakah keikutsertaan responden tersebut ada kaitannya dengan domisili responden, dapat digunakan analisis Tabulasi silang sebagaimana **tabel 33** di bawah ini.

Tabel 33. Tabulasi silang antara domisili responden dengan keikutsertaan menjadi anggota LMDH.

No.	Domisili	Anggota	Bukan anggota	Jumlah
1	Besi	24 (9,6%)	61 (24,4%)	85 (34,0%)
2	Jegong	56 (22,4%)	4 (1,6%)	60 (24,0%)
3	Kemadoh	43 (17,2%)	20 (8,0%)	63 (25,2%)
4	Bumirejo	14 (5,6%)	28 (11,2%)	42 (6,8%)
Jumlah		137 (54,8%)	113 (45,2%)	250 (100,0%)

Sumber: Data primer, 2004.

Uji *chi-square* menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kedua variabel tersebut pada tingkat kepercayaan 95%, ditunjukkan oleh *asympt.sig* sebesar 0,00 yang nilainya lebih kecil dari α 0,05. Artinya domisili responden mempunyai keterkaitan dengan keanggotaan LMDH. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa responden dari Dukuh Besi dan Bumirejo lebih banyak yang menyatakan tidak menjadi anggota LMDH dibanding Dukuh Jegong dan kemadoh.

b. Kegiatan organisasi.

Di samping keanggotaan dalam LMDH, kehadiran anggota dalam pertemuan yang diselenggarakan organisasi dipandang penting, karena tanpa kehadiran anggota LMDH tidak mungkin dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan organisasi dengan baik. Kehadiran anggota, terlebih lagi pengurus LMDH dalam pertemuan selapanan LMDH yang diadakan setiap 35 hari sekali merupakan indikator besarnya partisipasi mereka terhadap kegiatan LMDH. **Tabel 34** di bawah ini menunjukkan besarnya tingkat kehadiran responden dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan.

Tabel 34. Tingkat kehadiran responden dalam pertemuan-pertemuan LMDH.

No.	Tingkat kehadiran dalam pertemuan LMDH	Jumlah responden	%
1	Selalu hadir	51	37,2
2	Sering hadir (lebih dari 50% pertemuan)	19	13,9
3	Kadang-kadang hadir (sekitar 50% pertemuan)	42	30,7
4	Jarang hadir (kurang dari 50% pertemuan)	13	9,5
5	Tidak pernah hadir	12	8,9
Jumlah		137	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Dari data pada Tabel 34 di atas kehadiran responden dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan belum menggembirakan, hanya sebanyak 37,2 % responden yang menyatakan hadir secara rutin. Bahkan sebanyak 30,7% responden menyatakan hanya kadang-kadang hadir. Angka ini menunjukkan rendahnya tingkat kehadiran anggota LMDH dalam pertemuan.

Sesuai dengan AD dan ART LMDH Wana Lestari, pengurus LMDH mempunyai tugas antara lain memimpin rapat rutin, sehingga kehadiran pengurus dalam setiap pertemuan-pertemuan LMDH penting artinya. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara kehadiran pengurus dan anggota dalam pertemuan yang diselenggarakan LMDH Wana Lestari, dapat digunakan tabulasi silang seperti yang disajikan pada **tabel 35** di bawah ini.

Tabel 35. Tabulasi silang antara kedudukan responden dengan kehadiran dalam pertemuan.

No.	Kedudukan	Kehadiran					Jumlah
		selalu	sering	Kadang-kadang	jarang	Tidak pernah	
1	Pengurus	10 (7,3%)	3 (2,2%)	3 (2,2%)	3 (2,2%)	0 (0,0%)	19 (13,9%)
2	Anggota	41 (29,9%)	16 (11,7%)	39 (28,5%)	10 (7,2%)	12 (8,8%)	118 (86,1%)
Jumlah		51 (37,2%)	19 (13,9%)	42 (30,7%)	13 (9,4%)	12 (8,8%)	137 (100,0%)

Sumber: Data primer, 2004.

Berdasarkan uji *chi-square* pada tingkat kepercayaan 95% ternyata tidak ada keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Hal ini dapat dilihat dari nilai *asympt.sig* sebesar 0,206 yang nilainya lebih besar dari α 0,05. Artinya

pengurus maupun anggota tidak mempunyai perbedaan dalam tingkat kehadiran dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan.

Mengenai apakah ada keterkaitan perbedaan domisili responden dengan kehadiran dalam pertemuan, dapat dianalisis dengan tabulasi silang sebagaimana **tabel 36** di bawah ini.

Tabel 36. Tabulasi silang antara domisili responden dengan kehadiran dalam pertemuan.

No.	Domisili	Kehadiran					Jumlah
		Selalu	sering	Kadang-kadang	jarang	Tidak pernah	
1	Besi	10 (7,3%)	3 (2,2%)	7 (5,1%)	3 (2,2%)	1 (0,7%)	24 (17,5%)
2	Jegong	17 (12,4%)	8 (5,8%)	20 (14,6%)	5 (3,7%)	6 (4,4%)	56 (40,9%)
3	Kemadoh	14 (10,2%)	7 (5,1%)	12 (8,8%)	5 (3,6%)	5 (3,7%)	43 (31,4%)
4	Bumirejo	10 (7,3%)	1 (0,7%)	3 (2,2%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	14 (10,2%)
Jumlah		51 (37,2%)	19 (13,8%)	42 (30,7%)	13 (9,5%)	12 (8,8%)	137 (100,0%)

Sumber: Data primer, 2004.

Dari hasil *uji chi-square* menunjukkan tidak ada keterkaitan antara variabel domisili responden dengan tingkat kehadiran responden pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan LMDH Wana Lestari. Hal tersebut terlihat dari nilai *asympt.sig* sebesar 0,497 yang lebih besar dari α

0,05, berarti bahwa domisili responden tidak mempengaruhi kehadiran anggota dalam pertemuan-pertemuan LMDH.

Bentuk partisipasi lain dalam LMDH adalah keaktifan anggota dalam mengajukan usul/pendapat pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan. **Tabel 37** di bawah ini memberikan informasi mengenai aktifitas responden LMDH dalam menyampaikan usul-usul yang berkaitan dengan kegiatan LMDH.

Tabel 37. Aktivitas responden dalam mengajukan usul pada pertemuan LMDH.

No.	Mengajukan usul dalam pertemuan	Jumlah responden	%
1	Selalu	4	2,9
2	Sering	15	10,9
3	Kadang-kadang	50	36,5
4	Jarang	26	19,0
5	Tidak pernah	42	30,7
Jumlah		137	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Tabel 37 di atas menunjukan bahwa ternyata hanya sebagian kecil saja responden yang aktif dalam menyampaikan usul-usul dalam pertemuan-pertemuan LMDH. Hal ini dapat dilihat hanya 2,9% saja dari responden yang menyatakan selalu menyampaikan usul-usul dalam pertemuan, dan hanya 10,9% yang mengatakan bahwa mereka sering menyampaikan usul. Sisanya sebanyak 55,5% menyatakan hanya kadang-kadang dan jarang mengajukan usul, bahkan 30,7% mengatakan tidak pernah.

Untuk mengetahui pengetahuan tentang LMDH dan PHBM, pada **tabel 38** berikut ini hubungan disajikan tingkat pengetahuan anggota LMDH tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM.

Tabel 38. Tingkat pengetahuan dan keaktifan responden berkaitan dengan rencana kerja dan cara pelaksanaan LMDH

No.	Pengetahuan dan aktivitas	Ya	Tidak	Jumlah
1	Mengetahui adanya rencana kerja LMDH	108 (78,8%)	29 (21,2%)	137 (100,0%)
2	Pernah membaca Rencana Kerja LMDH	61 (44,5%)	76 (55,5%)	137 (100,0%)
3	Pernah mendapat penjelasan tentang Rencana kerja LMDH	115 (83,9%)	22 (16,1%)	137 (100,0%)
4	Pernah mendapat penjelasan tentang cara pelaksanaan PHBM	112 (81,8%)	25 (18,2%)	137 (100,0%)

Sumber: Data primer, 2004.

Data pada tabel 38 menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengetahui adanya rencana kerja dan telah pula mendapat penjelasan tentang rencana kerja LMDH serta cara pelaksanaan PHBM. Hal ini dapat diketahui bahwa sebanyak 108 responden (78,8%) mengetahui adanya rencana kerja, 115 responden (83,9%) menyatakan pernah mendapat penjelasan tentang rencana kerja dari pengurus dan 112 responden (81,8%) telah pernah mendapat penjelasan mengenai cara melaksanakan PHBM. Responden yang pernah membaca sendiri rencana kerja LMDH relatif kecil, dinyatakan hanya oleh 61 responden atau 44,5% saja.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat berupaya agar potensi sumber dayanya dapat mencapai manfaat optimal. Agar supaya hasil optimal

tersebut memberi keuntungan yang layak bagi kedua belah pihak. dengan adil, maka sistem pengelolaan ini harus tepat dalam memenuhi persyaratan kerjasama saling menguntungkan.

Persepsi mengenai ketepatan sistem PHBM di Desa Jegong yang telah berjalan 2 tahun dapat dilihat pada Tabel 39 di bawah ini.

Tabel 39. Persepsi responden mengenai ketepatan sistem PHBM

No	Ketepatan PHBM	Jumlah responden	%
1	Sudah tepat	137	54,8
2	Perlu penyempurnaan	110	44,0
3	Tidak tepat	3	1,2
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Sebagian responden (54,8%) menyatakan bahwa sistem PHBM sudah tepat, namun cukup banyak (44,0%) yang menyatakan masih perlu penyempurnaan. Responden yang menyatakan tidak tepat hanya sebesar 1,2% saja. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Desa Jegong dapat menerima sistem PHBM yang dilaksanakan di desanya dengan penyempurnaan.

Dengan melihat data ini, dapat dikatakan bahwa pada umumnya para responden telah banyak mengetahui mengenai LMDH dan PHBM, namun masih perlu ditingkatkan dengan sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif.

Untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara pengetahuan responden tentang LMDH dan PHBM sehubungan dengan perbedaan tingkat

pendidikan dan domisili, di bawah ini disajikan nilai *asyp.sig* (P) yang didapat dari perhitungan uji *chi-square* antara tingkat pendidikan dan domisili responden dengan pengetahuan responden dalam kaitannya dengan rencana kerja dan cara melaksanakan PHBM.

Tabel 40. Hubungan antara tingkat pendidikan responden dengan pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM

No.	Pengetahuan dan aktivitas	<i>Asymp.sig</i>	Keterkaitan
1	Mengetahui adanya rencana kerja LMDH	0,979	Tidak
2	Pernah membaca Rencana Kerja LMDH	0,535	Tidak
3	Pernah mendapat penjelasan tentang Rencana kerja LMDH	0,689	Tidak
4	Pernah mendapat penjelasan tentang cara pelaksanaan PHBM	0,692	Tidak

Sumber: Perhitungan uji chi-square

Uji chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% atau α 0,05 terhadap hubungan antara pendidikan responden dengan pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan antara tingkat pendidikan responden dengan pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM.

Untuk menganalisis hubungan antara domisili responden dengan pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM nilai *asyp.sig* (P) dari hasil uji *chi-square*, dapat dilihat pada **tabel 41** berikut ini.

Tabel 41. Hubungan antara domisili responden dengan pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM

No.	Pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM	<i>Asymp.sig</i>	Keterkaitan
1	Mengetahui adanya rencana kerja LMDH	0,026	Ya
2	Pernah membaca Rencana Kerja LMDH	0,006	Ya
3	Pernah mendapat penjelasan tentang Rencana kerja LMDH	0.009	Ya
4	Pernah mendapat penjelasan tentang cara pelaksanaan PHBM	0,125	Tidak

Sumber: Perhitungan uji chi-square

Uji *chi-square* dengan tingkat kepercayaan 95% atau α 0,05 terhadap hubungan antara domisili responden dengan pengetahuan tentang rencana kerja LMDH dan cara pelaksanaan PHBM ternyata menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan mengenai rencana kerja LMDH sehubungan dengan domisili responden. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa ada kesenjangan pengetahuan tentang rencana kerja pada dukuh, namun tidak ada perbedaan dalam pengetahuan mengenai cara pelaksanaan PHBM pada semua domisili (dukuh). Hal ini dimungkinkan karena para anggota telah terbiasa akan pekerjaan lapangan

Bentuk partisipasi anggota dalam kegiatan LMDH lainnya adalah sumbangan anggota kepada kegiatan LMDH. Sumbangan-sumbangan ini tidak terbatas berupa uang saja tetapi juga berwujud tenaga, pemikiran

maupun materi. Pada **tabel 42** dibawah ini disajikan besarnya partisipasi responden dalam memberikan sumbangan kepada LMDH.

Tabel 42. Tingkat partisipasi responden memberi sumbangan untuk kegiatan LMDH.

No	Sumbangan terhadap LMDH	Jumlah responden	%
1	Ada	94	68,6
2	Tidak ada	43	31,4
Jumlah		137	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Data diatas menunjukan bahwa 94 responden (68,6%) menyebutkan telah memberikan sumbangan kepada LMDH, sedangkan sisanya sebanyak 43 responden (31,4%) menyatakan bahwa mereka merasa belum ada sumbangan untuk LMDH. Bentuk sumbangan yang telah diberikan oleh responden kepada LMDH dapat dilihat pada **tabel 43** di bawah ini.

Tabel 43. Bentuk sumbangan yang diberikan responden kepada LMDH.

No	Bentuk sumbangan	Jumlah responden	%
1	Tenaga	67	71,3
2	Pemikiran	19	20,2
3	Barang/benda	3	3,2
4	Uang	5	5,3
Jumlah		94	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Data pada tabel 43 diketahui bahwa bentuk sumbangan dari responden yang terbesar adalah berupa tenaga (71,3%) disusul dengan

sumbangan berupa pemikiran (20,2%). Sumbangan berupa uang dan barang/benda yang pernah diberikan hanya sebesar 5,3% dan 3,2% saja. Hal ini dapat dimaklumi karena adanya keterbatasan-keterbatasan materi yang dimiliki oleh penduduk Desa Jegong berupa uang dan barang. Kehidupan di perdesaan masyarakat biasanya siap menyumbangkan non materi terutama tenaga.

Selain sumbangan, bentuk partisipasi lain adalah aktivitas dari anggota dalam memanfaatkan kegiatan yang diselenggarakan LMDH dan PHBM. Untuk mengetahui berapa besar partisipasi anggota LMDH dalam ikut memanfaatkan kegiatan LMDH maupun PHBM, dapat memeriksa **tabel 44** dibawah ini.

Tabel 44. Tingkat partisipasi responden berupa pemanfaatan pada kegiatan LMDH dan PHBM.

No	Ikut memanfaatkan kegiatan LMDH dan PHBM	Jumlah responden	%
1	Pernah	79	57,7
2	Tidak pernah	58	42,3
Jumlah		137	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Dari 137 responden anggota LMDH ternyata hanya sebanyak 57,7% dari responden menyatakan pernah ikut dalam memanfaatkan kegiatan LMDH dan PHBM. Adapun bentuk pemanfaatan yang dilakukan dapat dilihat pada **tabel 45** dibawah ini.

Tabel 45. Bentuk pemanfaatan responden pada kegiatan LMDH dan PHBM.

No	Bentuk pemanfaatan	Jumlah responden	%
1	Memanfaatkan modal LMDH	32	40,5
2	Memanfaatkan lahan hutan	47	59,5
Jumlah		79	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Bentuk pemanfaatan LMDH berupa modal dari LMDH dalam bentuk pinjaman uang dari usaha simpan pinjam dinyatakan oleh 40,5% dari anggota, sedangkan 59,5% lainnya berupa pemanfaatan lahan hutan.

Bentuk pemanfaatan yang besar ada pada ikut memanfaatkan lahan hutan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, pemanfaatan lahan hutan ini dilakukan oleh anggota LMDH yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Kelompok tani hutan ini memanfaatkan lahan hutan bekas tebangan sebagai pesanggem yang bercocok tanam palawija di sela-sela tanaman pokok kehutanan yaitu Jati.

Berdasar observasi dan wawancara dengan pengurus LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan "Wana Lestari" mengadakan kegiatan organisasi berupa pertemuan setiap 35 hari sekali (*selapanan*) yang jatuh pada setiap hari Minggu kliwon dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha simpan pinjam pada tanggal 5 tiap bulannya. Pertemuan yang biasanya dihadiri oleh Pengurus LMDH dan perwakilan anggota selalu mengambil tempat di Sekretariat LMDH yang masih menggunakan rumah tinggal Moh. Kasran (Ketua LMDH), karena LMDH belum mempunyai tempat sekretariat sendiri. Pertemuan rutin diselenggarakan untuk membahas beberapa topik rencana kegiatan, biasanya dilakukan pada malam hari karena anggota

LMDH kebanyakan adalah petani yang pada siang hari waktunya habis untuk usaha tani dan usaha lain yang menunjang kehidupan mereka.

Peneliti melakukan observasi kegiatan pertemuan rutin pada tanggal 18 April 2004 di sekretariat LMDH Wana Lestari. Pertemuan dimulai sekitar jam 19.30 sampai sekitar jam 22.00 WIB dihadiri oleh sekitar 25 orang pengurus dan anggota. Ada dua topik yang dibicarakan pada malam itu, yaitu rencana pembelian bangunan rumah untuk sekretariat dan penetapan anggota LMDH yang akan ditunjuk sebagai petugas patroli keamanan hutan. Beberapa catatan jalannya pertemuan disajikan sebagai berikut :

- a. Topik rencana pembelian bangunan rumah untuk sekretariat.
 1. Sudah ada pandangan mengenai bangunan rumah yang akan dibeli, lokasi bangunan berada kira-kira 10 km dari Desa Jegong.
 2. Lokasi untuk meletakkan bangunan rumah sekretariat telah disetujui di tanah Perhutani tidak jauh dari sekretariat yang ada sekarang.
 3. Pembahasan meliputi pengangkutan bangunan dari tempatnya ke lokasi yang baru, cara peletakan bangunan di lokasi baru, kebutuhan bahan bangunan dan lain sebagainya.

Hal yang menarik adalah keputusan penyelesaian topik ini didasarkan rasa gotong-royong yang tinggi, sehingga rencana pembangunan sekretariat dapat tercapai dengan biaya yang serendah-rendahnya.

- b. Topik penetapan anggota LMDH yang akan ditunjuk untuk petugas patroli keamanan hutan.
 1. Anggota LMDH yang biasanya diajak patroli pengamanan hutan dengan biaya Perhutani mulai bulan Mei 2004 diminta untuk dibiayai oleh LMDH sendiri.
 2. Pembahasan meliputi pemilihan petugas, honorarium petugas dan lama waktu bertugas.

Petugas yang dipilih disepakati harus berasal dari empat dusun yang ada di Desa Jegong, meskipun warga Dukuh Jegong lebih siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini untuk menghindari kecemburuan antar dukuh apabila petugasnya hanya berasal dari satu dukuh saja.

Pertemuan berjalan dengan dinamika yang cukup tinggi dalam membahas kedua topik itu.

Menurut Kepala Dukuh Besi dan Bumirejo, undangan menghadiri pertemuan ini dibuat oleh ketua LMDH yang kemudian dikirimkan kepada mereka beberapa hari menjelang pertemuan. Pemberitahuan secara tertulis ini menurut kedua kepala dukuh tersebut efektif untuk membuat personil yang diundang hadir karena menjadi beban moral. Pada pertemuan itu kepala Dukuh Bumirejo tidak dapat hadir karena ada tetangga dekatnya menikahkan anaknya.

Hasil wawancara dengan pengurus LMDH, apabila Ketua LMDH tidak sempat membuat undangan, pemberitahuan akan diselenggarakannya pertemuan digunakan cara *jawilan* (pemberitahuan tidak tertulis melalui pesan dari orang ke orang). Ternyata cara menyampaikan pesan yang melalui *jawilan* sering tidak efektif, karena acapkali dipakai dalih untuk tidak hadir dengan alasan lupa atau pesan tidak disampaikan.

Kegiatan LMDH Wana Lestari merupakan kegiatan organisasi dan kegiatan lapangan. Salah satu ukuran dari berjalannya organisasi adalah tingkat kehadiran baik anggota maupun pengurus dalam pertemuan yang diselenggarakan. Pertemuan selapanan (35 hari sekali) yang diselenggarakan merupakan sarana agar anggota dan pengurus LMDH dapat berkumpul bersama-sama. Melalui pertemuan selapanan ini anggota LMDH dapat membahas kegiatan yang akan segera dilakukan oleh LMDH. Dengan demikian, tanpa menghadiri pertemuan selapanan, anggota LMDH tidak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai topik yang dibahas.

Hasil penelitian terhadap kehadiran anggota LMDH Wana Lestari menunjukkan bahwa kehadiran responden belum menggembirakan. Berdasarkan wawancara penulis kepada beberapa anggota LMDH Wana Lestari, ada beberapa sebab yang menyebabkan anggota LMDH tidak pernah hadir, jarang atau kadang-kadang hadir dalam pertemuan:

1. Kesibukan, bilamana pertemuan selapanan tersebut diselenggarakan pada musim tanam, musim panen serta banyak orang yang punya kerja (penikahan, khitanan dan lain-lain).
2. Merasa tidak diundang, hal ini biasanya terjadi bila undangan dengan sistem jawilan.
3. Jarak dari rumah ke tempat cukup jauh, Desa Jegong terdiri dari empat dukuh, dimana pertemuan selalu diadakan di Dukuh Jegong. Jarak dari Dukuh Besi dan Bumirejo menuju ke Dukuh Jegong dirasakan cukup jauh (sekitar 4 km), kondisi jalannya juga jelek apalagi di musim hujan dan pertemuan yang diselenggarakan pada malam hari membuat anggota di kedua dukuh itu malas untuk menghadiri pertemuan.
4. Khusus bagi kepala desa Jegong dapat dikatakan tidak pernah hadir dalam pertemuan, beralasan bahwa kehadirannya tidak berguna karena ia menganggap bahwa keputusan pertemuan telah dipersiapkan sebelumnya dan peserta hanya melegitimasi saja.

Selain frekuensi kehadiran pada tiap pertemuan, indikator aktivitas organisasi dan partisipasi anggota LMDH juga dicerminkan dari:

- a) Jumlah masyarakat desa hutan yang secara nyata tertarik untuk menjadi anggota LMDH.
- b) Aktivitas mengemukakan ide/usul oleh anggota LMDH dalam pertemuan
- c) Jumlah dan jenis sumbangan yang diberikan anggota LMDH untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan.
- d) Keikutsertaan dalam memanfaatkan kegiatan LMDH

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumbangan yang diberikan pada LMDH sebagian besar hanya berupa tenaga dan pikiran, sedikit sekali berupa uang atau materi. Tentang keikutsertaan dalam memanfaatkan kegiatan PHBM sebagian besar berupa pemanfaatan lahan Perhutani sebagai pesanggem. Ini semua menunjukkan partisipasi anggota terhadap LMDH dan PHBM masih terbatas.

c. Kegiatan Lapangan.

LMDH Wana Lestari memulai kegiatan lapangan dengan dana bantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. Melakukan penanaman jenis buah-buahan (mangga) pada hutan bersamaan dengan kegiatan penanaman tanaman pokok (jati) sebanyak 4.118 batang di petak 43c
- b. Menanam tanaman tumpang sari dengan bibit jagung hibrida sebanyak 396,4 Kg.
- c. Menanam rumput King Grass dan rumput gajah sebanyak 39.600 pols.
- d. Menanam tanaman obat (jenis lempuyang) di bawah pohon jati seluas 0,25 Ha di petak 84a , dan tanaman kunyit di petak 18e.

Lokasi kegiatan berbasis lahan ini telah tercantum dalam Rencana Kerja LMDH yang telah disepakati dalam penyusunan rencana lima tahun. Hasil tumpang sari oleh pesanggem yang mendapat bantuan dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah sebagian disetorkan kepada LMDH untuk penambah modal usaha simpan pinjam.

Kegiatan LMDH yang berbasis non lahan adalah:

- b. Mengumpulkan pupuk kandang untuk dijual kepada Perhutani dan sebagian hasilnya digunakan sebagai tambahan modal usaha LMDH.
- c. Membuat pupuk kompos/bokhasi yang hasilnya dijual kepada Perhutani dan sebagian hasilnya dipakai untuk penambahan modal usaha LMDH.

Di samping kegiatan tersebut diatas, LMDH "Wana Lestari" juga mengadakan usaha simpan pinjam yang modalnya berasal dari para anggotanya sendiri, dan pada bualan April 2004 kekayaannya telah mencapai lebih dari Rp. 12 juta.

Evaluasi terhadap kegiatan lapangan yang telah dilakukan oleh LMDH ternyata masih sangat sedikit, dan itupun terbatas pada kegiatan berbantuan dari Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, yaitu penanaman jenis buah-buahan (mangga), penanaman tanaman tumpang sari dengan bibit jagung hibrida, penanaman rumput King Grass dan rumput gajah, penanam tanaman obat (jenis lempuyang) dan tanaman kunyit di bawah pohon jati. Kegiatan yang berbasis non lahan adalah membuat pupuk kompos/bokhasi dan mengumpulkan pupuk kandang yang hasilnya dijual kepada Perhutani untuk penambahan modal usaha LMDH. Terbatasnya kegiatan lapangan ini disebabkan masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia di Desa Jegong untuk dapat memberi inovasi baru bagi kegiatan perekonomian yang berbasis lahan maupun non lahan. Demikian pula penyediaan dana untuk kegiatan produktif dari bagi hasil kedua relatif sangat kecil yaitu hanya sebesar 14,5% dari jumlah bagi hasil kedua. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka akibatnya kegiatan lapangan LMDH suatu ketika akan terhenti seiring dengan berhentinya bantuan dari pemerintah ataupun bagi hasil dari Perhutani. Untuk keberlanjutan kegiatan perlu diatur kembali besarnya porsi dana untuk kegiatan produktif, yang pada saatnya dapat digulirkan pada anggota lain.

Salah satu tujuan PHBM adalah untuk meningkatkan tanggungjawab masyarakat desa hutan atas keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu bentuk partisipasi pengamanan hutan adalah patroli bersama. Untuk menangani kegiatan patroli bersama ini, LMDH Wana Lestari membentuk kelompok kerja keamanan hutan, kemudian atas permintaan Perhutani, setiap hari LMDH

mengirimkan dua orang anggotanya untuk ikut patroli bersama petugas Perhutani dengan biaya ditanggung Perhutani. Data mengenai besarnya keikutsertaan responden dalam patroli pengamanan hutan dapat dilihat pada **tabel 46** di bawah ini.

Tabel 46. Partisipasi responden dalam kegiatan patroli pengamanan hutan.

No	Kegiatan patroli pengamanan hutan	Jumlah responden	%
1	Pernah	46	33,6
2	Tidak pernah	91	66,4
Jumlah		137	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Responden yang pernah ikut dalam patroli pengamanan hutan sebanyak 54 responden (18,4%), sisanya menyatakan tidak pernah ikut. Kecilnya jumlah responden dalam keikutsertaan kegiatan patroli ini karena tidak semua anggota berkesempatan ditunjuk untuk ikut patroli oleh pengurus LMDH.

Keikutsertaan anggota LMDH dalam kegiatan ini bukan merupakan partisipasi yang sesungguhnya (*tokenism*), karena partisipasinya diminta oleh Perhutani dengan diberi insentif. Dikhawatirkan apabila tidak ada insentif, anggota LMDH tidak ada yang ikut dalam patroli. Partisipasi yang diinginkan adalah partisipasi yang didasarkan atas prakarsa LMDH sendiri (*self mobilization*) untuk mencegah kerusakan hutan di sekitar desanya karena kehidupan mereka tergantung pada kelestarian hutan disekitarnya. Untuk mengetahui responden dari Dukuh mana yang banyak berpartisipasi dalam kegiatan patroli keamanan hutan, tabulasi silang antara Dukuh asal responden dengan tingkat keikutsertaan dalam patroli dapat dilihat pada **tabel 47** sebagai berikut.

Tabel 47. Tabulasi silang antara domisili responden dengan tingkat partisipasi patroli pengamanan hutan.

No.	Domisili	Ikut patroli		Jumlah
		Pernah	Tidak pernah	
1	Besi	4 (2,9%)	20 (14,6%)	24 (17,5%)
2	Jegong	16 (11,7%)	40 (29,2%)	56 (40,9%)
3	Kemadoh	22 (16,1%)	21 (15,3%)	43 (31,4%)
4	Bumirejo	4 (2,9%)	10 (7,3%)	14 (10,2%)
Jumlah		46 (33,6%)	91 (66,4%)	137 100,0%)

Dari hasil *uji chi-square* pada data di atas menunjukkan ada perbedaan antara variabel domisili responden dengan partisipasi patroli pengamanan hutan. Hal tersebut terlihat dari nilai *asympt.sig* sebesar 0,02 yang lebih kecil dari α 0,05. Artinya bahwa domisili responden berpengaruh terhadap besarnya partisipasi patroli pengamanan hutan. Dukuh Jegong dan Kemadoh mempunyai tingkat partisipasi yang lebih besar daripada Dukuh Besi dan Bumirejo. Hal ini terjadi karena letak kedua dukuh tersebut jauh dari Dukuh Jegong sebagai pusat aktifitas LMDH.

PHBM di Desa Jegong telah berjalan selama kurang lebih dua tahun dan telah melakukan berbagai kegiatan baik kegiatan organisasi maupun kegiatan lapangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Untuk mendapatkan persepsi apakah masyarakat Desa Jegong telah merasakan peningkatan kesejahteraan dengan telah diselenggarakannya PHBM di Desa Jegong, dapat dilihat pada **Tabel 48** dibawah ini.

Tabel 48. Persepsi responden tentang peningkatan kesejahteraan dengan diselenggarakannya PHBM selama 2 tahun

No.	Adanya peningkatan kesejahteraan	Jumlah responden	%
1	Sudah merasakan peningkatan kesejahteraan	123	49,2
2	Belum merasakan peningkatan kesejahteraan	127	50,8
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Jumlah responden yang telah merasakan peningkatan kesejahteraan dengan yang belum merasakannya ternyata hampir berimbang. Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai persepsi tersebut, diadakan analisis dengan tabulasi silang antara domisili responden dengan peningkatan kesejahteraan yang hasilnya sebagaimana **Tabel 49** di bawah ini.

Tabel 49. Tabulasi silang antara domisili responden dengan peningkatan kesejahteraan.

		Peningkatan	Kesejahteraan	
No.	Dukuh	Sudah merasakan	Belum merasakan	Jumlah
1	Besi	29 (11,6%)	56 (22,4%)	85 (34,0%)
2	Jegong	48 (19,2%)	12 (4,8%)	60 (24%)
3	Kemadoh	40 (16,0%)	23 (9,2%)	63 (25,2%)
4	Bumirejo	6 (2,4%)	36 (14,4%)	42 (16,8%)
Jumlah		123 (49,2%)	127 (50,8%)	250 (100%)

Sumber: Data primer, 2004

Tabulasi silang antara domisili responden dengan peningkatan kesejahteraan setelah penerapan PHBM selama dua tahun di Desa Jegong sebagaimana tabel 49, menunjukkan bahwa responden yang berada di Dukuh Jegong dan Kemadoh lebih banyak menyatakan telah merasakan peningkatan kesejahteraan, sedangkan responden yang berdomisili di Dukuh Besi dan Bumirejo relatif kecil. Uji chi-square menunjukkan bahwa ada perbedaan antara dukuh-dukuh tersebut dalam merasakan peningkatan pada tingkat kepercayaan 95%. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai asymp.sig sebesar 0,00 yang nilainya lebih kecil dari α 0,05. Hal ini antara lain disebabkan sewaktu pembagian bibit kelapa yang dananya berasal dari bagi hasil kedua, Kepala Desa Jegong menghalang-halangi pengirimannya ke Dukuh Bumirejo dan Besi dan memerintah kepada kepala dukuh untuk menolak bibit kelapa dimaksud. Dengan demikian banyak penduduk Desa Besi dan Bumirejo banyak yang merasa belum memperoleh peningkatan kesejahteraan.

PHBM di Desa Jegong baru berjalan dua tahun. Tentu saja belum banyak yang telah dilakukan oleh LMDH Wana Lestari dalam waktu yang sesingkat itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya perlu diketahui persepsi keyakinan mereka dengan penerapan PHBM kesejahteraan mereka akan lebih meningkat. Persepsi atas tingkat tersebut dapat dilihat pada **Tabel 50** di bawah ini

Tabel 50. Persepsi bahwa dengan PHBM kesejahteraan akan meningkat.

No.	PHBM akan meningkatkan kesejahteraan	Jumlah responden	%
1	Yakin	164	65,6
2	Ragu-ragu	80	32,0
3	Tidak yakin	6	2,4
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004

Dari tabel 50 diatas, responden yang yakin akan terjadi peningkatan kesejahteraan dengan diterapkannya PHBM di Desa Jegong cukup besar yaitu 65,6 %. Sisanya sebesar 34,4 % merasa ragu-ragu dan tidak yakin. Akibat dari masih tingginya responden yang ragu-ragu dan yang tidak yakin (34,4%) dapat diduga akan mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan PHBM.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat keyakinan dalam hubungannya dengan domisili responden, diadakan analisis dengan menggunakan tabulasi silang antara domisili responden dengan tingkat keyakinan, Sebagaimana **Tabel 51** di bawah ini.

Tabel 51. Tabulasi silang antara domisili responden dengan tingkat persepsi tentang peningkatan kesejahteraan.

		PHBM	akan	meningkatkan	kesejahteraan
No.	Dukuh	Yakin	Ragu-ragu	Tidak yakin	Jumlah
1	Besi	46 (18,4%)	35 (14,0%)	4 (1,6%)	85 (34,0%)
2	Jegong	52 (20,8%)	8 (3,2%)	0 (0,0%)	60 (24%)
3	Kemadoh	50 (20%)	11 (4,4%)	2 (0,8%)	63 (25,2%)
4	Bumirejo	16 (6,4%)	26 (10,4%)	0 (0,0%)	42 (16,8%)
	Jumlah	164 (65,6%)	80 (32,0%)	6 (3,4%)	250 (100,0%)

Sumber: Data primer, 2004

Pada Tabel 51, tabulasi silang antara domisili responden dengan tingkat keyakinan menunjukkan bahwa sebanyak 164 orang (65,6%) yakin bahwa dengan PHBM akan terjadinya peningkatan kesejahteraan di Desa Jegong. Keyakinan seperti tersebut diatas terbanyak dinyatakan oleh responden dari Dukuh Jegong yaitu sebanyak 52 orang (20,8%) disusul Dukuh Kemadoh sebanyak 50 orang (20%). Dari keseluruhan responden yang ragu-ragu dan tidak yakin, terbanyak dari responden Dukun Besi dan Bumirejo yaitu sebesar 15,6% dan 10,4% dibanding Dukuh Jegong (3,2%) dan Dukuh Kemadoh (5,2%).

Hasil uji *chi-square* menunjukkan bahwa ada perbedaan antara variabel domisili responden dengan tingkat keyakinan adanya peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Desa Jegong di masa mendatang dengan diterapkannya PHBM pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *asympt.sig* sebesar 0,00 yang lebih kecil dari α 0.05.

5.1.2.7 Bagi hasil.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Desa Jegong yang sudah berjalan selama 2 tahun LMDH "Wana Lestari" telah menerima bagi hasil dua kali yaitu:

1. Bagi hasil pertama diterima pada tanggal 8 September 2002 sebesar Rp. 4.440.629,-
2. Bagi hasil kedua diterima pada tanggal 15 Desember 2003 sebesar Rp. 51.819.000,-

Sesuai dengan pasal 21 Anggaran Rumah Tangga LMDH Wana Lestari, penggunaan bagi hasil tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Honor Pengurus.
- 2) Untuk melengkapi sarana dan prasarana kesekretariatan.
- 3) Bea siswa.
- 4) Pembangunan fasilitas umum.
- 5) Usaha produktif dan pertanian.
- 6) Dana sosial dan kesehatan.
- 7) Pengamanan Swakarsa.

Adapun rencana penggunaan dana dan realisasi adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan bagi hasil pertama:

- 1) Administrasi kegiatan Rp. 804.600,-
- 2) Konsumsi pertemuan-pertemuan Rp. 640.000,-
- 3) Transportasi Rp. 442.000,-
- 4) Pembuatan tanaman empon-empon .. Rp. 1.210.000,-
- 5) Dana belum digunakan Rp. 1.344.029,-

Realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 3.096.000,- sebagaimana butir 1,2,3 dan 4.

b. Penerimaan bagi hasil kedua.

1) Pengadaan kantor sekretariat dan prasarananya	Rp. 25.000.000,-
2) Pembelian bibit kelapa	Rp. 6.000.000,-
3) Pengamanan Swakarsa	Rp. 3.600.000,-
4) Pemeliharaan empon-empon	Rp. 1.500.000,-
5) Karang taruna	Rp. 500.000,-
6) Honor pengurus	Rp. 10.000.000,-
7) Permodalan koperasi	Rp. 3.000.000,-
8) Untuk persediaan kas	Rp. 2.219.000,-

Realisasi penggunaan dana bagi hasil kedua ini baru untuk pengadaan bibit kelapa untuk dibagikan kepada masyarakat Desa Jegong.

Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak tercantum pembagian berupa uang untuk anggota LMDH. Menurut penjelasan pengurus LMDH bagian anggota dan masyarakat desa berupa usaha produktif, fasilitas umum serta dana sosial dan kesehatan. Dalam bagi hasil kedua ini sudah diwujudkan dalam bentuk berbentuk bibit kelapa.

Berdasar wawancara dengan para pengurus LMDH setelah penerimaan bagi hasil yang kedua, terdapat intervensi dari Kepala Desa Jegong yang meminta agar sebagian dari dana bagi hasil tersebut digunakan untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan seluruh Desa Jegong. Permintaan Kepala Desa Jegong ini ditolak oleh pengurus LMDH Wana Lestari dengan alasan:

- Pos untuk pelunasan PBB tidak terdapat dalam AD/ART.
- Apabila permintaan itu dipenuhi, akan terjadi ketidakadilan, karena pemilik lahan yang luas dan penduduk luar Desa Jegong yang mempunyai lahan di Desa Jegong akan menerima manfaat yang lebih

banyak dari pada penduduk yang mempunyai lahan sempit dan yang tidak mempunyai lahan.

Penolakan Pengurus LMDH Wana Lestari ini menimbulkan kembali friksi antara Kepala Desa dengan Pengurus LMDH yang pernah terjadi sewaktu menetapkan personil yang duduk dalam pengurus. Dalam wawancara dengan Kepala Desa Jegong, ia menuduh Pengurus LMDH dengan seenaknya menggunakan dana bagi hasil tanpa menghiraukan aturan yang ada. Mengenai usulannya agar sebagian dana bagi hasil digunakan untuk melunasi PBB, ia beralih agar dana bagi hasil tersebut dapat dirasakan seluruh warga masyarakat Desa Jegong. Sebaliknya pengurus LMDH Wana Lestari menganggap permintaan Kepala Desa ini ada kaitannya dengan mencari popularitas dalam rangka pencalonan diri dalam Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 dari Partai Politik tertentu.

Friksi antara Pengurus LMDH Wana Lestari dengan Kepala Desa Jegong berlanjut ketika LMDH Wana Lestari membagikan bibit kelapa yang pengadaannya dari dana bagi hasil kedua. Ketika petugas LMDH ke Dukuh Besi (tempat tinggal Kepala Desa) dan Dukuh Bumirejo (tetangga dekat Dukuh Besi) untuk membagikan bibit kelapa, petugas tersebut dihalang-halangi oleh Kepala Desa melalui Kamituwo (Kepala Dukuh) Besi dan Bumirejo. Masyarakat Dukuh Besi dan Bumirejo diminta dan diancam supaya menolak bibit kelapa tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kamituwo Dukuh Besi dan Bumirejo, mereka terpaksa menolak pembagian bibit kelapa karena takut kepada Kepala Desa yang mereka anggap sebagai atasan mereka, meskipun mereka mengetahui masyarakat dukuh mereka membutuhkan bibit kelapa tersebut. Pada dua dukuh lainnya, yaitu Dukuh Jegong dan Kemadoh yang letaknya berjauhan dengan Dukuh Besi dan Bumirejo, Kepala Desa tidak berani melarang penduduk untuk menerima pembagian bibit kelapa tersebut.

Dalam wawancara dengan Ketua LMDH Wana Lestari (M. Kasran), ia mengeluhkan pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jegong dan intervensi yang dianggapnya terlalu jauh terhadap LMDH Wana Lestari. Dijelaskan pula bahwa pengadaan bibit kelapa memang sudah lama direncanakan dan masuk dalam rencana kerja, karena banyak tanaman kelapa di Desa Jegong mati diserang hama kwangwung. Selanjutnya dikatakan pula bahwa banyak penduduk Dukuh Besi dan Bumirejo secara diam-diam mengambil kembali bibit kelapa yang dahulu ditolakinya, karena mereka benar-benar memerlukannya.

Apa yang diperbuat oleh Kepala Desa Jegong merupakan *bad governance*. Menurut Dwipayana (2003) *bad governance* di pemerintahan desa adalah sebuah pemerintahan desa yang didominasi oleh kepala desa beserta elite desa, kurang berbasis pada partisipasi masyarakat serta transparansi, akuntabilitas dan responsivitas yang terbatas. Selanjutnya *bad governance* pada pemerintahan desa akan memunculkan kepemimpinan desa yang *benevolent*, *mandatory* dan otoritarian dari struktur desa yang bias elite, sentralistik dan feodal. Ciri-ciri ini nampak pada diri Kepala Desa Jegong. Menurut penjelasan dari penduduk Dukuh Jegong kepala desa ini pernah didemonstrasi oleh warga Dukuh Jegong karena melakukan penyimpangan dalam tugasnya. Pernyataan ini ada benarnya, karena berdasarkan observasi penulis Kepala Desa Jegong hingga kini nyaris tidak pernah berkantor di kantor desa yang terletak di Dukuh Jegong, akan tetapi berkantor di rumah tinggalnya.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perhutani dengan masyarakat desa hutan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dapat diwujudkan. Perwujudan jiwa berbagi tersebut antara lain dalam bentuk

berbagi hasil kayu yang diproduksi dalam hutan pangkuan desa. Maksud berbagi hasil hutan kayu ini adalah:

- a. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Perhutani dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan
- b. Meningkatkan pendapatan Perusahaan dan Masyarakat Desa Hutan secara simultan dan berkelanjutan
- c. Meningkatkan kontribusi Perusahaan terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan wilayah
- d. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Perusahaan dengan Masyarakat Desa Hutan dan dengan Pihak yang Berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan
- e. Menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan bagi Perusahaan, Masyarakat Desa hutan dan Pihak yang Berkepentingan.

Ada hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, dalam ketentuan bagi hasil kayu, Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perhutani selaku Pengurus Perusahaan tanggal 29 Maret 2001 No : 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pasal 18 menyebutkan:

1. Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepala Kepala Unit untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan PHBM di tingkat unit dan Administratur/ KKPH untuk pelaksanaannya di tingkat Kesatuan Pemangkuan Hutan.
2. Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana tersebut ayat 1 meliputi:
 - a. Bersama masyarakat desa hutan dan atau pihak berkepentingan menetapkan nilai dan proporsi berbagi dari hasil kegiatan PHBM.
 - b. Menandatangani kesepakatan dengan masyarakat desa hutan dan atau pihak yang berkepentingan dalam rangka PHBM.

- c. Mengambil langkah yang diperlukan untuk pengembangan dan pencapaian tujuan PHBM.

Ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) butir a dan b jelas-jelas memberi kewenangan bagi Perhutani Unit I Jawa Tengah dapat menetapkan nilai dan proporsi bagi hasil bersama masyarakat desa hutan, serta diberi kewenangan pula untuk menandatangani kesepakatan kerjasama.

Namun fakta menunjukkan bahwa dalam membuat perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani KPH Randublatung dengan LMDH, Perhutani malah ragu-ragu dalam menggunakan kewenangannya, sehingga harus berkonsultasi dengan Perhutani pusat. Keraguan tersebut hilang dengan terbitnya Keputusan Direktur Utama Perhutani No. 001/KPTS/DIR/2002 tentang Pedoman Berbagi hasil Hutan Kayu. Dalam Keputusan tersebut diatur secara rinci mengenai bentuk bagi hasil yaitu berupa uang tunai (untuk kayu perkakas), dalam bentuk uang tunai atau barang (untuk kayu bakar) serta cara menghitung besarnya nilai bagi hasil kayu perkakas, dengan rumus sebagai berikut:

$$Pa = \frac{(D-Ut)}{D} \times 25\%$$

Dimana :

Pa adalah proporsi hak Lembaga masyarakat desa hutan.

D adalah umur tegakan hutan pada saat ditebang habis.

Ut adalah umur tegakan hutan pada saat perjanjian ditandatangani.

25% adalah proporsi terbesar hak masyarakat desa hutan terhadap hasil tebangan habis.

Dengan ditetapkan rumus bagi hasil tersebut, tertutup peluang masyarakat desa hutan untuk memusyawarahkan besarnya bagi hasil, tetapi sebagaimana biasa masyarakat desa hutan Jegong dapat menerima keputusan ini karena telah diatur oleh ketetapan Perhutani Jakarta. Akibatnya LMDH menjadi kecewa karena dalam kegiatan bagi hasil mereka tidak dapat

berpartisipasi dalam memutuskan kebijakan yang mereka anggap “baru” dalam bekerjasama dengan Perhutani, yang justru sangat mempengaruhi tingkat partisipasi LMDH pada kegiatan PHBM.

Berdasar wawancara penulis dengan pengurus LMDH, rencana penggunaan dana bagi hasil yang telah diterima oleh LMDH Wana Lestari ditetapkan oleh pengurus dalam suatu pertemuan khusus. Acuan yang digunakan adalah Anggaran Rumah Tangga LMDH Wana Lestari pasal 21.

Perencanaan penggunaan dana bagi hasil dan dan realisasinya yang dilakukan pengurus LMDH mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu:

- a. LMDH Wana Lestari belum menyusun rencana penggunaan dana berdasar Anggaran Rumah Tangga dan ditetapkan oleh pengurus, padahal dalam Anggaran Dasar yang tercantum dalam akta pendirian LMDH Wana lestari pasal 20 menyebutkan anggaran rumah tangga ditetapkan oleh rapat anggota..
- b. Dalam ART tidak diatur proporsi dana yang dianggarkan untuk masing-masing pos pengeluaran, sehingga penetapan proporsi rencana penggunaan dana bagi hasil ditentukan oleh pengurus.
- c. Rencana penggunaan dana bagi hasil yang telah ditetapkan pengurus tidak disosialisasikan kepada anggota dan masyarakat Desa Jegong.
- d. Penggunaan dana ada yang tidak sesuai dengan pos yang tercantum dalam AD/ART, misalnya untuk transportasi pengurus.

Terdapat beberapa komentar masyarakat yang menarik untuk disimak mengenai bagi hasil ini:

1. Sdr. Moh. Nandir dari Dukuh Kemadoh: *“...kalau mendapat bantuan dari Perhutani tolong masyarakat supaya diberi tahu, uang itu untuk apa...”*
2. Sdr. Sutomo dari Dukuh Kemadoh: *“...PHBM harus mengadakan pertemuan atau menyampaikan program-program yang harus dikerjakan dan harus terbuka kalau sudah mendapatkan hasilnya. Sebab selama ini masyarakat kemadoh belum tahu kalau PHBM sudah mendapat hasil...”*

3. Sdr. Sarmin dari Bumirejo: "...mohon pengurus PHBM itu diberi pengawasan dalam menggunakan uang, jangan dibiarkan uang liar..."

Akibatnya, kelemahan-kelemahan tersebut ternyata mengundang masalah. Berdasar wawancara dengan beberapa anggota LMDH didapat kesan sebagai berikut:

- a. Banyak anggota yang tidak mengetahui penggunaan dana bagi hasil.
- b. Timbul kecurigaan masyarakat Desa Jegong terhadap pengurus LMDH Wana Lestari tentang penggunaan dana.
- c. Banyak yang belum merasakan manfaat dari dana yang telah dibagikan.

Mengenai perilaku Kepala Desa Jegong yang kurang mendukung LMDH, bukan merupakan sosok kepala desa dalam *good governance*. Menurut Dwipayana (2003) sosok kepala desa yang berperilaku *good governance* adalah sosok kepemimpinan sosial yang partisipatif, responsif dan demokratis. Dengan *good governance*, warga desa akan mempunyai ruang dan kapasitas yang leluasa untuk bersuara, akses dan kontrol. Menurut hasil wawancara penulis dengan Kamituwo Besi, Kepala Desa Jegong sering tidak ada di Desa karena mempunyai usaha jual beli bangunan rumah kayu (*kawakan*) untuk dijual keluar kabupaten. Menurut Ketua LMDH Wana Lestari, Kepala Desa Jegong juga hampir tidak pernah hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan LMDH, padahal ia secara *ex officio* (secara jabatan) adalah pelindung LMDH Wana Lestari.

Sikap dan perilaku kepala desa seperti ini akan berakibat terganggunya kelancaran kegiatan LMDH, mengakibatkan konflik antar warga dan menumbuhkan rasa saling curiga yang bermuara pada hilangnya kepercayaan masyarakat desa Jegong kepada LMDH.

Beberapa hal yang dapat dipetik dari kasus diatas adalah:

- a. Dasar-dasar penganggaran dana bagi hasil harus ditegaskan dalam ART yang disahkan dalam rapat anggota..
- b. Rencana penganggaran harus ditetapkan dalam pertemuan anggota LMDH yang diselenggarakan secara luas, bukan hanya oleh pengurus.
- c. Sebelum pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan anggaran harus diumumkan secara terbuka oleh Ketua LMDH dengan menempelkannya pada papan pengumuman di semua pedukuhan.
- d. Pemerintah desa harus bisa mewujudkan sosok birokrasi pemerintah desa yang bersih, kredibel dan terpercaya agar dapat berkerjasama dengan semua kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa, termasuk LMDH.

5.1.2.8 Peningkatan sumberdaya manusia dan Pengembangan ekonomi kerakyatan.

Untuk mencapai tujuan PHBM di Desa Jegong, pada awal kegiatan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Dengan diberikannya pelatihan, pengetahuan dan keterampilan diharapkan mereka dapat mengembangkan ekonomi masyarakat sesuai dengan sumberdaya yang ada dan pada gilirannya akan mampu membangun ekonomi desanya secara mandiri.

Pelatihan yang diberikan berupa:

- b. Sekolah Lapang Agribisnis, yang dilakukan di Pusat Pendidikan dan Latihan "Karya Nyata" di Cinagara, Bogor. Pengetahuan dan keterampilan yang diberikan pada pelatihan ini adalah:
 - 1). Pembuatan pupuk organik.
 - 2). Tehnik penyuburan tanah.
 - 3). Budidaya tanaman

- 4). Teknologi pasca panen.
- 5). Budidaya peternakan.
- 6). Kewirausahaan agribisnis.
- 7). Manajemen usaha tani.
- 8). Pengembangan kelompok.
- 9). Pembinaan mental dan kedisiplinan.

Pengetahuan dan keterampilan diutamakan berupa praktek langsung di lapangan, yang kemudian diikuti dengan studi banding. Jumlah anggota LMDH Jegong yang dilatih sebanyak 5 orang, nantinya diminta untuk menularkan ilmunya kepada anggota lainnya.

- c. Pelatihan pengelolaan hutan bagi masyarakat, yang dilakukan di KPH Randublatung dengan diikuti 30 orang peserta. Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini adalah:

- 1) Kebijakan kehutanan dan PHBM.
- 2) Sistem pengelolaan hutan Perhutani.
- 3) Peluang usaha masyarakat dalam PHBM.
- 4) Pengetahuan tentang organisasi.
- 5) Beberapa materi yang diperoleh dari Sekolah Lapang di Cinagara.

Kunjungan lapangan dilakukan ke lokasi penggemukan sapi dan budidaya tanaman mengkudu serta cara pengolahan mengkudu hingga menjadi obat yang berkhasiat. Disamping itu juga diadakan praktek penyusunan program kerja.

Bentuk pelatihan dan kegiatan lainnya yang kemudian diselenggarakan Perhutani adalah pelatihan pembuatan pupuk kompos, mengirim KTH anggota LMDH untuk studi banding ke LMDH yang telah dapat memproduksi barang ke pasaran di Banyumas. Pada awal tahun 2003 mengikutsertakan KTH anggota LMDH Wana Lestari dalam acara Temu KTH se Unit I Jawa Tengah. Dalam acara tersebut KTH-KTH bisa memperkenalkan produk-produk unggulan mereka untuk membuka peluang

pasar. Ini semua untuk menambah keterampilan dan wawasan anggota LMDH dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Salah satu hal yang diwarisi oleh Perhutani dari pendahulunya di jaman kolonial Belanda (*Bosh Wezen*) adalah perilaku feodalnya (Bakhtiar, 2001). Aparat Perhutani seringkali bertindak secara represif terhadap masyarakat. Akses masyarakat ke dalam hutan hampir sama sekali tertutup, akibat berbagai larangan yang dikeluarkan oleh Perhutani. Sikap petugas seperti itu banyak menimbulkan konflik yang terus menajam antara masyarakat dengan Perhutani. Untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Jegong terhadap sikap petugas Perhutani di Desa Jegong sebelum diselenggarakannya PHBM dapat dilihat pada **Tabel 52** di bawah ini.

Tabel 52. Persepsi responden terhadap sikap petugas Perhutani di Desa Jegong sebelum PHBM.

No.	Sikap petugas Perhutani sebelum PHBM	Jumlah responden	%
1	Baik	155	62,0
2	Kurang baik	72	28,8
3	Tidak baik	23	9,2
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Data pada tabel 52 menunjukkan persepsi responden terhadap petugas Perhutani di Desa Jegong sebelum PHBM diterapkan sudah cukup baik, terbukti dengan 62, 0% jawaban responden mengatakan demikian. Sedangkan yang menyatakan kurang baik sebanyak 28,8% dan yang menyatakan tidak baik hanya 9,2% saja.

Sesuai dengan maksud dari dilaksanakannya PHBM, diharapkan akan ada perubahan persepsi masyarakat terhadap sikap petugas Perhutani. Untuk

mengetahui persepsi masyarakat terhadap sikap petugas setelah diterapkannya PHBM, dapat dilihat pada Tabel 53 berikut ini.

Tabel 53. Persepsi responden terhadap sikap petugas Perhutani di Desa Jegong setelah PHBM.

No.	Sikap petugas Perhutani setelah PHBM	Jumlah responden	%
1	Jauh lebih baik	120	48,0
2	Sedikit lebih baik	85	34,0
3	Tidak ada perubahan	30	12,0
4	Makin tidak baik	15	6,0
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Informasi yang didapat dari data tabel 53 diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden (48,0%) berpersepsi sikap petugas Perhutani setelah PHBM diterapkan di Desa Jegong menjadi jauh lebih baik dan 34,0% responden menyatakan sedikit lebih baik daripada sikap sebelumnya. Dengan demikian sikap petugas Perhutani telah dipersepsikan oleh 82,0% responden (penjumlahan no. 1 dan 2) lebih baik daripada sebelumnya. Mengenai hubungan dengan Perhutani, sdr. Jatmiko warga Dukuh Jegong mengatakan: *"...karena Perhutani tidak pernah memikirkan bagaimana cara hidup masyarakat kami, padahal masyarakat kami benar-benar tergantung pada hutan, karena Perhutani sering merampas kayu bakar tanpa sebab, ini sangat menjengkelkan"*, dan komentar sdr. Kadimin dari Dukuh Ke4madoh: *"...kalau ambil rencek dimarahi, Perhutani tidak pernah menegur warga"*.

PHBM dirancang sebagai sistem pengelolaan hutan yang menempatkan dua pelaku (stake holders) yaitu Masyarakat Desa Hutan dengan Perhutani pada kedudukan yang sejajar dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat operasional. Lebih jauh

lagi di dalam PHBM masyarakat tidak sekedar berpartisipasi atau tidak sekedar sebagai mitra sejajar, melainkan ditempatkan sebagai pelaku utama bersama-sama dengan Perum Perhutani yang selama ini berperan sebagai pengelola tunggal dari hutan di Jawa. Untuk mengetahui persepsi masyarakat apakah Perhutani telah meletakkan masyarakat pada posisi setara, **Tabel 54** dibawah ini dapat memberi informasi tentang hal ini.

Tabel 54. Tingkat hubungan kesetaraan antara Perhutani dengan masyarakat.

No.	Tingkat hubungan	Jumlah responden	%
1	Setara	146	58,4
2	Belum setara	96	38,4
3	Tidak tahu	8	3,2
Jumlah		250	100,0

Sumber: Data primer, 2004.

Tabel 54 menunjukan meskipun sebagian besar (58,4%) responden berpersepsi bahwa hubungan antara masyarakat dengan Perhutani sudah setara, namun masih cukup banyak (38,4%) responden yang menyatakan bahwa hubungan itu belum setara. Oservasi di lapangan terhadap hubungan antara Perhutani dengan masyarakat Desa Jegong memang banyak yang harus diperbaiki. Belum setaranya hubungan ini antara lain terlihat dari sikap Ketua LMDH Wana Lestari ketika dimintai pendapat tentang bagaimana sikapnya apabila Perhutani masih menganggap LMDH sebagai sub ordinat, dijawab "*itu terserah Perhutani saja*". Komentar dari sdr. Sardji dari Desa Jegong mengenai hubungan kesetaraan ini adalah: "*... Agar sepenuhnya*

PHBM di Desa Jegong, saya selaku anggota PHBM maka saya mohon peningkatan keakraban Perhutani dan masyarakat Desa Jegong. Tingkatkan tali kesetaraan antara LMDH dengan Perhutani." Dari jawaban ini antara Perhutani dengan LMDJH nampak belum ada kesetaraan dalam pelaksanaan PHBM.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, efektifitas dari hasil pelatihan yang diselenggarakan dengan cara ini belum nampak dalam pelaksanaan PHBM di Desa Jegong, terlihat dari kegiatan lapangan yang dikerjakan masih sama dengan kegiatan sebelum diterapkannya PHBM. Observasi dan wawancara penulis terhadap anggota LMDH, disebabkan karena:

1. Pelatihan yang diikuti oleh hanya beberapa orang tidak disebar luaskan kepada seluruh anggota dengan baik.
2. Terbatasnya permodalan yang dimiliki oleh LMDH atau anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha produktif sebagaimana yang telah diperoleh diwaktu pelatihan.
3. Pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan PHBM masih kurang.

Kegiatan LMDH tampak masih konvensional dan belum ada ide-ide atau kegiatan nyata untuk menerapkan hasil pelatihan tersebut. Demikian pula kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh LMDH masih sangat tergantung kepada Perhutani.

Pada tahun 2002 Perhutani melibatkan MDH Jegong dalam pembangunan tanaman dengan melakukan kerja sama di bidang barang dan jasa dengan membeli pupuk kandang dari anggota LMDH Wana Lestari untuk keperluan reboisasi sebanyak 200 ton senilai Rp 30.000.000,-. Selanjutnya pada tahun 2003 LMDH Wana Lestari juga diberi kesempatan lagi untuk menyediakan pupuk kompos dan pupuk kandang untuk pembuatan persemaian dan reboisasi tahun 2003, sesuai dengan kemampuan MDH

dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan oleh Perum Perhutani. Selain itu untuk membantu pengembangan ekonomi kerakyatan di Desa Jegong, Perhutani pada tahun 2003 Perhutani telah menyalurkan dana Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sebesar Rp. 7.000.000,- yang direncanakan sebagai modal usaha di bidang penyediaan saprodi.

Dalam kaitannya dengan peningkatan sumberdaya manusia untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui beragam kegiatan pelatihan sudah tepat, karena dengan penambahan pengetahuan mengenai keterampilan, teknologi keorganisasian dan usaha produktif akan merupakan modal dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Namun demikian pelatihan yang diselenggarakan bagi masyarakat Desa Jegong sangat terbatas baik materinya maupun anggota masyarakat yang mengikutinya, dan setelah itu tidak ada pembinaan untuk mengadakan pelatihan secara berkelanjutan. Akibatnya pengetahuan dan keterampilan yang didapat tidak dapat diterapkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam kegiatan yang disebut pengembangan ekonomi kerakyatan ini, LMDH Wana Lestari masih sangat tergantung kepada Perhutani mengenai jenis produksi dan pemasaran hasilnya. Usaha-usaha pengembangan ekonomi rakyat lain untuk meningkatkan kesejahteraan belum dilakukan. Bila keadaan ini terus berlangsung maka dikhawatirkan tidak ada peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Jegong, sekalipun diselenggarakan PHBM di desa itu.

5.1.3 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dalam ketentuan pasal 17 Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 September 2001 No : 24 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan secara berkala oleh

Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam PHBM. Untuk keperluan pemantauan, evaluasi dan pelaporan akan diterbitkan dalam bentuk Pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi PHBM oleh Perhutani.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hingga saat ini belum pernah dilakukan oleh Perhutani maupun LMDH. Dalam wawancara penulis dengan pihak Perhutani, dikatakan bahwa pemantauan jalannya PHBM di Desa Jegong dilakukan sebagaimana melakukan tugas rutin kegiatan Perhutani. Tidak ada pemantauan yang dilakukan secara khusus untuk mengamati perkembangan LMDH Wana Lestari dalam rangka PHBM. Evaluasi terhadap kegiatan LMDH Wana Lestari sebagai desa model dalam kaitannya dengan PHBM juga belum pernah dilaksanakan, demikian juga pelaporan khusus tentang jalannya PHBM di Desa Jegong juga belum pernah dilaksanakan.

Pada bulan Mei 2002 Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah telah mencoba mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh LMDH yang ada di Jawa Tengah pada waktu itu. Maksud monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah adalah untuk memantau pelaksanaan kegiatan PHBM. Metode yang dipakai dalam monitoring dan evaluasi ini adalah dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder, sedangkan penilaian dilakukan berdasar jumlah skor nilai yang diperoleh dari hasil wawancara. Besar skor dan kriteria nya ditentukan sendiri oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Aspek-aspek yang dinilai adalah kelembagaan, administrasi, aktifitas kelompok, dinamika kelompok, persepsi, kesejahteraan dan kelestarian.

Rekapitulasi hasil penilaian terhadap LMDH Wana Lestari adalah sebagai **Tabel 55** berikut:

Tabel 55. Rekapitulasi hasil penilaian LMDH Wana Lestari, Desa Jegong Kecamatan Jati, Kabupaten Blora.

No.	ASPEK YANG DINILAI	Jumlah nilai
1	Kelembagaan (nilai Max 30)	30
2	Administrasi (nilai max 20)	18
3	Aktifitas kelompok (nilai max 50)	44
4	Dinamika kelompok (nilai max 10)	8
5	Persepsi, kesejahteraan dan pelestarian (nilai max 50)	48
	JUMLAH (nilai max 160)	148

Sumber: Laporan hasil penilaian LMDH Wana Lestari oleh Dinas Kehutanan, 2003.

Dengan kriteria bahwa:

Nilai Skor < 73 mendapat predikat kurang baik.

Nilai Skor 74 – 116 mendapat predikat cukup.

Nilai skor 117 – 160 mendapat predikat baik.

Maka dengan nilai skor total sebesar 148, Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari mendapatkan predikat LMDH yang baik.

Harus diakui bahwa untuk mendapatkan data dalam pengisian nilai skor tidak cukup mendalam, karena hanya dengan melakukan wawancara dengan pengurus LMDH serta mengadakan observasi terhadap data dan kelengkapan yang ada. Namun demikian setidaknya hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat kinerja LMDH yang bersangkutan.

Berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001, evaluasi terhadap PHBM dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sekali oleh Forum Komunikasi PHBM pada tiap-tiap tingkatan. Sasaran evaluasi adalah perkembangan penerapan PHBM, mutu sumberdaya hutan,

pendapatan masyarakat desa hutan, kinerja Perhutani, kontribusi terhadap keuangan daerah, peran dan tanggungjawab Perhutani, LMDH dan pihak yang berkepentingan dalam PHBM.

Sampai saat penelitian dilakukan, Forum Komunikasi PHBM baik di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa belum pernah melakukan pemantauan maupun evaluasi. Hal ini disebabkan antara lain karena pedoman monitoring dan evaluasi PHBM belum diterbitkan. Akibatnya perkembangan PHBM tidak dapat diketahui dengan baik, kekeliruan atau penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan tidak dapat segera dideteksi dan dievaluasi untuk dijadikan umpan balik bagi penyempurnaan sistem.

Tabel 56. Matriks evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PHBM di Desa Jegong

KEGIATAN	KRITERIA	HASIL EVALUASI	DAMPAK
A. PERENCANAAN			
1. Rencana Jangka Panjang	Rencana Jangka Panjang dibuat untuk jangka satu kali daur (70 tahun) dilandasi data yang diperoleh dari PDP atau PRA.	Rencana Jangka Panjang tidak dibuat.	Tidak jelasnya arah kegiatan PHBM di Desa Jegong dalam mencapai tujuan.
2. Rencana Jangka Menengah	Rencana Jangka Menengah dibuat untuk jangka 10 tahun.	Rencana Jangka Menengah berupa Rencana Strategi yang berjangka lima tahun.	Rencana PHBM tidak selaras dengan rencana perusahaan yang berjangka sepuluh tahun.
3. Rencana Tahunan	Rencana Tahunan dibuat pada triwulan akhir tahun sebelumnya	Rencana Tahunan tidak dibuat.	Tidak ada pegangan detail bagi pelaksanaan kegiatan PHBM bagi LMDH dan Perhutani sehingga menyulitkan untuk pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
B. PELAKSANAAN			
1. Penentuan desa mode	Desa model ditentukan melalui dialog dengan masyarakat desa di samping mempertimbangan kondisi fisik desa dan huiam pangkuannya.	Desa model ditentukan secara sepihak oleh Dinas Kehutanan dan Perhutani tanpa dialog dengan masyarakat desa.	Banyak masyarakat Desa Jegong tidak mengetahui rencana PHBM di desanya.

2. Persepsi terhadap manfaat hutan.	Jumlah warga desa yang berpersepsi positif terhadap manfaat hutan > 80,0%	Jumlah warga desa yang berpersepsi positif terhadap manfaat hutan 98,4%	Persepsi warga desa terhadap manfaat hutan sangat positif
3. Sosialisasi	Pengenalan PHBM kepada masyarakat dilakukan dengan cara dialog dan diskusi	Pengenalan PHBM kepada masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi.	Masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan, karena keputusan telah ditetapkan dari atas, tanpa dapat banyak menyampaikan pendapat mereka
4. Persetujuan diterapkannya PHBM	Jumlah warga desa yang menyetujui diterapkannya PHBM > 80,0%	Jumlah warga desa yang menyetujui diterapkannya PHBM 93,6%	Persepsi warga desa terhadap PHBM sangat positif.
5. Pembentukan LMDH	Pembentukan LMDH atas prakarsa sendiri dan dikukuhkan oleh Notaris.	Pembentukan LMDH atas prakarsa sendiri, difasilitasi Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah serta Perhutani dan dikukuhkan oleh Notaris.	Organisasi cukup kuat untuk bekerjasama dengan institusi lain..
6. Keanggotaan dalam LMDH	Jumlah warga desa yang menjadi anggota LMDH > 80%	Jumlah anggota warga desa yang menjadi anggota LMDH 54,8%	Partisipasi warga desa dalam PHBM rendah
7. Alasan menjadi anggota LMDH	Atas kemauan sendiri > 80,0%	Atas kemauan sendiri 67,9%	Tingkat partisipasi warga desa dalam LMDH rendah

8. Aktifitas dalam LMDH	<p>a. Tingkat kehadiran > 60,0%</p> <p>b. Mengajukan usul > 60,0%</p> <p>c. Membaca Rencana kerja > 50,0%</p> <p>d. Mengetahui Rencana kerja > 80,0%</p> <p>e. Mengikuti penjelasan tentang Rencana Kerja > 80,0%</p> <p>f. Mengikuti Penjelasan pelaksanaan PHBM > 80,0%</p>	<p>a. Tingkat kehadiran 37,2%</p> <p>b. Mengajukan usul/ide 2,9 %</p> <p>c. Membaca Rencana kerja 44,5%</p> <p>d. Mengetahui Rencana kerja 78,8%</p> <p>e. Mengikuti penjelasan tentang Rencana Kerja 83,9%</p> <p>f. Mengikuti Penjelasan tentang pelaksanaan PHBM 81,8%</p>	Partisipasi warga desa dalam Kegiatan LMDH rendah
9. Sumbangan terhadap kegiatan LMDH	Pernah menyumbang kegiatan LMDH > 80,0%	Pernah menyumbang kegiatan LMDH 68,6%	Partisipasi warga desa dalam kegiatan LMDH rendah
10. Pemanfaatan kegiatan PHBM	Pernah memanfaatkan > 80,0%	Pernah memanfaatkan 57,7%	Partisipasi warga desa dalam kegiatan PHBM rendah

11. Persepsi mengenai keterlibatan LMDH dalam PHBM	Pada seluruh kegiatan > 80,0%	Pada seluruh kegiatan 52,0%	Persepsi warga desa dalam keterlibatan LMDH pada kegiatan PHBM rendah
12. Keamanan hutan	a. Berusaha ikut mencegah penjarahan hutan > 75,0% b. Ikut bertanggung jawab atas keamanan hutan > 75,0%	a. Berusaha ikut mencegah penjarahan hutan 79,6% b. Ikut bertanggung jawab atas keamanan hutan 77,6%	Persepsi warga desa dalam keterlibatan pencegahan dan tanggungjawab keamanan hutan tinggi
13. Persepsi terhadap hubungan dengan petugas Perhutani	Persepsi positif > 80,0%	Persepsi positif : 62,0%	Persepsi warga desa terhadap sikap petugas Perhutani belum positif
14. Kesenjangan hubungan dengan Perhutani	Sudah setara > 80,0%	58,4%	Belum ada kesetaraan hubungan dengan Perhutani
15. Inovasi dalam kegiatan agroforestry berbasis lahan maupun non lahan	Terdapat inovasi baru dalam kegiatan agroforestry baik yang berbasis lahan maupun non lahan	Belum ada inovasi baru dalam kegiatan agroforestry baik yang berbasis lahan maupun non lahan	

16. Pelaksanaan kegiatan lapangan	Kegiatan lapangan pada hutan pangkuan dilaksanakan berdasarkan kerjasama LMDH dan Perhutani	Kegiatan lapangan pada desa pangkuan tidak atas kerjasama LMDH dengan Perhutani	Kegiatan PHBM tidak berjalan sebagai mana yang dimaksud dalam kebijakan PHBM yang telah digariskan.
C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI			
1. Pemantauan dan evaluasi oleh Perhutani dan LMDH	Pemantauan dan evaluasi oleh Perhutani dan LMDH dilakukan setiap tahun	Belum pernah	Pelaksanaan PHBM tidak terpantau dengan baik dan tidak ada bahan untuk umpan balik dalam menyempurnakan PHBM
2. Pemantauan dan evaluasi oleh Forum Komunikasi PHBM	Pemantauan dan evaluasi oleh Forum Komunikasi PHBM setiap 6 bulan	Belum pernah	Pelaksanaan PHBM tidak terpantau dengan baik dan tidak ada bahan untuk umpan balik dalam menyempurnakan PHBM

5.2 Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat

5.2.1 Faktor pendorong.

5.2.1.1 Perubahan kebijakan pemerintah.

Sejak bergulirnya reformasi di Indonesia, telah terjadi berbagai perubahan dan tuntutan dari berbagai pihak sebagai wujud dari proses pelaksanaan demokrasi, hal ini ditandai dengan tuntutan dari masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena tuntutan itulah maka disetiap tingkatan pemerintahan baik di Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai Kelurahan/Desa terjadi berbagai upaya dan tindakan untuk menuju proses tersebut. Dengan demikian setiap Pemerintah Pusat dan Daerah berupaya secara serius untuk mengubah kebijakan dalam pelaksanaan demokratisasi. Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat terhadap pembangunan, maka masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan termasuk pada tahapan perencanaan pembangunan diberbagai tingkatan. Dengan demikian diharapkan akan timbul suatu rasa memiliki dan rasa tanggungjawab bersama seluruh masyarakat terhadap pembangunan. Pembangunan yang mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat dapat kita sebut pembangunan partisipatif.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan arahan tentang bagaimana pembangunan dikelola oleh semua unsur yaitu pemerintah dan masyarakat sebagai mitra sejajar. Perubahan kebijakan ini perlu kesiapan dari semua pihak. Pemerintah disatu sisi harus merelakan sebagian kewenangannya untuk dikelola oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaannya serta evaluasinya. Sebagai konsesi dari penyerahan sebagian kewenangan tersebut, masyarakat harus menyiapkan diri untuk terlibat pada peran baru tersebut tidak saja dari segi teknis tetapi juga dari segi pemahaman tentang arah dan kebijakan pembangunan yang disepakati.

Pola perencanaan daerah yang berjalan saat ini mengatur tentang perlunya melakukan penjarangan aspirasi masyarakat untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyusunan konsep arah dan kebijakan. Partisipasi mengandung pengertian lebih dari sekedar peran serta. Partisipasi memiliki peran yang lebih aktif dan mengandung unsur kesetaraan dan kedaulatan dari para pelaku partisipasi, sedangkan peranserta bisa diartikan sebagai pelengkap dan tidak harus ada kesetaraan.

Perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan faktor pendorong bagi pelaksanaan PHBM, karena dengan PHBM masyarakat dimungkinkan untuk berpartisipasi termasuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan secara lebih luas.

5.2.1.2 Perubahan kebijakan Perhutani

Peristiwa terjadinya penjarahan hutan seiring dengan bergulimya era reformasi di Indonesia, berimplikasi pada terjadinya perubahan kebijakan Perum Perhutani. Salah satunya adalah perubahan paradigma dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan. Sistem pengelolaan hutan yang semula berorientasi pada hasil kayu berubah menjadi pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem yang dikelola secara berkolaborasi guna menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Dengan paradigma tersebut, Perum Perhutani menerapkan pengelolaan hutan melalui prinsip berbagi peran dan tanggung jawab serta hak dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) secara proporsional. Dengan prinsip berbagi semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan serta kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Model pengelolaan sumber daya hutan ini dinamakan Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Kebijakan mengenai PHBM ini secara umum dituangkan pada Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perhutani selaku Pengurus Perusahaan tanggal 29 Maret 2001 No : 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Pada pengelolaan sumberdaya hutan dalam sistem PHBM, Perhutani dan masyarakat desa hutan diberi kelonggaran yang cukup besar untuk berkolaborasi. Kunci utamanya adalah adanya jiwa berbagi dalam pelaksanaannya. Dalam jiwa berbagi terkandung tuntutan kepada semua pihak untuk berbagi peran, kewajiban, dan tanggung jawab, serta berbagi kemanfaatan (mengedepankan asas manfaat). Bentuknya dapat berupa berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi pemanfaatan waktu, serta berbagi pemanfaatan hasil.

Adanya perubahan kebijakan yang memberi dorongan, rangsangan, dan dukungan serta kesempatan terhadap segala upaya perbaikan kesejahteraan masyarakat desa melalui PHBM ini merupakan faktor pendorong untuk mewujudkan kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

5.2.1.3 Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat tentang pentingnya hutan dan pelestarian sumberdaya-alam bagi kesejahteraan dan lingkungannya merupakan faktor pendorong yang kuat. Persepsi positif masyarakat desa Jegong bahwa hutan bermanfaat bagi mereka, berupa manfaat ekonomi, ekologi maupun sosial bagi kehidupan mereka serta menjadi faktor pendorong keberhasilan PHBM di Desa Jegong. Persepsi positif ini direspon oleh masyarakat Desa Jegong dengan menyetujui diterapkannya PHBM di desanya.

5.2.2 Faktor penghambat.

5.2.2.1 Pendekatan Perhutani kepada masyarakat.

Perlakuan Perhutani baik individual maupun institusional kepada masyarakat banyak menimbulkan konflik yang terus menajam antara

masyarakat dengan Perhutani. Tindakan aparat Perhutani sering bersifat represif, dengan mengeluarkan berbagai larangan seperti mencari kayu bakar dan larangan-larangan lainnya. Di lapangan aparat Perhutani juga tidak menempatkan diri pada posisi sejajar dengan masyarakat sekitar hutan.

Pendekatan Perhutani kepada masyarakat seperti di atas hingga kini masih sangat lekat pada setiap petugas Perhutani, terutama pada petugas yang bekerja di lapangan (Asper, Mantri dan mandor). Keadaan seperti ini juga dinyatakan oleh Bambang Adjie Sutjahjo, Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Perhutani yang ditulis pada harian Pikiran Rakyat pada terbitan tanggal 24 September 2002 *"...masalah utama penyebab lambatnya implementasi PHBM justru terletak pada internal Perhutani karena membutuhkan perubahan perilaku karyawan Perhutani"*. Kesulitan yang sama juga diungkapkan oleh Kepala KPH Randublatung mengenai keengganan sebagian Petugas Perhutani dalam menerapkan PHBM, yang dalam wawancara menyatakan bahwa *"...terdapat masalah internal Perhutani sendiri, banyak yang belum ikhlas karena takut kehilangan pekerjaan atau tambahan penghasilan.."*

Meskipun sebagian besar persepsi masyarakat Desa Jegong terhadap petugas Perhutani adalah baik, namun perlu diperhatikan pula adanya persepsi sebesar 38% responden yang menyatakan petugas Perhutani masih bersikap kurang baik dan tidak baik. Apabila persepsi ini tidak dijaga atau ditingkatkan, bukan hal mustahil dapat menjadi faktor penghambat yang dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PHBM.

5.2.2.2 Kepengurusan LMDH

Pengurus yang duduk pada LMDH apabila tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik akan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan PHBM. Kasus di Desa Jegong, Ketua LMDH Wana Lestari (Moh. Kasran) yang berprofesi sebagai guru Sekolah Dasar

dimana lokasi sekolah tempatnya mengajar cukup jauh. Berdasar wawancara dengan Moh. Kasran, profesinya sebagai pengajar membuat ia lelah, dan merasa apa yang dikerjakan untuk LMDH tidak dapat optimal. Selain dari keadaan pribadi Moh. Kasran, proporsi jumlah pengurus LMDH Wana Lestari pada setiap dukuhnya tidak seimbang. Dukuh-dukuh yang warganya hanya sedikit menjadi pengurus LMDH seperti Besi dan Bumirejo berpengaruh terhadap pemahaman dan partisipasi masyarakat dukuh-dukuh tersebut terhadap LMDH. Keadaan ini menjadi faktor penghambat masyarakat Desa Jegong dalam melaksanakan PHBM.

5.2.2.3 Sikap perangkat Desa.

Perangkat desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban perangkat desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Apabila perangkat desa yang tidak berperilaku seperti itu, akan dapat menjadi faktor penghambat pada pelaksanaan PHBM.

Kasus di Desa Jegong yang menunjukkan tindakan Kepala Desa Jegong yang mengintervensi LMDH dan menghalangi warga masyarakat Dukuh Bumirejo dan Besi untuk menerima bibit kelapa yang diadakan dari hasil bagi yang diterima LMDH Wana Lestari merupakan tindakan yang berlawanan dengan tugas yang diembannya. Perbuatan yang dilakukan karena ambisi pribadinya dalam rangka meraih "prestasi" di hadapan pemerintahan di atasnya yaitu kecepatan dan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desanya. Pelaksanaan tugas birokrasi inilah yang membuat Kepala Desa yang seharusnya dipercaya oleh rakyatnya, kini hadir sebagai "musuh" yang mengganggu LMDH Wana Lestari.

Apabila perangkat desa tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance yaitu memerintah dengan berbasis pada partisipasi masyarakat, transparan, akuntabel dan responsif, maka dalam konteks ini akan sering terjadi konflik kepentingan antara kepala desa dengan masyarakatnya. Keadaan ini merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan PHBM.

5.2.2.4 Keadaan geografis

Keadaan geografis desa ternyata berpengaruh terhadap tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat desa hutan pada pelaksanaan PHBM. Hasil penelitian di Desa Jegong membuktikan hal ini. Kesulitan komunikasi antara pengurus LMDH dengan masyarakat yang berdomisili di dukuh yang jauh dengan dukuh tempat domisili dan sekretariat LMDH, menunjukkan rendahnya persepsi dan partisipasi pada dukuh-dukuh tersebut. Keadaan geografi seperti ini merupakan faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan PHBM.

5.2.2.5 Tingkat kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Jegong menunjukkan desa itu berada dalam kondisi kemiskinan. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan dalam kemampuan dan permodalan. Rendahnya tingkat kesejahteraan cenderung kurang memperhatikan kegiatan lain (misalnya PHBM) dibanding upaya untuk memperoleh penghasilan. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat ini juga merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan PHBM.

5.2.2.6 Partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan LMDH PHBM yang terjadi di Desa Jegong belum cukup tinggi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat belum mencerminkan apa yang dimaksud dalam PHBM. Masih

rendahnya partisipasi ini merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan PHBM, karena kurangnya dukungan masyarakat.

5.3 Model Penyempurnaan pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat PHBM) dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan.

5.3.1. Landasan Pemikiran

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat merupakan model pengelolaan hutan yang memadukan kepentingan kehutanan maupun masyarakat, agar memberikan hasil optimal dalam memberi keuntungan yang layak bagi kedua belah pihak. Untuk mencapai hasil yang maksimal (prinsip produktifitas) dengan hasil yang diterima secara adil oleh kedua pihak (prinsip keadilan), maka sistem pengelolaan ini harus memenuhi persyaratan kerjasama saling menguntungkan. Oleh karena itu PHBM harus dirancang sebagai system pengelolaan hutan yang menempatkan dua pelaku (stake holders) yang mempunyai kedudukan sejajar dalam menentukan kebijakan dan kegiatan yang bersifat operasional. Di dalam PHBM masyarakat tidak sekedar berpartisipasi dan tidak pula sekedar sebagai mitra sejajar melainkan sebagai pelaku utama bersama-sama dengan Perhutani.

Model PHBM yang diterapkan PHBM di Desa Jegong selama 2 tahun dan realisasi pelaksanaannya ternyata pelaksanaannya masih mempunyai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat menampilkan hasil yang diharapkan. Kelemahan utama ada pada proses perencanaannya. Dampak kelemahan ini berlanjut pada pelaksanaan yang kurang mendapat partisipasi dari masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan PHBM yang seharusnya dilakukan setiap tahun juga tidak pernah dilaksanakan, sehingga tidak ada umpan balik untuk menyempurnakan program. Dengan memperhatikan pelaksanaan PHBM selama dua tahun lalu serta persepsi dan partisipasi masyarakat, ada tiga sistem yang harus disempurnakan, yaitu sistem

perencanaan, sistem pelaksanaan dan sistem pengendaliannya. Model penyempurnaan ketiga sistem tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.3.2 Model penyempurnaan PHBM

5.3.2.1 Penyempurnaan Sistem Perencanaan

Dalam menyempurnakan sistem perencanaan PHBM, perlu ditinjau terlebih dahulu sistem perencanaan PHBM yang berlaku pada saat ini, sebagaimana termuat dalam Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001, yaitu:

- a. Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dilakukan bersama antara perusahaan dan masyarakat desa hutan melalui perencanaan partisipatif.
- b. Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan di wilayah kerja perusahaan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasar hasil perencanaan partisipatif.
- c. Pengertian Perencanaan partisipatif adalah kegiatan merencanakan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat oleh perusahaan dan masyarakat desa hutan atau perusahaan dengan pihak yang berkepentingan, berdasarkan Pengkajian Desa Partisipatif (PDP) dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan.
- d. Pengertian Pengkajian Desa Partisipatif (PDP) adalah metode kajian terhadap kondisi desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama, guna memberdayakan masyarakat desa yang bersangkutan, agar memahami kondisi desa dan kehidupannya, sehingga mereka dapat berperan langsung dalam pembuatan rencana dan tindakan secara partisipatif.
- e. Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan terpadu mulai dari

inventarisasi sumberdaya hutan pada penataan hutan atau penataan hutan ulang, atau pada saat dilakukan penyusunan rencana tahunan, sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku.

- f. Rencana pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat diintegrasikan dengan pembangunan wilayah.

Untuk mengetahui lebih lanjut apakah Perencanaan partisipatif dan Pengenalan desa partisipatif yang diamanatkan dalam Keputusan tersebut tepat untuk merencanakan PHBM, di bawah ini akan diuraikan mengenai teori perencanaan dan Pengenalan desa partisipatif.

Hadi (2001) menyatakan beberapa ahli telah mengembangkan teori perencanaan, namun kategorinya mempunyai persamaan. Selanjutnya disebutkan bahwa Hudson (1979) dalam Hadi (2001) membagi teori perencanaan kedalam lima kategori yang meliputi sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi dan radikal.

Diantara kelima kategori teori perencanaan yang diajukan oleh Hudson tersebut, sistem perencanaan seperti yang maksud Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 masuk dalam kategori Perencanaan Transaktif. Lebih jauh dijelaskan oleh Hadi (2001) bahwa kunci dari gagasan Perencanaan Transaktif ini adalah evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Beberapa hal yang perlu diketahui dari teori perencanaan yang disebut pula Perencanaan Partisipatif adalah:

- a. Perencanaan Transaktif dilakukan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang terpengaruh melalui dialog personal.

Dialog personal merupakan proses pembelajaran yang timbal balik yang merupakan aspek penting dari proses perencanaan. Melalui dialog, perencana dapat menjembatani teori dengan praktek untuk membawa

perubahan sosial. Tujuan dari dialog adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, nilai dan perilaku, kapasitas untuk tumbuh melalui kerjasama dan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

- b. Perencanaan Transaktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menjembatani *communication gap* antara pengetahuan teknik dari para perencana dengan pengetahuan keseharian dari masyarakat.

Perencanaan ini membuat jarak antara perencana yang memiliki pengetahuan yang telah dikodifikasikan (*processed knowledge*) dan masyarakat yang mendasarkan pada pengalaman keseharian menjadi semakin mendekat. Dalam dialog, perencana dan masyarakat saling belajar. Perencana belajar tentang pengetahuan keseharian, sedang masyarakat belajar tentang pengetahuan teknis. Citra tentang suatu yang umum dan pemahaman baru tentang kemungkinan adanya perubahan berkembang dan ditemukan melalui dialog.

- c. Perencanaan Transaktif dapat didayagunakan sebagai media untuk memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan.

Pendayagunaan Perencanaan Transaktif sebagai media dalam mana perencanaan dapat bertindak sebagai mediator. Fungsi mediator adalah memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan mendasarkan pada *interest* termasuk *interest* dari masyarakat. Pencapaian kesepakatan melalui forum mediasi (perundingan) merupakan strategi yang baik karena akan membuahkan hasil yang win-win. Kesepakatan akan ditaati oleh para pihak karena mereka merasa menjadi bagian dalam perundingan.

Hadi (2001) menyatakan bahwa seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia, perencanaan transaktif menjadi media yang dicita-citakan untuk didayagunakan. Salah satu tuntutan reformasi adalah demokratisasi. Hal ini menuntut adanya keikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka. Namun diakui bahwa

perencanaan transaktif (partisipatif) agak sulit untuk memenuhi kriteria kelayakan yang didasarkan atas data dan analisis yang baik, sekaligus dapat mengakomodasi aspirasi, gagasan dari masyarakat yang akan terpengaruh oleh suatu keputusan.

Sehubungan dengan teori Perencanaan Partisipatif dalam merencanakan PHBM, data dan analisis harus dipertajam dengan memperhatikan fungsi hutan dalam menjaga lingkungan, dengan alasan:

- a. Ditinjau dari kurun waktu, pengelolaan hutan harus menjangkau masalah-masalah yang muncul untuk jangka panjang, tidak hanya masalah aktual yang dihadapi pada waktu perencanaan disusun.
- b. Hutan mempunyai multi-fungsi yang bersifat kompleks dan mencakup hajat orang banyak untuk wilayah yang luas yaitu pada satu Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga pengelolaan hutan harus tidak hanya mengutamakan kepentingan masyarakat di sekitar hutan saja.
- c. Untuk mewujudkan kedua masalah tersebut sampai bentuk rencana operasional PHBM, rekayasa pengelolaan hutan harus bertitik-tolak dari landasan teknik kehutanan, mulai dari sifat-sifat silvikultur setiap jenis atau komposisi jenis-jenis yang akan diusahakan sampai pemanenannya.

Berdasar tiga alasan itu, maka kalau Perencanaan Partisipatif (Transaktif) hanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari pendapat individu rakyat yang bertempat tinggal di sekitar hutan tidaklah memadai. Pendapat individu tersebut di samping lebih banyak mementingkan kebutuhan pribadi juga jarang yang memberikan pandangan untuk masalah jangka panjang atau masalah yang dihadapi orang lain yang bertempat tinggal jauh dari hutan. Perencana PHBM harus mampu mengumpulkan pendapat dan kepentingan masyarakat luas serta mampu memprediksi perkembangan masalah-masalah tersebut di masa mendatang untuk digunakan dalam merumuskan rencana PHBM dengan memadukan kepentingan kehutanan, lingkungan hidup, dan masyarakat luas. Prediksi

memang merupakan bagian yang tak pernah dapat dilepaskan dari tugas perencana PHBM. Dengan kata lain, perencana pengelolaan hutan harus mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat luas sehingga sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dirumuskan benar-benar bermanfaat secara adil dan demokratis. Di samping itu rencana pembangunan hutan dengan sistem PHBM harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan wilayah sehingga data dan rencana pengembangan sektor lain yang cukup berpengaruh terhadap kehutanan juga perlu diketahui. Prosedur perencanaan yang digunakan dalam merancang sistem PHBM ini harus bersifat menyeluruh dan dinamik sepanjang waktu.

Untuk dapat menjadi landasan perencanaan PHBM, maka data dan informasi yang diperoleh harus cukup akurat. Oleh karena itu data yang di kumpulkan dengan metoda memahami desa secara cepat atau Rapid Rural Appraisal (RRA) saja tidak memadai. Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 menyatakan dalam merencanakan PHBM, Perencanaan partisipatif dilakukan berdasar Pengkajian Desa Partisipatif (PDP). Menurut penjelasan Perhutani, bahwa yang dimaksud dengan metode PDP adalah sama dengan metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Baiquni ((1999) mengemukakan PRA merupakan pendekatan dan metode partisipatif yang menekankan pada proses, pada belajar, pada pengkayaan pengalaman dan pada pencerahan. PRA mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengkaji keadaan, permasalahan dan potensi sendiri dalam rangka penyusunan program yang relevan, perencanaan yang realistis dan kegiatan aksi yang dapat dikerjakan serta memberi manfaat.

Prinsip PRA yang dikembangkan oleh Baiquni adalah sebagai berikut:

- a. Belajar dari pengalaman masyarakat. yaitu para penliti atau fasilitator pada awalnya justru belajar dari masyarakat desa secara langsung.

kemudian secara bertahap saling memberikan ilmu dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan. Selama ini aparat birokrasi "sok tahu" dan banyak mengajari masyarakat, padahal para petani atau masyarakat desa yang memiliki pemahaman paling baik terhadap alam sekitarnya, kejadian-kejadian sosial dalam kehidupannya dan perkembangan ekonomi kehidupannya.

- b. Berbuat bersama, berperan setara. Sikap dan tindakan ini merupakan proses yang memerlukan saling keterbukaan dan kesejajaran dalam bertukar wawasan, ketrampilan dan pengalaman. Menggunakan dan mengikuti proses belajar dengan tindakan yang fleksibel, improvisasi, dan penyesuaian yang wajar tidak bersifat menggurui apalagi memerintah secara tegas dan kaku. Proses semacam ini mungkin dianggap tidak terprogram dengan baik, tetapi proses yang dikembangkan disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, minat dan kebutuhan masyarakat. Perlu mulai menghindari atau mengurangi model cetak biru rencana (blue print planning) seperti yang dominan dilakukan pada masa lalu.
- c. Menyeimbangkan atau mengurangi bias. Kini mulai disadari bahwa penelitian dan pelaksanaan program pembangunan model konvensional selama ini penuh dengan bias, seperti bias kota, bias ilmiah, dan bias birokrasi, bahkan bias politik. Guna mengurangi bias tersebut, sejumlah metode dan teknik komunikasi PRA dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.
- d. Membuka kesadaran baru, tidak hanya masyarakat tetapi juga para peneliti dan fasilitator yang terlibat dapat menemukan kesadaran baru. PRA lebih banyak mendengarkan dan menggali aspirasi masyarakat, memahami kepentingan petani kecil dan membebaskan diri dari berbagai sistem yang menjerat, membodohi, dan mengeksploitasi. Berbagai perbedaan pendapat yang mungkin timbul merupakan rahmat yang bermanfaat.

- e. Penemuan dan membangun rasa percaya diri. Proses partisipasi yang diwujudkan melalui pengalaman kecil pada program yang sederhana dan berjangka pendek, penting artinya dalam proses awal kegiatan PRA. Apabila terjadi kegagalan, masyarakat masih dapat mengatasi sebagai proses belajar; dan bila berhasil, maka masyarakat akan dapat menemukan kembali rasa percaya diri. Selama ini banyak program pembangunan yang bersifat top-down atau blue-print berambisi membuat kegiatan besar dan mahal serta banyak asumsi yang dibangun oleh "pihak luar" atau "para pakar".
- f. Solidaritas membangun kemitraan. Seringkali program penelitian dan kegiatan pembangunan berhenti setelah periode selesai dan anggaran telah habis, aparat birokrasi tidak ada hubungan lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. PRA mengikuti proses interaksi yang intens dan mendalam, sehingga memungkinkan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan diwujudkan dalam kemitraan selanjutnya untuk kepentingan yang lebih luas.
- g. Memperkaya pengetahuan dan budaya lokal. PRA dapat menjadi proses yang dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan dan budaya lokal serba beragam, setelah selama ini didominasi oleh pengetahuan asing dan budaya serba seragam. Keberagaman adalah kelestarian, merupakan prinsip penting dalam ekologi yang akhir-akhir ini diterjemahkan dalam pembangunan berkelanjutan.

Dari uraian diatas, penggunaan model Perencanaan Partisipatif yang dilandasi PRA sudah tepat untuk digunakan dalam menyusun rencana PHBM. PRA harus dilaksanakan oleh tenaga yang ahli di bidang itu dengan kecermatan yang cukup tinggi serta rencana pembangunan hutan harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan wilayah berpengaruh terhadap kehutanan.

Sesuai dengan karakteristik perencanaan kehutanan pada umumnya, perencanaan PHBM juga harus dibuat dalam tiga jangka, yaitu jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

- b. Rencana PHBM jangka panjang meliputi jangka waktu selama daur tanaman pokok kehutanan, yang di Desa Jegong adalah 70 tahun. Rencana jangka panjang ini memberi arah pengelolaan hutan berisi uraian tentang maksud dan tujuan, visi dan misi, garis-garis besar cara pelaksanaan PHBM serta outcome kualitatif yang didapat dengan penerapan PHBM.
- c. . Rencana jangka menengah meliputi jangka waktu sepuluh tahunan. Dipilihnya jangka waktu sepuluh tahunan untuk rencana jangka menengah ini disesuaikan dengan jangka waktu Rencana perusahaan hutan yang dibuat Perhutani. Penyesuaian ini dimaksudkan agar kegiatan LMDH dalam PHBM sinkron dengan kegiatan Perhutani dalam tugas-tugas perusahaan hutan. Rencana sepuluh tahunan ini berisi kegiatan teknis yang akan dikerjakan dalam waktu sepuluh tahun kedepan. Kegiatan teknis kehutanan dan pengembangan ekonomi masyarakat dirancang menurut waktu dan tempat dalam arti kapan dan dimana kegiatan tersebut diselenggarakan, yang kesemuanya itu disusun dalam kerangka pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Rencana ini dapat untuk menilai kinerja PHBM secara kuantitatif pada akhir jangka waktu perencanaan.
- d. Rencana tahunan dibuat untuk menjadi pedoman kegiatan yang akan dilakukan pada setahun mendatang. Rencana ini memuat secara detail kegiatan teknis kehutanan dan pengembangan ekonomi masyarakat, siapa yang akan melaksanakan, dimana kegiatan dilaksanakan, mengapa kegiatan tersebut harus dilaksanakan, serta bagaimana melaksanakannya

Hal yang harus diwaspadai adalah bahwa selama ini Perhutani selama ini dalam perencanaan pengelolaan hutannya telah terbiasa menggunakan model Perencanaan Sinoptik. Menurut Hadi (2001), Perencanaan sinoptik merupakan tradisi yang dominan dimana melihat perencanaan sebagai suatu yang ilmiah rasional dan non politis, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Perencanaan sinoptik bersifat rasional berarti metode yang digunakan mendasarkan pada pemilihan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan memilih jawaban yang benar yang mendasarkan kepada kajian dari konsekuensi dari alternatif solusi. Sifat non politik menunjukkan bahwa perencanaan merupakan persoalan teknis dan bukan kegiatan politik. berkaitan dengan tujuan-tujuan dan cara-cara yang berdasarkan pada sumber-sumber yang tersedia. Model ini juga menunjukkan bahwa tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas, karenanya perumusan kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan didasarkan terutama pada masalah teknis. Model perencanaan ini dieksplore terutama dari ilmu matematik dan teori sistem.
- b. Perencanaan sinoptik yang diterapkan untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, rasionalitasnya tergantung pada analisis teknis dan asumsi bahwa pengetahuan dapat membantu manusia melakukan kontrol terhadap lingkungan mereka. Hal ini direfleksikan dalam penggunaan model teknis dan matematis seperti rasio untung-rugi (cost and benefit ratio), riset operasi, analisa sistem dan riset peramalan.
- c. Perencanaan sinoptik juga disebut sebagai perencanaan yang menyeluruh yang ditandai dengan tujuan yang jelas, evaluasi yang eksplisit, dan jangkauan yang komprehensif. Dalam model perencanaan ini melihat perencanaan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang rasional

Pendapat Dalton sebagaimana dikutip Hadi (2001) mengatakan jika perencanaan sinoptik (rasional komprehensif) diterapkan pada organisasi

akan menghasilkan birokrasi yang sentralis, spesialis, situasi yang tidak manusiawi, sangat prosedural, banyak diskresi, kurang mengakomodasi banyak kepentingan dan distorsi komunikasi. Di sisi lain Hadi (2001) menyatakan, secara garis besar perencanaan sinoptik mampu menerjemahkan sesuatu yang kompleks ke dalam sesuatu yang simpel, realitas diekspresikan ke dalam model matematis dan teknis. Namun demikian perencanaan sinoptik dipandang gagal dalam mengkonsepsikan iklim sosial, ekonomis dan politis karena model ini mengabaikan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak ada dimensi sosial karena model perencanaan ini tidak memperhatikan faktor-faktor sosial seperti nilai, aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Model sinoptik dikritik karena terlalu menyederhanakan persoalan. Dalam perencanaan, yang lebih penting adalah mengenali berbagai pandangan yang berbeda dan bukan mengabstraksi dalam bentuk rasional. Model sinoptik melihat masyarakat sebagai sesuatu yang menyeluruh, lebih nyata (real) daripada sekumpulan individu atau kelompok yang pluralistik. Mengutip pendapat Linblom, Hadi (2001) menyatakan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas dasar persetujuan dan bukan dengan keputusan sepihak dari para perencana.

Hadi (2001) menyebutkan bahwa di Indonesia selama masa orde baru, perencanaan pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan nasional merupakan contoh perencanaan sinoptik. Perencanaan pembangunan yang demikian mengabaikan aspirasi dan kepentingan dari bawah yang sebenarnya harus memetik manfaatnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, perencanaan untuk PHBM dengan menggunakan teori Perencanaan Sinoptik tidak sesuai, dan yang paling baik adalah menggunakan teori perencanaan partisipatif yang dilandasi hasil PRA. Penyusunan perencanaan PHBM kemudian dilakukan melalui tujuh langkah perencanaan (*seven step planning*) sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah.

Langkah pertama dalam merencanakan PHBM adalah mengidentifikasi masalah mengenali segala bentuk permasalahan yang ada di desa yang akan dilakukan PHBM. Identifikasi permasalahan meliputi:

- a. Permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat desa.
- b. Permasalahan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa hutan.
- c. Permasalah yang berhubungan dengan akses ke sumberdaya hutan.
- d. Permasalahan yang menyangkut kondisi fisik desa dan hutan pangkuannya.
- e. Permasalahan yang menyangkut hubungan dengan pihak pengelola hutan dan stake holder lainnya.
- f. Permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan PHBM

2. Formulasi tujuan.

Setelah semua masalah yang relevan dengan PHBM selesai diidentifikasi, bersama masyarakat desa memformulasikan tujuan yang ingin dicapai dengan diselenggarakannya PHBM. Dalam memformulasi tujuan ini, karena PHBM adalah suatu bentuk pengelolaan hutan bersama, maka masyarakat desa hutan dengan Perhutani menetapkan visi dan misi bersama. Caranya adalah dengan memadukan visi misi Perhutani dengan visi misi masyarakat desa hutan untuk memenuhi kebutuhannya. Kesamaan visi misi ini sangat penting, visi dan misi akan merumuskan tujuan yang hendak dicapai bersama.

3. Penilaian situasi.

Penilaian situasi dilakukan dengan memperhatikan fakta, gejala dan kecenderungan yang akan terjadi di desa. Penilaian dilakukan terhadap situasi fisik dan non fisik, mengevaluasi perkembangan yang dulu pernah terjadi, perkembangan sekarang dan prediksi yang akan datang. Penilaian

situasi ini akan menciptakan sederet kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan.

4. Inventarisasi alternatif kebijakan.

Setelah berbagai kebijakan untuk menyelenggarakan PHBM ditemukan, maka diadakan inventarisasi kebijakan yang akan diambil. Terhadap alternatif kebijakan yang diperoleh disusun skala prioritas, alternatif kebijakan yang dianggap urgen dan mendesak untuk ditangani lebih dahulu diletakan sebagai prioritas tertinggi. Alternatif kebijakan dibahas kembali secara partisipatif beserta seluruh stake holder PHBM untuk dilakukan pemilihan.

5. Pilihan alternatif.

Pemilihan dilakukan terhadap alternatif kebijakan yang paling tepat, didasarkan atas hasil kajian kemampuan masyarakat desa untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkannya, kemampuan masyarakat desa untuk bergotongroyong dan menggalang swadaya serta kemampuan bermitra dengan pihak lain (seperti LSM, Lembaga Pendidikan, Birokrasi dan Lembaga Perbankan) dalam rangka mengelola hutan bersama Perhutani.

6. Kajian dampak.

Setiap kegiatan pasti menimbulkan dampak, bersifat positif atau negatif, baik besar maupun kecil, yang menimpa situasi fisik atau non fisik. Oleh karena itu sebelum mengambil keputusan, dampak yang akan terjadi akibat pemilihan alternatif kebijakan untuk melaksanakan PHBM perlu dikaji secara mendalam. Kajian dilakukan bersama antara masyarakat desa hutan dengan Perhutani, kalau perlu dibantu oleh pihak lain yang

terkait misalnya LSM, Birokrasi dan Perguruan Tinggi. Hasil kajian disepakati oleh semua pihak yang terkait dan dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan penerapan PHBM.

7. Pengambilan keputusan.

Setelah semua dampak yang mungkin terjadi karena pemilihan kebijakan telah dikaji secara cermat, maka keputusan mengenai kebijakan PHBM dapat diambil. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pelaksanaan PHBM yang sudah disepakati dan diputuskan harus menjadi pegangan LMDH dan Perhutani. Setiap anggota LMDH dan Petugas Perhutani harus mengerti akan rencana tersebut. Pengurus LMDH wajib untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat desa hutan melalui berbagai pertemuan dan Pejabat Perhutani harus menjelaskan kepada bawahannya dalam setiap kesempatan. Semua ini dilakukan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat dikembangkan mekanisme kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan.

dalam menyusun perencanaan PHBM harus dihindari distorsi oleh karena cara perencanaan yang biasa dilakukan oleh Perhutani yang pada umumnya masih terpaku pada pola lama yang bersifat sinoptik dan ditentukan dari atas (top down). Tahap-tahap perencanaan yang meliputi tujuh langkah (*seven step planning*) yaitu identifikasi masalah, formulasi tujuan, penilaian situasi, inventarisasi alternatif kebijakan, penellitan alternatif, kajian dampak dan pengambilan keputusan; oleh Perhutani biasanya dilakukan dan diputuskan pada level atas, atau hanya satu pihak. Masyarakat sebagai salah satu pihak terpenting belum ditempatkan pada posisi yang sejajar dengan pihak lainnya, banyak kegiatan yang direncanakan sebetulnya kurang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hal semacam ini sudah terlihat dalam perencanaan PHBM di Desa Jegong.

5.2.2.2 Penyempurnaan sistem pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tindakan atau realisasi dari gagasan yang telah diwujudkan dalam perencanaan. Pelaksanaan melihat apa yang akan dikerjakan, kemudian melibatakan siapa saja yang bekerja, kapan pekerjaan dimulai dan diselesaikan, bagaimana teknis prosedurnya, berapa jumlah biaya yang diperlukan dan lain-lain.

Tahap-tahap pelaksanaan PHBM berdasar pasal 9 Keputusan Gubernur Jateng No : 24 Tahun 2000 tanggal 22 September 2001

- a. Pengenalan program (sosialisasi);
- b. Persiapan prakondisi sosial
- c. Pelaksanaan program baik teknis maupun non teknis (pemberdayaan masyarakat);
- d. Pengembangan ekonomi kerakyatan;

5.2.2.2.1 Pengenalan program (sosialisasi)

Berdasar Keputusan diatas, tahapan awal PHBM dimulai dengan pengenalan program atau sosialisasi. Sesuai dengan model perencanaan PHBM yang bersifat partisipatif dengan pendekatan PRA, maka kegiatan awal yang bersifat sosialisasi tersebut, harus diubah menjadi kegiatan yang bersifat diskusi atau dialog.

Kegiatan sosialisasi mencerminkan bahwa keputusan mengenai kegiatan yang akan diselenggarakan sudah ada dan masyarakat tinggal diberitahukan untuk melaksanakannya. Sedangkan diskusi atau dialog menandakan bahwa Perhutani bersama masyarakat terlebih dahulu bersama-sama membahas ide atau gagasan suatu kegiatan, yaitu bentuk kegiatan, manfaat apa saja yang dapat dipetik dari kegiatan itu, bagaimana sebaiknya kegiatan itu dilaksanakan serta alternatif-alternatifnya, setelah itu barulah kegiatan tersebut disepakati untuk diputuskan. Perlu ditekankan disini, diskusi atau dialog berbeda dengan sosialisasi yang biasanya program

sudah disiapkan, masyarakat tinggal diberitahu bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan di desanya lengkap dengan aturan-aturan cara pelaksanaannya.

Pelaksanaan sosialisasi PHBM di Desa Jegong hanya dilakukan kepada tokoh masyarakat dan perangkat desa yang kemudian dilakukan sosialisasi susulan terhadap perwakilan masyarakat Desa Jegong. Yang menjadi pertanyaan apakah masyarakat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini menjadi representasi seluruh komponen dalam masyarakat desa hutan dan apakah masyarakat yang hadir itu mampu menyuarakan kebutuhan masyarakat desa hutan secara komprehensif. Apabila tidak, maka cara sosialisasi ini kurang efektif. Berkaitan dengan partisipasi yang timbul di Desa Jegong, jika mengacu pada pendapat Pretty (1996) mengenai tujuh tangga tipologi dari partisipasi maka yang didapat adalah Partisipasi karena diminta (*Participation by consultation*), yaitu keikutsertaan melalui diskusi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pemrakarsa kegiatan hanya memberi gambaran dari proses dan permasalahan tanpa harus memperhatikan pandangan masyarakat, dan masyarakat tidak diberi wewenang untuk ikut dalam pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi yang semacam ini sebenarnya bukan partisipasi tetapi lebih bersifat tokenisme.

Hasil penelitian di Desa Jegong menunjukkan bahwa dari 77,6% responden yang mengetahui akan adanya PHBM, hanya sebesar 54,8% saja yang menjadi anggota LMDH, selebihnya tidak merasa menjadi anggota. Alasan responden yang tidak menjadi anggota LMDH disebabkan karena ketidak tahuan mereka. Fakta tersebut menunjukkan kurang efektifnya pengenalan program pembangunan yang dilakukan dengan cara sosialisasi. Kegiatan sosialisasi pada umumnya merupakan kegiatan searah tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan komentar dan atau menolak hal-hal yang tidak disepakati.

Karena itu kegiatan sosialisasi sebenarnya hanya boleh dilakukan untuk memasyarakatkan keputusan-keputusan yang telah dirumuskan

bersama secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Adapun hal yang masih berupa konsep atau rancangan tidak cukup hanya disosialisasikan tetapi harus didiskusikan atau didialogkan agar memperoleh masukan dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang belum setuju ataupun yang menolaknya.

Diskusi atau dialog ini tentang PHBM pada awal ide ini muncul, juga mencakup proses penyadaran bagi Petugas Perhutani mengenai pentingnya pemberian kesempatan kepada masyarakat desa hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Diskusi atau dialog juga merupakan upaya penyadaran yang merupakan proses perubahan tingkah laku bagi petugas Perhutani, yang justru lebih sulit diubah tingkah lakunya karena merasa "lebih memiliki kekuasaan" dan merasa "lebih pintar" sebagai akibat feodalisme yang masih banyak melekat pada perilaku mereka.

5.2.2.2 Persiapan prakondisi sosial.

Selaras dengan pengertian tentang PHBM sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dengan senantiasa memperhatikan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka kegiatan perhutanan sosial akan melibatkan banyak pihak yang terkait. Untuk menampung keperluan ini diperlukan kelembagaan LMDH yang kuat.

Menurut Mardikanto (2003) kelemahan kelembagaan merupakan salah satu unsur penyebab kemiskinan, sebab kelemahan kelembagaan merupakan penghambat proses adopsi inovasi yang selain tidak mampu mengubah "budaya kemiskinan" pada gilirannya juga akan semakin menurunkan produktivitas dan merusak kelestarian lingkungan hidup. Kelembagaan yang kuat dan mampu melestarikan lingkungan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, perbaikan kesejahteraan masyarakat mensyaratkan adanya kelembagaan yang kuat

dan keadaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, kelembagaan memiliki arti penting bagi PHBM, baik kaitannya dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat, maupun dengan upaya pelestarian hutan dan lingkungan.

Kelembagaan LMDH Wana Lestari pada saat ini terdiri dari seorang Ketua yang dalam kegiatan dibantu oleh Wakil ketua, Sekretaris dan Bendahara. Seksi-seksi yang dibentuk dalam LMDH Wana Lestari adalah humas, keamanan, usaha, pemasaran hasil usaha, olahraga, agama, dan produksi. Kepala Desa Jegong dalam kepengurusan LMDH bertindak sebagai Pelindung. Apabila dilihat dari strukturnya, untuk awal kegiatan PHBM kelembagaan ini sudah cukup memadai dalam menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan LMDH. Masalahnya hanya terletak pada kemampuan personil yang duduk dalam kelembagaan tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, kelembagaan LMDH harus terbuka untuk disempurnakan, karena di masa mendatang PHBM akan banyak terkait dengan:

- a) Kelembagaan kelompok tani yang bekerja pada kawasan hutan (Kelompok Tani Hutan/ KTH)
- b) Kelembagaan Perhutani sebagai pengelola hutan.
- c) Kelembagaan pemerintah sebagai pemegang otoritas penentu kebijakan pembangunan kehutanan.
- d) Kelembagaan pelaku bisnis kehutanan.
- e) Kelembagaan penelitian/perguruan-tinggi selaku penyedia inovasi dan atau informasi yang diperlukan bagi pengelolaan hutan berkelanjutan.
- f) kelembagaan/organisasi kemasyarakatan (LSM) selaku pelaku pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian kelembagaan harus siap untuk dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Forum komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada tingkat Provinsi, Kabupaten Blora, Kecamatan Jati, dan Desa Jegong dibentuk dalam rangka mendorong proses optimalisasi dan berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Tugas Forum Komunikasi adalah:

- a) Memberikan masukan dalam penyusunan rencana PHBM.
- b) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PHBM sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, oleh Forum Komunikasi pada tiap-tiap tingkatan.
- c) Membantu kelancaran pelaksanaan PHBM.

Maksud pembentukan Forum ini sebenarnya baik, namun tindak lanjut setelah keluarnya Keputusan tentang pembentukan forum ini tidak ada, sehingga membuat forum tersebut tidak efektif. Hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini Forum Komunikasi PHBM pada semua tingkat belum pernah mengadakan pertemuan, apalagi kegiatan di lapangan.

Ketidak efektifan dari Forum Komunikasi PHBM ini disebabkan:

- a) Forum Komunikasi sampai saat ini belum membuat rencana kerja, sehingga belum mengerti apa yang harus dikerjakan, kapan mengerjakannya dan bagaimana cara mengerjakannya.
- b) Sumber Pembiayaan untuk kegiatan Forum Komunikasi tidak jelas.
- c) Anggota Forum Komunikasi terdiri dari pejabat-pejabat di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa yang sangat disibukan oleh tugas pokoknya masing-masing, sehingga tugas-tugas dalam forum tidak diutamakan.

Oleh karena itu Forum Komunikasi PHBM harus disempurnakan dengan cara:

- a) Keanggotaan forum dipilihkan personil yang mempunyai kemampuan dan waktu untuk menjalankan tugas Forum Komunikasi.

- b) Pembiayaan kegiatan Forum Komunikasi diperjelas sumbernya, yaitu dari APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan Perhutani.
- c) Dalam Keputusan tentang pembentukan forum ditegaskan tata waktu kegiatan forum.

5.2.2.2.3 Pelaksanaan program baik teknis maupun non teknis (pemberdayaan masyarakat)

a. Kegiatan peningkatan sumberdaya manusia.

Secara konseptual PHBM merupakan upaya peningkatan peranserta masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dalam kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan-hidup. Karena itu, pelaksanaan kegiatan PHBM tidak sekadar memberikan kegiatan alternatif agar masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tidak lagi merusak hutan, melainkan harus benar-benar diarahkan pada pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat desa hutan untuk bersama-sama mengelola, khususnya memanfaatkan sumberdaya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmurannya, dengan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Data mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Jegong sebagaimana halnya masyarakat desa hutan lainnya, menunjukkan bahwa desa hutan merupakan kawasan yang miskin. Hal tersebut ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan dan sempitnya kepemilikan lahan pertanian. Karena kondisinya yang miskin tersebut, maka masyarakat Desa Jegong dapat digolongkan sebagai kelompok ekonomi-lemah yang tidak saja lemah dalam pemilikan modal (aset) dan teknologi, tetapi umumnya juga lemah dalam pengetahuan dan ketrampilannya. Di samping itu, seperti halnya masyarakat subsisten lainnya, menurut Mardikanto (2003) mereka juga sering

lemah dalam hal sikapnya untuk melakukan perubahan-perubahan demi kemajuannya sendiri.

Pelatihan yang dilakukan pada awal kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan anggota LMDH dalam melaksanakan kegiatan PHBM. Perbaikan kualitas sumberdaya manusia melalui beragam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan terkait dengan PHBM diawal kegiatan sudah tepat, karena dengan penambahan pengetahuan mengenai keterampilan, teknologi keorganisasian dan usaha produktif akan merupakan investasi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Namun demikian pelatihan yang telah diselenggarakan bagi masyarakat Desa Jegong sangat terbatas baik materinya maupun anggota masyarakat yang mengikutinya, dan setelah itu tidak ada pembinaan untuk mengadakan pelatihan secara berkelanjutan. Hasil pelatihan yang telah diberikan juga tidak nampak dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan LMDH.

Penyempurnaan terhadap kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam kegiatan PHBM harus dirancang sebagai proses belajar bersama yang partisipatif dan berkelanjutan. Artinya bahwa semua kegiatan yang dilakukan LMDH dalam PHBM, baik sebelum dan selama kegiatan berlangsung harus diawali dan dibarengi dengan kegiatan pelatihan atau proses pembelajaran bersama. Pelatihan ini dapat dilakukan oleh sesama anggota LMDH, LSM pendamping, Petugas Perhutani, Perguruan Tinggi ataupun birokrasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan.

Dalam pelaksanaan PHBM, kegiatan pelatihan kepada semua stakeholders, terutama masyarakat desa-hutan dan petugas Perhutani, minimal meliputi:

- a) Pengetahuan mengenai makna PHBM, yang menuntut partisipasi semua pihak sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

- b) Pelatihan mengenai pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBM, sejak persiapan kegiatan dan perumusan sistem pengelolaan yang disepakati oleh seluruh warga masyarakat setempat
- c) Pelatihan manajemen PHBM, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, yang kesemuanya harus dilaksanakan melalui proses yang partisipatif
- d) Pelatihan teknik budidaya agroforestry, berupa wanatani, wanamina, wanafarma dan lain-lain yang berorientasi pada optimasi sumberdaya hutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dengan senantiasa memperhatikan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup.
- e) Pelatihan teknik pengolahan dan pemanfaatan hasil hutan dan pertanian, baik yang berupa kayu maupun non-kayu pangan maupun non pangan.
- f) Pelatihan keterampilan usaha-usaha produktif, baik yang terkait dengan kegiatan PHBM maupun kegiatan-kegiatan lainnya, seperti: pertukangan, perdagangan, kerajinan, dan lain sebagainya, yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa hutan.
- g) Pelatihan kewirausahaan, agar masyarakat desa hutan mampu berswakarsa dan berswadana melaksanakan dan membiayai kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki kesejahteraannya, melalui optimasi sumberdaya hutan yang dikelolanya dengan senantiasa memperhatikan kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan-hidup.
- h) Pelatihan keorganisasian, agar masyarakat desa hutan mampu menumbuh-kembangkan LMDH dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui PHBM untuk peningkatan kesejahteraan, kelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidup.
- i) Pelatihan manajemen usaha, agar semua kegiatan produktif yang diupayakan dalam kegiatan PHBM dapat dikelola secara efisien dan terus

berkembang, yang sekaligus perbaikan kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya.

Pelatihan yang disebut diatas dapat ditambah dengan pelatihan-pelatihan lainnya yang relevan dengan kegiatan PHBM.

b. Pelaksanaan kegiatan.

Dalam sistem PHBM, Perhutani dan masyarakat desa hutan merupakan pihak-pihak utama yang berperan. Dengan demikian masyarakat desa hutan tidak lagi dipandang sebagai objek namun sebagai subjek. Mengingat bahwa salah satu prinsip yang harus dipegang dalam PHBM adalah prinsip kelembagaan, maka peran masyarakat desa hutan sebagai pihak dalam PHBM harus diwujudkan dalam suatu bentuk kelembagaan yang kemudian disebut sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kelembagaan tersebut harus merupakan representasi utuh dari masyarakat desa setempat, yang dibentuk berdasar aspirasi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hutan yang merupakan cerminan dari kekhasan lokal (local spesifik). Dengan demikian segala keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga tersebut adalah dari dan untuk masyarakat desa secara keseluruhan.

Dengan demikian berbeda dengan model-model Pembinaan Masyarakat Hutan Desa yang pernah dilaksanakan Perhutani sebelumnya, yaitu kontrak kerja dengan Perhutani dilakukan secara individual dengan masyarakat sekitar hutan. Pada PHBM kerjasamanya melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan wadah masyarakat desa hutan yang mewakili masyarakat desa untuk melakukan kerjasama pengelolaan hutan bersama Perhutani.

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi anggota LMDH dalam kegiatan belum optimal, baik dalam kegiatan LMDH maupun PHBM. Usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Jegong dalam kegiatan di

LMDH maupun dalam PHBM harus terus diupayakan melalui peningkatan partisipasi.

Dalam kegiatan PHBM, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti mereka benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki kualitas hidupnya.

PHBM merupakan kesempatan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya sekaligus melestarikan lingkungan. Dengan adanya kesempatan yang diberikan ini, diharapkan masyarakat akan termotivasi dalam meningkatkan kemampuannya untuk dapat berpartisipasi.

Mardikanto (2003) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- b. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
- c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Perlu disadari meskipun diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, akan tidak banyak berarti jika masyarakatnya tidak mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi. Yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah :

- a) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk memperbaiki kualitas kehidupnya

- b) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
- c) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan peluang lain yang tersedia.

Dalam PHBM kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk berpartisipasi dalam PHBM, belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya partisipasi, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk turut dalam kegiatan LMDH. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan dan selalu aktif dalam memanfaatkan setiap kesempatan. Hal ini terlihat bahwa meskipun kesempatan untuk berpartisipasi dan peningkatan kemampuan sudah diberikan pemerintah untuk mengelola hutan, namun partisipasi masyarakat Desa Jegong dalam PHBM belum memenuhi harapan. Penyempurnaan dalam meningkatkan kemampuan anggota LMDH dalam menjalankan PHBM dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pemberian kesempatan dalam PHBM harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kearifan tradisional dalam kaitannya dengan pelestarian sumberdaya hutan dan lingkungan hidupnya; dan bukannya pemberian kesempatan itu dilandasi oleh prasangka buruk yaitu agar masyarakat sekitar hutan tidak melakukan pengrusakan hutan.
- b) Mengadakan dialog yang intensif dan berkelanjutan, yang tidak saja berupa diskusi tentang adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat berupa PHBM, melainkan juga disertai dengan dorongan dan harapan-harapan agar masyarakat mau berpartisipasi, serta berbagai upaya pelatihan yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi.

- c) Terkait dengan dorongan dan harapan yang disampaikan apabila PHBM dilaksanakan, perlu adanya penjelasan kepada masyarakat tentang besarnya manfaat ekonomi maupun non-ekonomi yang dapat secara langsung dan atau tak langsung dinikmati sendiri maupun yang akan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
- d) Perlu ada perubahan pemahaman dari pihak Perhutani, bahwa pengembangan partisipasi masyarakat dalam PHBM bukanlah biaya sosial yang merupakan pemborosan, tetapi harus dipahami sebagai investasi sosial yang akan memberikan manfaat berupa kelestarian hutan dan lingkungan hidup dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

c. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Tujuan diselenggarakannya PHBM tidak terbatas pada kegiatan pelestarian sumberdaya hutan, tetapi juga mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan telah dicoba untuk dilakukan di Desa Jegong, meskipun baru tahap awal. Pengembangan ekonomi kerakyatan diawali dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, dengan harapan nantinya masyarakat desa Jegong mampu membangun ekonomi desanya secara mandiri. Bentuk pelatihan ini adalah pelatihan pembuatan pupuk kompos, mengirim KTH anggota LMDH Wana Lestari ke acara Temu KTH se Unit I . Dalam acara tersebut KTH-KTH bisa untuk mengetahui kemajuan LMDH lain, memperkenalkan produk-produk unggulan mereka dan sekaligus membuka peluang pasar.

Pelaksanaan ekonomi kerakyatan pada pelaksanaan PHBM di Desa Jegong tersebut ternyata belum berjalan dengan baik, karena semua usaha kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatannya masih sepenuhnya

tergantung dari Perhutani. Pembelian hasil produksi LMDH yang berupa pupuk kandang dan pupuk kompos seluruhnya adalah perhutani. Kegiatan usaha produktif dapat dikatakan belum ada.

Untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan pada kegiatan PHBM, perlu melibatkan banyak pihak, yang tidak terbatas pada Perhutani saja, tetapi juga pihak-pihak lain seperti: Pemerintah, Lembaga Penelitian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, LSM, Pusat-pusat Informasi, Pelaku Bisnis, dan lain-lain. Dengan demikian PHBM perlu mengembangkan usaha kemitraan antara lain mitra-kerja dan mitra-usaha pada semua stakeholdersnya yaitu instansi Dinas kehutanan, dinas/instansi/lembaga pemerintah yang menangani kegiatan-kegiatan pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya yang bersifat saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat, saling percaya dan saling melindungi secara berkelanjutan. Kerjasama ini untuk dapat menekan semaksimal mungkin masalah klasik yang selalu dihadapi para petani, termasuk anggota LMDH adalah permodalan, pemasaran, teknologi serta manajemen.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam kegiatan PHBM, yaitu:

- a) Usaha yang dilaksanakan LMDH harus mencakup kegiatan yang berbasis lahan maupun yang berbasis non lahan dilaksanakan sama intensifnya.
- b) Komoditi yang diusahakan LMDH harus *marketable* (mudah dipasarkan), untuk memenuhi permintaan pasar baik lokal maupun global dalam jangka panjang.
- c) Komoditi yang diusahakan LMDH harus berdaya saing tinggi, baik yang menyangkut mutu, harga, jumlah dan kontinuitasnya produknya.
- d) Produk yang dihasilkan LMDH harus sesuai dengan spesifikasi lokasi, baik yang menyangkut kondisi teknis, ketersediaan sarana/prasarana ekonomi, maupun kesesuaian dengan nilai-nilai sosial-budaya setempat.

- e) Luasan kegiatan untuk LMDH, harus memenuhi skala usaha yang efisien, agar dapat menjamin kelangsungan usahanya.

5.3.2.3 Penyempurnaan sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian

Keputusan Gubernur tanggal 22 September 2001 Nomor: 24 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi mengamanatkan bahwa kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PHBM dilakukan secara berkala oleh LMDH dan Perhutani. Evaluasi terhadap PHBM dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan sekali oleh Forum Komunikasi PHBM pada tiap-tiap tingkatan. Adapun yang dievaluasi adalah perkembangan penerapan PHBM, mutu sumberdaya hutan, pendapatan masyarakat desa hutan, kinerja Perhutani, kontribusi terhadap keuangan daerah, peran dan tanggungjawab Perhutani, LMDH dan pihak yang berkepentingan dalam PHBM. Untuk keperluan pemantauan dan evaluasi akan diterbitkan dalam bentuk Pedoman monitoring dan evaluasi PHBM, namun pedoman monitoring dan evaluasi PHBM sampai sekarang belum diterbitkan. Dengan demikian Forum Komunikasi PHBM baik di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa belum pernah melakukan pemantauan maupun evaluasi.

Dinas Kehutanan Propinsi pernah mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh LMDH yang ada di Jawa Tengah. Maksud monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah adalah untuk memantau pelaksanaan kegiatan PHBM karena selama ini Forum Komunikasi PHBM belum pernah melakukannya. Pedoman evaluasi dibuat sendiri oleh Dinas Kehutanan Propinsi dan aspek-aspek yang dinilai adalah kelembagaan, administrasi, aktifitas kelompok, dinamika kelompok, persepsi, kesejahteraan dan kelestarian. Evaluasi kegiatan PHBM yang dilakukan dengan cara ini tentu saja tidak efektif karena dilakukan

sendiri oleh birokrasi, masyarakat hanya menjadi obyek evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah dibuat birokrasi.

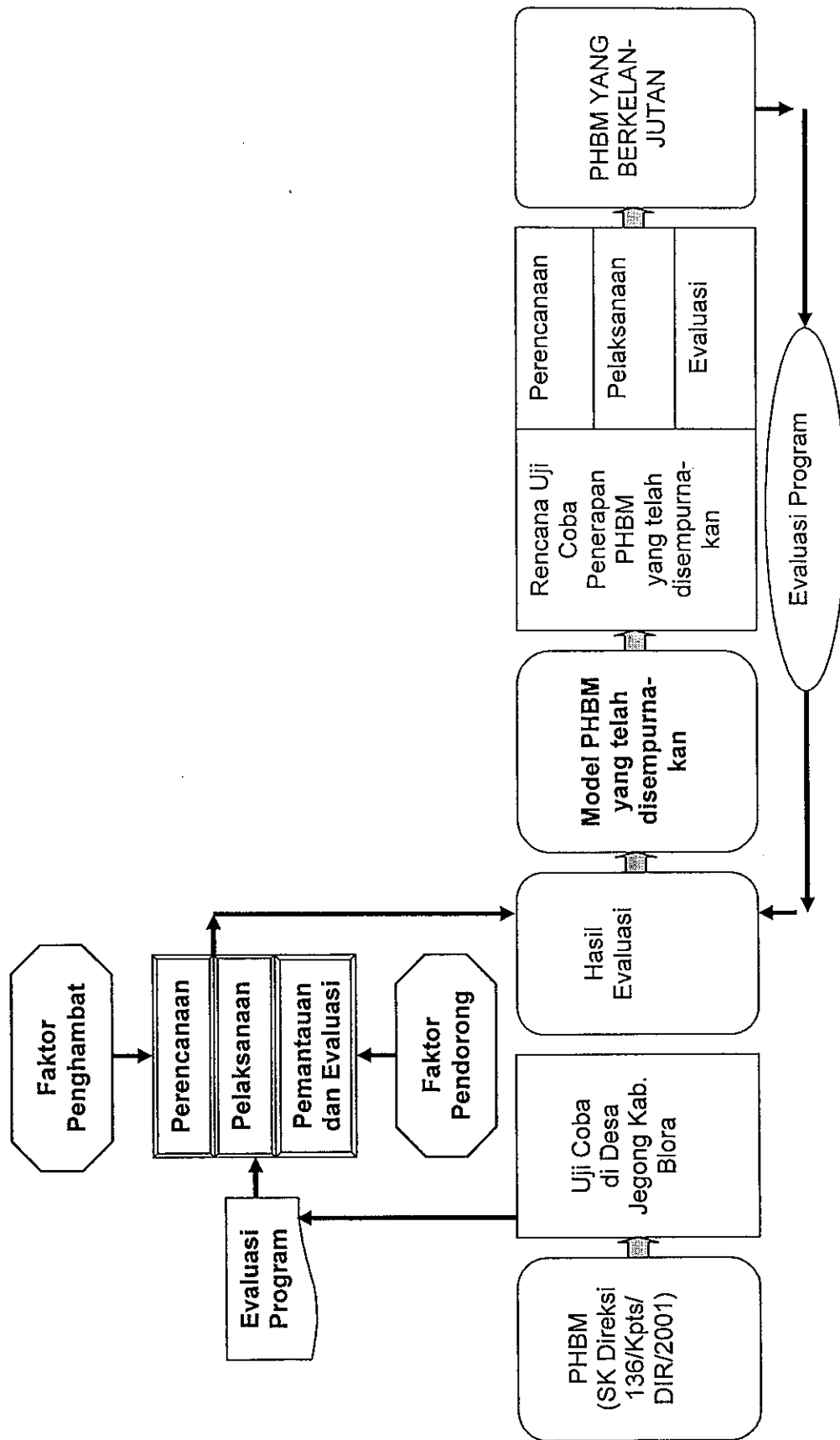
Oleh karena kegiatan PHBM adalah kegiatan partisipatif, maka untuk menjamin keberhasilan kegiatan PHBM, kegiatan pemantauan dan evaluasi juga harus dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat. Untuk itu diperlukan diskusi dan dialog terlebih dahulu, yang mencakup perumusan indikator, ukuran keberhasilan, pengumpulan data untuk pembuktian, analisis, penilaian dan rumusan tindak lanjut yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mendapatkan penilaian terhadap input, proses, output dan dampak kegiatan (outcome) PHBM yang kesemua itu harus dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan. Dengan demikian hasil evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik bagi perencanaan maupun pelaksanaan PHBM untuk menyempurnakan konsep PHBM dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Penyempurnaan Model PHBM yang telah dijelaskan di muka, maka alur pikir Penyempurnaan Model PHBM untuk menuju kepada PHBM berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya sebagaimana disajikan pada Gambar 5, 6, 7 dan 8. Adapun hubungan antara Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan Kelestarian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Gambar 9. Garis-garis besar kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka penyempurnaan Model PHBM dapat dilihat pada **Tabel 57**.

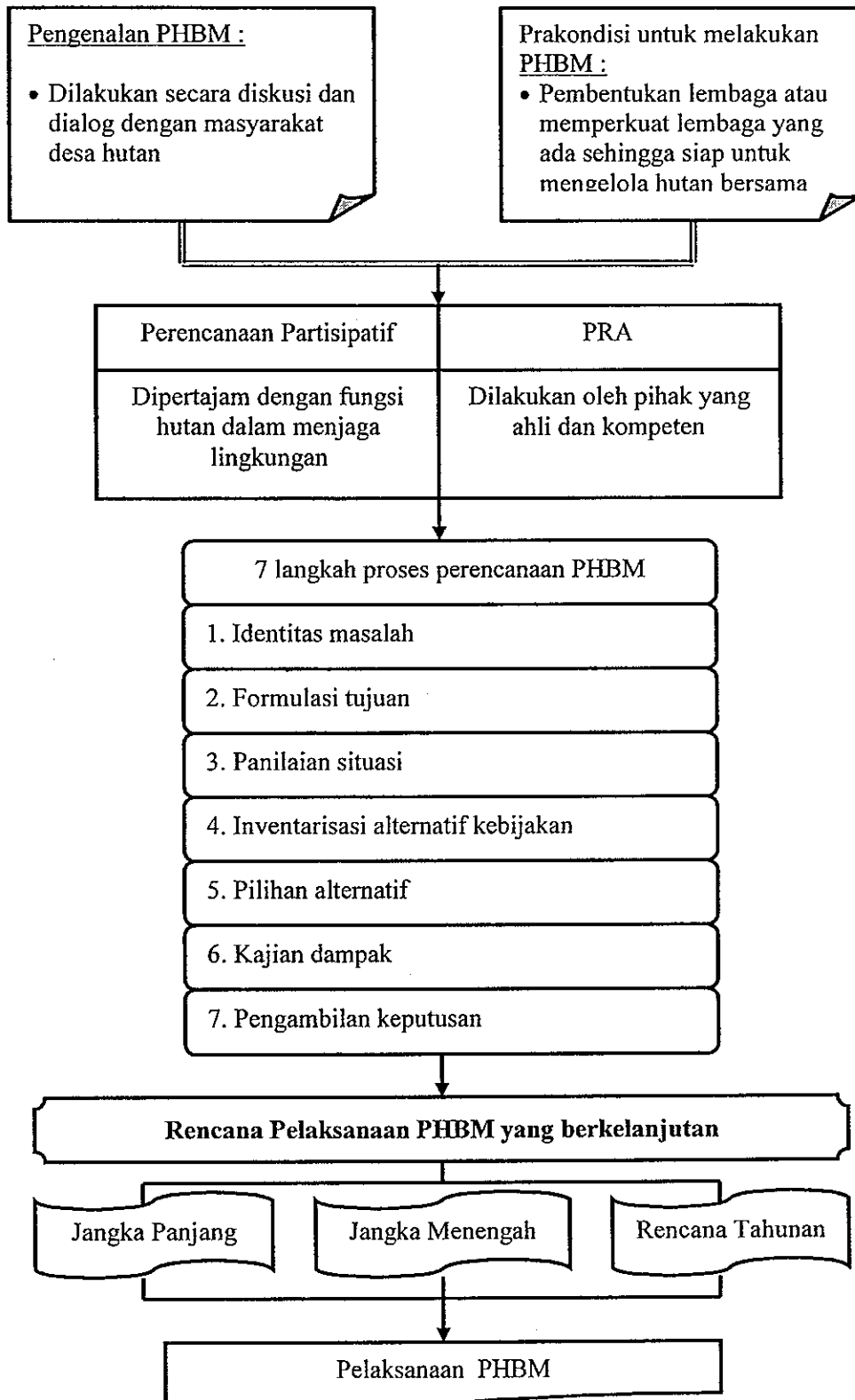
Tabel 57. Model Penyempurnaan Perencanaan dan Pelaksanaan PHBM

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	KEGIATAN
1.	PENGENALAN PHBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi/dialog. 2. Sosialisasi terhadap hal-hal yang telah disepakati.
2.	PRAKONDISI PHBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan petani / petugas. 2. Pembentukan LMDH
3.	PERENCANAAN PHBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan partisipatif. 2. Penilaian Partisipatif (PRA) 3. Tujuh langkah perencanaan
4.	PELAKSANAAN KEGIATAN PHBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan teknik budidaya, organisasi dan manajemen usaha. 2. Pelaksanaan kegiatan produktif 3. Perlestarian hutan dan lingkungan hidup
5.	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN PHBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi partisipatif 2. Perumusan tindak lanjut untuk penyempurnaan model.

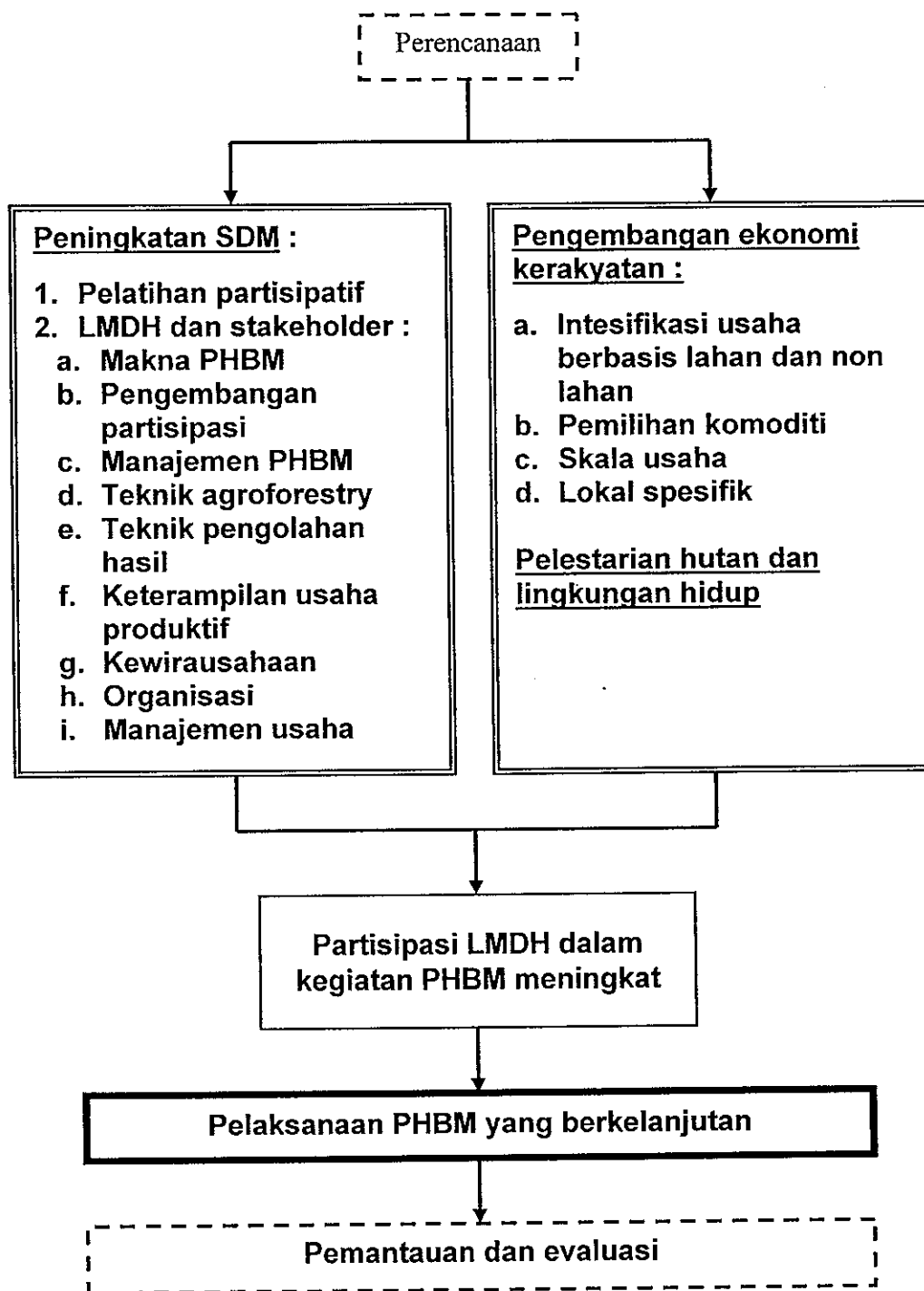
Gambar 5. Alur pikir penyempurnaan model PHBM.



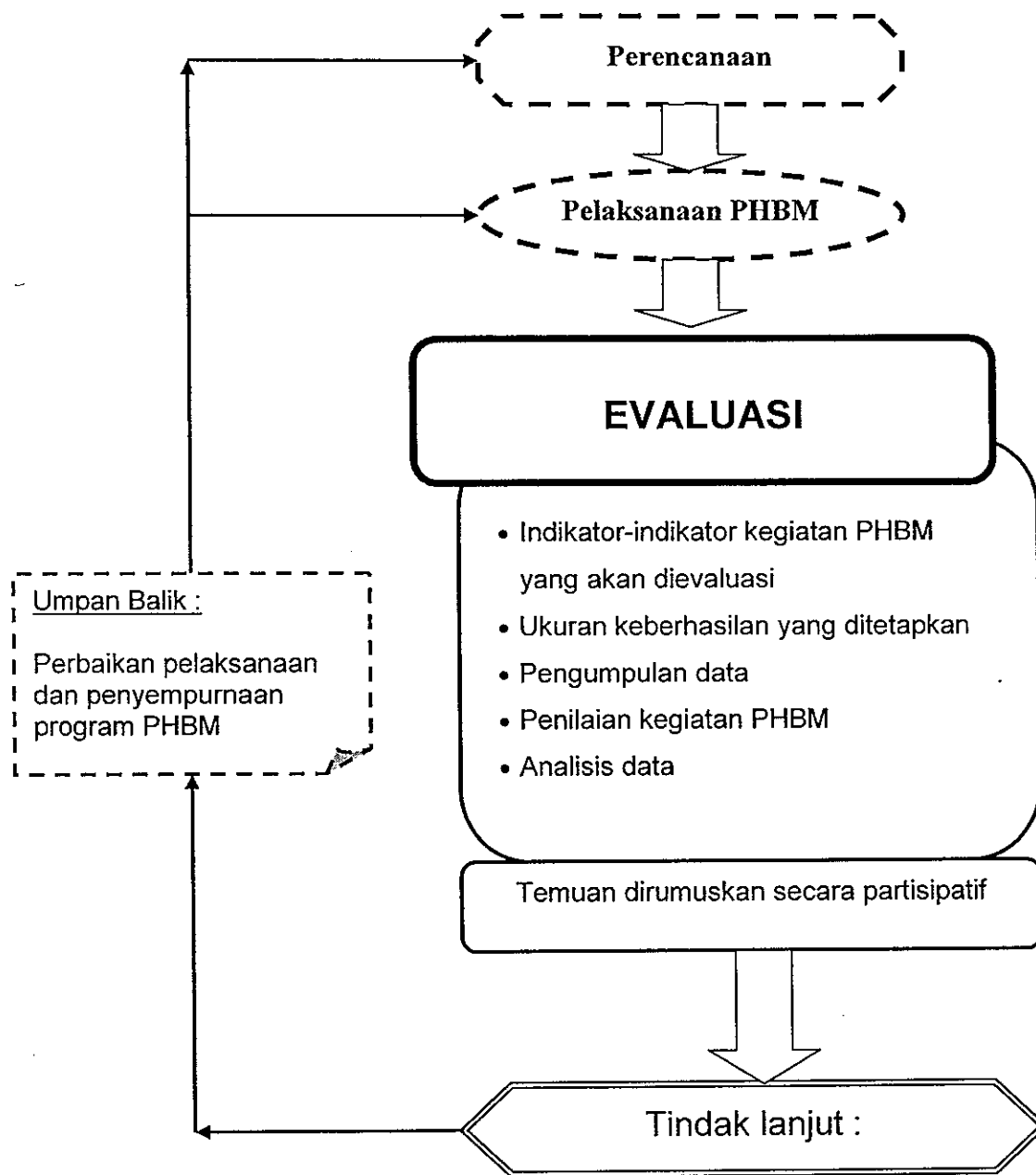
Gambar 6. Alur pikir penyempurnaan sistem Perencanaan PHBM



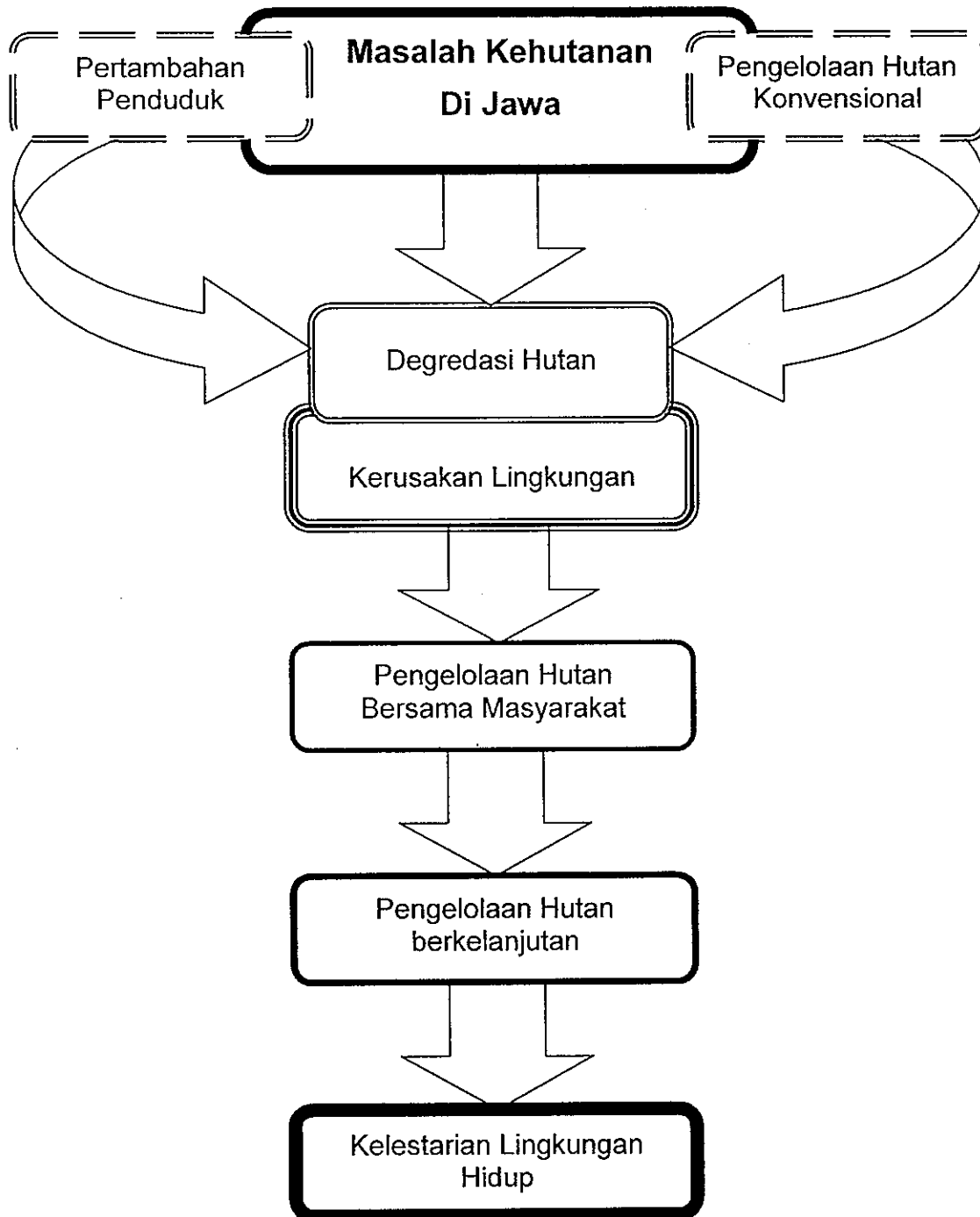
Gambar 7. Alur pikir penyempurnaan sistem pelaksanaan PHBM



Gambar 8. Alur pikir penyempurnaan sistem evaluasi PHBM.



Gambar 9. Alur pikir hubungan PHBM dengan kelestarian lingkungan hidup.



BAB VI

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan terhadap temuan-temuan hasil penelitian. Kesimpulan dan saran yang ditarik berdasar pelaksanaan PHBM di Desa Jegong, Faktor pendorong dan penghambat keberhasilan PHBM serta Model penyempurnaan PHBM dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan.

6.1 KESIMPULAN.

6.1.1 Pelaksanaan PHBM di Desa Jegong.

- a. Perencanaan dan penentuan Desa Jegong sebagai desa model PHBM tidak didahului dengan PDP/PRA, tetapi hanya berdasar keadaan desa dan hutan pangkuannya.
- b. Pengenalan program PHBM baru sebatas sosialisasi kepada tokoh masyarakat, pamong desa dan sebagian kecil masyarakat, belum berupa diskusi atau dialog.
- c. Rencana penggunaan dana bagi hasil yang diterima LMDH kurang disosialisasikan kepada masyarakat desa Jegong sehingga menimbulkan prasangka negatif dan membuka intervensi pihak luar.
- d. Forum Komunikasi PHBM yang bertugas untuk mendorong dan mendukung keberhasilan PHBM serta mengadakan evaluasi kegiatan PHBM tidak efektif, karena sebagian besar anggotanya adalah pejabat pemerintah yang telah disibukan oleh tugas pokoknya.
- e. Masyarakat Desa Jegong mengakui kepemilikan hutan oleh Perhutani dan manfaat hutan yang berupa ekologi, ekonomi dan

sosial, dan mereka menghendaki agar hutan dikelola secara bersama.

- f. Terdapat kesenjangan persepsi mengenai pelaksanaan PHBM antar penduduk pada dukuh-dukuh di Desa Jegong, namun mereka mempunyai persepsi yang sama yaitu PHBM dapat meningkatkan kesejahteraannya.
- g. Setelah diselenggarakannya PHBM di Desa Jegong, masyarakat merasakan penjarahan hutan sudah sangat berkurang karena tumbuh persepsi:
 - 1). Hutan merupakan pelindung lingkungan hidup mereka.
 - 2). Tanggungjawab pengamanan hutan bukan tugas Perhutani dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat.
 - 3). Perilaku petugas Perhutani yang makin simpatik.
- h. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Jegong untuk menjadi anggota LMDH belum cukup tinggi, karena keterkaitan dengan domisili dan kurangnya pengetahuan akan LMDH, namun warga yang menjadi anggota atas kemauan sendiri cukup tinggi.
- i. Partisipasi kehadiran anggota LMDH dalam pertemuan rutin dan keaktifan dalam menyampaikan usul-usul belum terlalu menggembirakan, pengetahuan anggota LMDH tentang adanya rencana kerja dan cara melaksanakan PHBM cukup tinggi, namun relatif sedikit diantara mereka yang pernah membaca naskah rencana kerja tersebut.
- j. Bentuk sumbangan terhadap kegiatan dan keikut sertaan anggota LMDH dalam kegiatan PHBM sebagian besar masih berupa sumbangan pemikiran dan tenaga, menggarap lahan Perhutani sebagai pesanggem dan memanfaatkan modal usaha simpan pinjam.

- k. PHBM di Desa Jegong kurang berhasil karena lemahnya perencanaan dan rendahnya partisipasi anggota LMDH dan masyarakat Desa Jegong dalam kegiatan PHBM.

6.1.2 Faktor-faktor pendorong dan penghambat.

- a. Faktor pendorong keberhasilan PHBM dalam rangka kelestarian hutan dan lingkungan berupa adanya perubahan kebijakan pemerintah dan Perhutani, kesempatan yang diberikan Pemerintahan maupun Perhutani dan persepsi positif masyarakat terhadap PHBM.
- b. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PHBM berupa sikap sebagian petugas Perhutani yang kurang mendukung pelaksanaan PHBM, kurangnya curah waktu ketua LMDH dalam kegiatan LMDH, friksi LMDH dengan Kepala Desa, tinggal, partisipasi yang belum tinggi serta keadaan geografis dukuh-dukuh yang terpisah menyebabkan sulitnya komunikasi.

6.1.3 Model penyempurnaan pelaksanaan PHBM dalam rangka pelestarian hutan berkelanjutan.

- a. Perencanaan PHBM dilaksanakan secara partisipatif didahului Pengenalan Desa Partisipatif (PDP) atau PRA yang dilakukan oleh orang/pihak berkompeten dan dijabarkan dengan tujuh langkah perencanaan.
- b. Kelembagaan LMDH harus terbuka terhadap hubungan kerja sama dengan berbagai institusi yang terkait dengan pelestarian hutan dan lingkungan hidup.
- c. Kegiatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dirancang sebagai proses belajar yang partisipatif dan berkelanjutan, meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam

LMDH dan kegiatan PHBM dilakukan dengan cara memperluas kesempatan, dialog, motivasi dan perubahan sikap stakeholders yang terkait serta meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan berlandaskan kegiatan yang partisipatif, otonom, mandiri, berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- d. Forum Komunikasi PHBM mengevaluasi kegiatan PHBM dengan cara partisipatif yang mencakup perumusan indikator, ukuran keberhasilan, pengumpulan data, analisis, penilaian dan perumusan tindak lanjut untuk dijadikan umpam balik dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan.

6.2 SARAN

6.2.1 Pelaksanaan PHBM di Desa Jegong.

- a. Perencanaan dan penentuan desa untuk penerapan PHBM harus didahului dengan PDP/PRA yang dilakukan oleh pihak yang ahli dan kompeten.
- b. Pengenalan program PHBM kepada masyarakat desa dilakukan dengan cara diskusi atau dialog.
- c. Rencana penggunaan dana bagi hasil yang diterima LMDH harus disosialisasikan kepada masyarakat desa Jegong agar tidak menimbulkan prasangka negatif dan membuka intervensi pihak luar.
- d. Keanggotaan Forum Komunikasi PHBM agar dijabat bukan oleh pejabat pemerintah, tetapi personil dari instansi terkait yang mampu memajukan PHBM, diberi kewewenang, alokasi pendanaan yang memadai dan mempunyai curah waktu cukup.

- e. Persepsi masyarakat Desa Jegong yang mengakui kepemilikan hutan oleh Perhutani dan manfaat hutan bagi ekologi, ekonomi dan sosial, digunakan sebagai modal sosial untuk pelaksanaan PHBM.
- f. Memperkecil kesenjangan persepsi mengenai pelaksanaan PHBM antar penduduk pada dukuh-dukuh di Desa Jegong dengan cara meningkatkan komunikasi orang per orang, lokasi pertemuan LMDH secara bergiliran pada keempat dukuh, dan metode pertemuan yang lebih akrab, misalnya pengaturan posisi duduk, suasana yang lebih santai dan lain-lain.
- g. Persepsi positif masyarakat desa mengenai manfaat ekologi hutan, tanggungjawab masyarakat terhadap keamanan hutan dan perilaku petugas Perhutani yang baik harus terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan memberikan keteladanan terutama oleh aparat Perhutani khususnya petugas lapangan.
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa Jegong untuk menjadi anggota LMDH dengan melakukan dialog yang berkelanjutan, sehingga mereka tertarik untuk menjadi anggota berdasar atas kemauan sendiri.
- i. Meningkatkan kehadiran anggota LMDH dalam kegiatan pertemuan dan penyampaian usul-usul dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam berdialog melalui pelatihan-pelatihan, memberikan insentif (baik berupa materi maupun pengetahuan) bila hadir, serta menyebar luaskan naskah rencana kerja LMDH untuk dibaca masyarakat desa secara luas misalnya melalui papan pengumuman di desa maupun di dukuh.
- j. Menganekaragamkan bentuk sumbangan dan keikutsertaan anggota LMDH dalam kegiatan PHBM, dengan mencari inovasi baru dalam meningkatkan kesejahteraan.

- k. Model PHBM yang disempunakan melalui penelitian ini merupakan modsel yang universal dan dapat diterapkan pada desa hutan di tempat lain di berbagai tipe dan fungsi hutan.

6.2.2 Faktor-faktor pendorong dan penghambat.

- a. Faktor-faktor pendorong berupa kesempatan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan yang diberikan kepada masyarakat desa hutan perlu diperluas (misalnya dalam industri pengolahan hasil), sedangkan yang berupa persepsi positif harus dijaga dan ditingkatkan.
- b. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PHBM baik yang berupa perilaku yang negatif, kurangnya curah waktu, adanya friksi, keadaan geografis dan rendahnya tingkat partisipasi harus segera diatasi dengan memperbanyak komunikasi serta pemilihan lokasi (bergilir antar dukuh) dan cara komunikasi yang tepat (personal, penataan pertemuan yang lebih akrab dan lain-lain).

6.2.3 Model penyempurnaan Perencanaan dan Pelaksanaan PHBM dalam rangka pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

- a. Perencanaan PHBM wajib dilaksanakan melalui Perencanaan partispatif didahului dengan sistem Pengenalan Desa Partisipatif (PDP) atau PRA yang dilakukan oleh orang/pihak berkompeten kemudian dijabarkan dengan tujuh langkah perencanaan.
- b. Penyempurnaan kelembagaan LMDH harus dapat dilakukan bila mana telah diperlukan adanya hubungan kerja sama dengan berbagai institusi yang terkait dengan pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

- c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, kemauan untuk berpartisipasi, ekonomi kerakyatan dilakukan melalui proses belajar partisipatif yang berkelanjutan, serta bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- d. Evaluasi kegiatan PHBM dilakukan secara partisipatif yang mencakup perumusan indikator, ukuran keberhasilan, pengumpulan data, analisis, penilaian dan perumusan tindak lanjut sebagai umpan balik untuk mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

6.3 Rekomendasi.

- a. Hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti untuk menyempurnakan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selaku Pengurus Perusahaan No: 136/Kpts/Dir/2001 tanggal 29 Maret 2001 dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tanggal 22 September 2001 yang mengatur mengenai Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- b. Penelitian ini perlu diperluas dengan pengaruh terjadinya dampak budaya pada warga masyarakat desa hutan karena penerapan PHBM

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhtiar I, Ari C.N. S. 2001. *Hutan Jawa Menjemput Ajal*. Biro Penerbit Arupa. Yogyakarta
- Bruntland, G H. 1988. *Our Common Future*, terjemahan Indonesia: Hari Depan Kita Bersama. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.
- Dwipayana, AAGN Ari. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Penerbit Institute for Research and Empowerment (IRE). Yogyakarta.
- Faisal S, 1989. *Format-Format Penelitian Sosial*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta
- FIKB (Forum Inovasi dan Pemerintahan yang Baik). 2002. *Pengembangan sistem partisipasi dan representasi dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan di kota Depok*. (Dari Internet).
- Iskandar, Untung. 1999. *Menuju Hutan Lestari*. Penerbit BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- Hadi, Sudharto P. 1997, "*Metodologi Penelitian Sosial*" : Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak, Bahan Kuliah Program Pasca Sarjana, UNDIP Semarang.
- _____. 2001, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- _____. 2002. "*Good Governance: Syarat Mutlak mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*", makalah disampaikan pada Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Lingkungan (PS MIL) Universitas Diponegoro. Semarang.
- Khotim, H.M. 2003. *Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan model pengelolaan "Hutan Desa"*. Yayasan Damar. Damarnet. (Dari Internet).
- Kountur, Ronny . 2003. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis*. Penerbit PPM. Jakarta.

- Mardikanto, Totok. 2003. *Konsep dan Penerapan Perhutanan Sosial*. Penerbit Prima Theresia Pressindo. Sukoharjo.
- Moeliono, Ilya. 2003. *Partisipasi manipulatif: Catatan Reflektif tentang Pendekatan PRA dalam Pembangunan Masyarakat*. WWW.balaidesa.or.id/prapar.htm.
- Perum Perhutani. 2001. *Keputusan Ketua Dewan Pengawac Perum Perhutani No. 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*. Jakarta.
- Perhutani (Persero), PT. 2002. *Keputusan Direksi PT. Perhutani (Persero) No. 001/Kpts/Dir/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu*. Jakarta.
- Perhutani (Persero), PT. 2002. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Unit I Jawa Tengah*. Semarang.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi Jawa Tengah*. Semarang.
- Pretty, Jules N. 1996. *Participatory Learning for Integrated Farming. Integrated Farming in Human Development-Proceedings of a Workshop*. (Dari Internet).
- Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. 2003. *Buku Saku Statistik Tahun 1998-2002*. Penerbit Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Semarang.
- Prayitno, Hadi. 1986. *Petani Desa dan Kemiskinan*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Purwadi, Andi. 2004. *Implementasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di KPH Randublatung*. Makalah disampaikan pada Statium Generale Fakultas Kehutanan IPB tanggal 26 Pebruari 2004.
- Sarwono, Sarlito W. 1992. *Psikologi Lingkungan*. Penerbit Grasindo. Jakarta.

- Sigit, Soehardi. 2001. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis-Manajemen*. Penerbit BPFE Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Yogyakarta.
- Simon H. 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran ; Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Penerbit Aditya Media. Yogyakarta.
- _____. 1999. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*. Penerbit BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Penerbit Pustaka Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S). Jakarta
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan masyarakat berwawasan Partisipasi*. Penerbit Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Soehardjo, AJ. 1983. "Asas-asas Pembangunan Masyarakat", makalah disampaikan dalam Penataran dan Lokakarya Pengelolaan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi, tanggal 30 Januari 1983 sampai dengan 5 Pebruari 1983 di Cisarua, Bogor.
- Soerjani, M, et al. 1987. *Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Penerbit UI- Press. Jakarta.